LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2012

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang dirumuskan sebelumnya melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2012 ini, dimaksudkan sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2012. Disamping itu sebagai salah satu

perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam tahun 2012 dan sebagai gambaran dan penilaian secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012 ini, diharapkan akan bermanfaat dan dapat memberikan umpan balik (feedback) bagi pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

Jakarta, Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Ikhtisar Eksekutif 1

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1

1.1 Latar Belakang ..... I - 3

1.2 Maksud dan Tujuan ..... I - 3

1.3 Ruang Lingkup ..... I - 3

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditjen Hubla ..... I - 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2011 ..... II - 1

2.1 Perencanaan Stategis ..... II - 1

2.2 Perencanaan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012 ..... II - 16

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012 ..... II - 23

2.4 Review Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dan Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Hubla Tahun 2012 APBN-P dan Penghematan ..... II - 32

2.5 APBN Ditjen Hubla Tahun 2012 ..... II - 45

2.6 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-Masing Kegiatan Tahun 2012 ..... II – 55

2.7 Kegiatan-Kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2012 II - 55

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2012 ..... III - 1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ..... III - 1

BAB IV PENUTUP ..... IV - 1
4.1 Kesimpulan ..... IV - 1
4.2 Langkah Kedepan ..... IV - 2

Lampiran

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang yang lalu lebih difokuskan pada pertanggungjawaban keuangan. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang pertanggungjawaban keuangannya diterima tanpa syarat, ternyata di kemudian hari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya, baik dilihat dari hasil maupun dampak dari kegiatan tersebut. Menyadari kekeliruan dimasa yang lalu dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan good governance, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 telah diterbitkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 689/JX/6/Y/1 999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pada tahun 2002 yang kemudian disempurnakan lagi menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan/kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2012.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasamya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi organisasi serta tujuan stratejik organisasi telah diformalkan di dalam suatu Rencana Stratejik yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam Rencana Stratejik ditetapkan sejumlah Sasaran Stratejik. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan berakumulasi pada pencapaian tujuan stratejik organisasi di akhir tahun kelima. Alur pikimya adalah apabila tujuan stratejik organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersiapkan telah memenuhi visi dan misinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. UU No.28/1999: Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Peraturan ini mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

5. Inpres No. 5/2004: Percepatan Pemberantasan Korupsi;

   Inpres ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

   Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

   Peraturan ini mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai instansi pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Pedoman ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2012 disusun sebagai salah satu perwujudan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dalam tahun 2012. Disamping sebagai bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Menjadikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.3. RUANG LINGKUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini mencakup pelaksanaan tugas administrasi dan teknis penyelenggaraan transportasi laut selama periode tahun anggaran 2012 yaitu sampai dengan posisi 31 Desember 2012.

1.4 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DITJEN HUBLA

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

(KM. 60 TAHUN 2010)

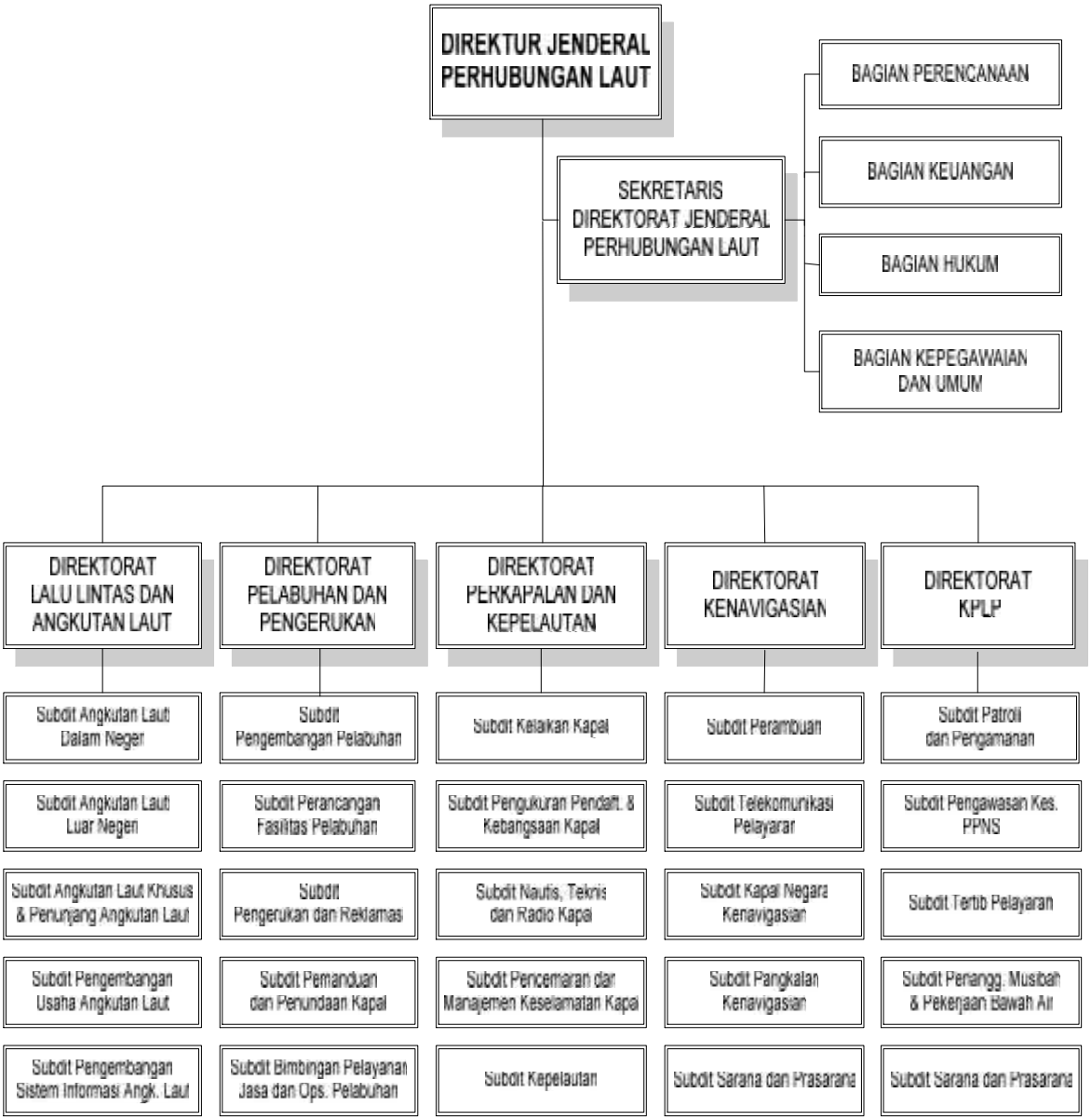

1.4.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setelah Reformasi Kelembagaan

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

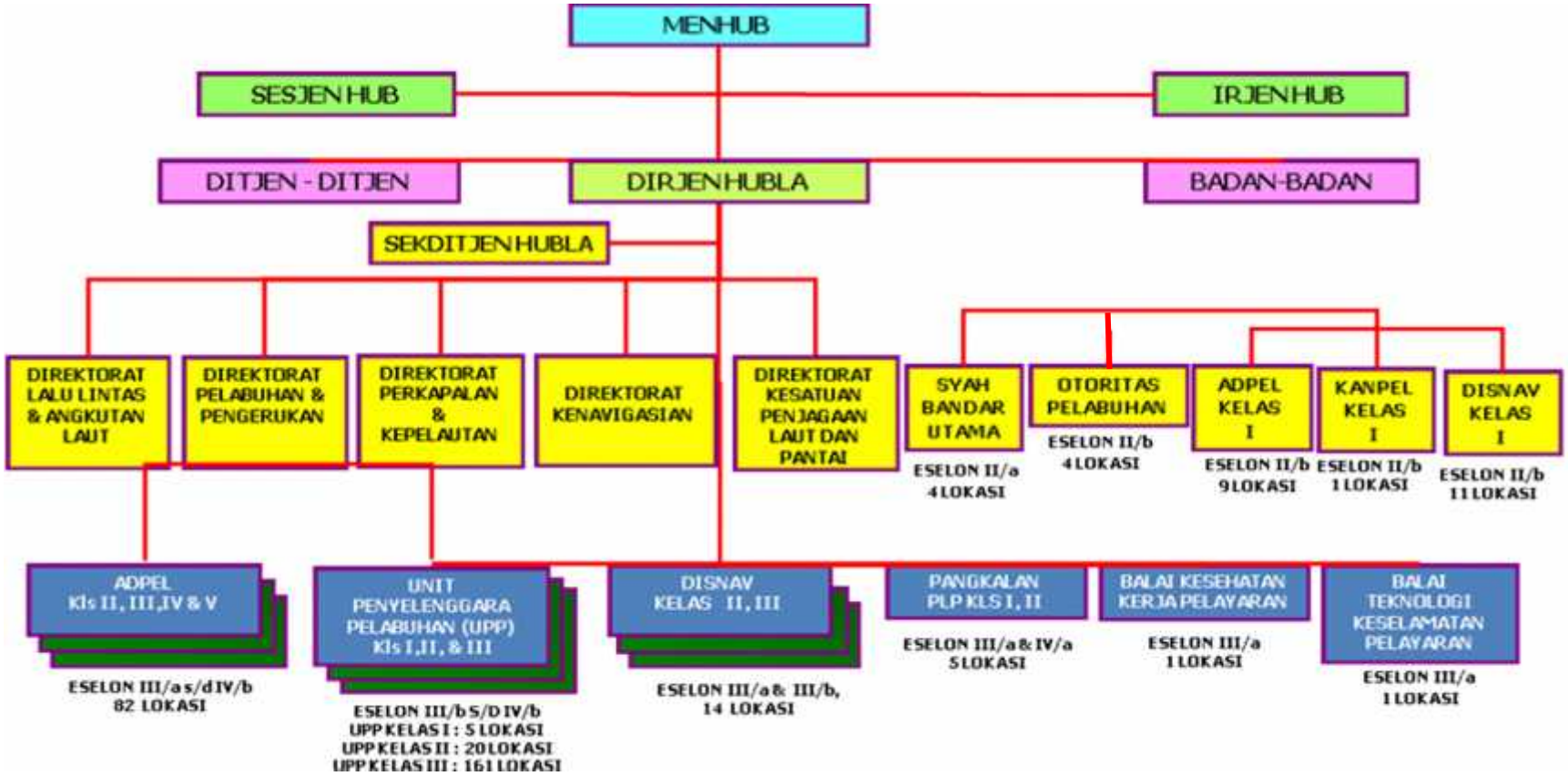

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

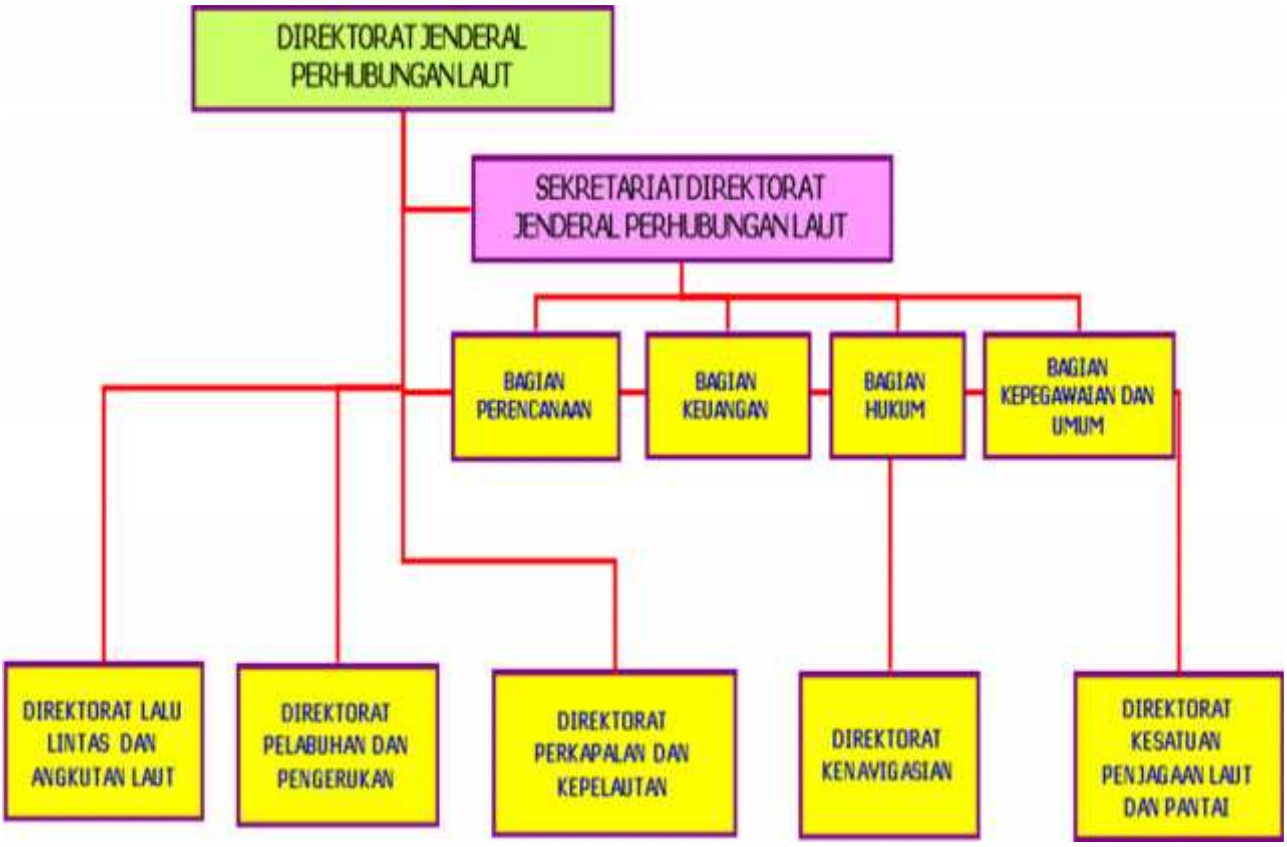

1.4.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Ditjen Hubla

a. Tugas Pokok Ditjen Hubla

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Ditjen Hubla

1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta kesatuan penjagaan laut dan pantai;
3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut:
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c. Susunan Organisasi Ditjen Hubla

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
5) Direktorat Kenavigasian;
6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, statistik serta bimbingan pelaksanaan program organisasi, sistem dan prosedur kerja;
2) Pengelolaan urusan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara;
3) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unit serta pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat;
4) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan serta urusan kepegawaian.
5) Penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.

c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Hukum;
d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Perencanaan

a. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan;

b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri.

c. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Keuangan

a. Pelaksanaan penyiapan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;

b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas;

c. Pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).

c. Bagian Hukum

1) Tugas Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

2) Fungsi Bagian Hukum

a. Penyiapan telahaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum;

c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan penyiapan bahan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri di bidang perhubungan laut.

d. Bagian Kepegawaian dan Umum

1) Tugas Bagian Kepegawaian dan Umu

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Kepegawaian dan Umum

a. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
d. Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan ijin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakikan perusahaan pelayaran asing;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

a) Tugas Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

b) Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
d. Penyiapan pemberian perijinan dan standarisasi penyelenggaraan pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a) Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan

prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharan (Flooting and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharan (Flooting and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (Tank Cleaning), perbaikan dan pemeliharan (Flooting and Running Repair) kapal, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi kepelautan;
d. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (ISM Code), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (Continuous Synopsis Record);

e. Pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
f. Penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat penetapan, tanda panggilan (call sign) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun kapal dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal;
h. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a) Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

b) Fungsi Direktorat Kenavigasian

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

d. Penyiapan pemberian perijinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

d. Penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

e. Pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air dan pemberian perijinan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidikan pegawai negeri sipil, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;

g. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

7) Tugas dan Fungsi kelembagaan baru di lingkungan Ditjen Hubla

a) Otoritas Pelabuhan

Otoritas Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial dengan beberapa tugas sebagai berikut:

b) Syahbandar

Syahbandar mempunyai Fungsi sebagai pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dengan beberapa tugas sebagai berikut:

c) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai Fungsi sebagai Pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial

d) Sea and Coast Guard

Sea and Coast Guard mempunyai Fungsi sebagai Penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai

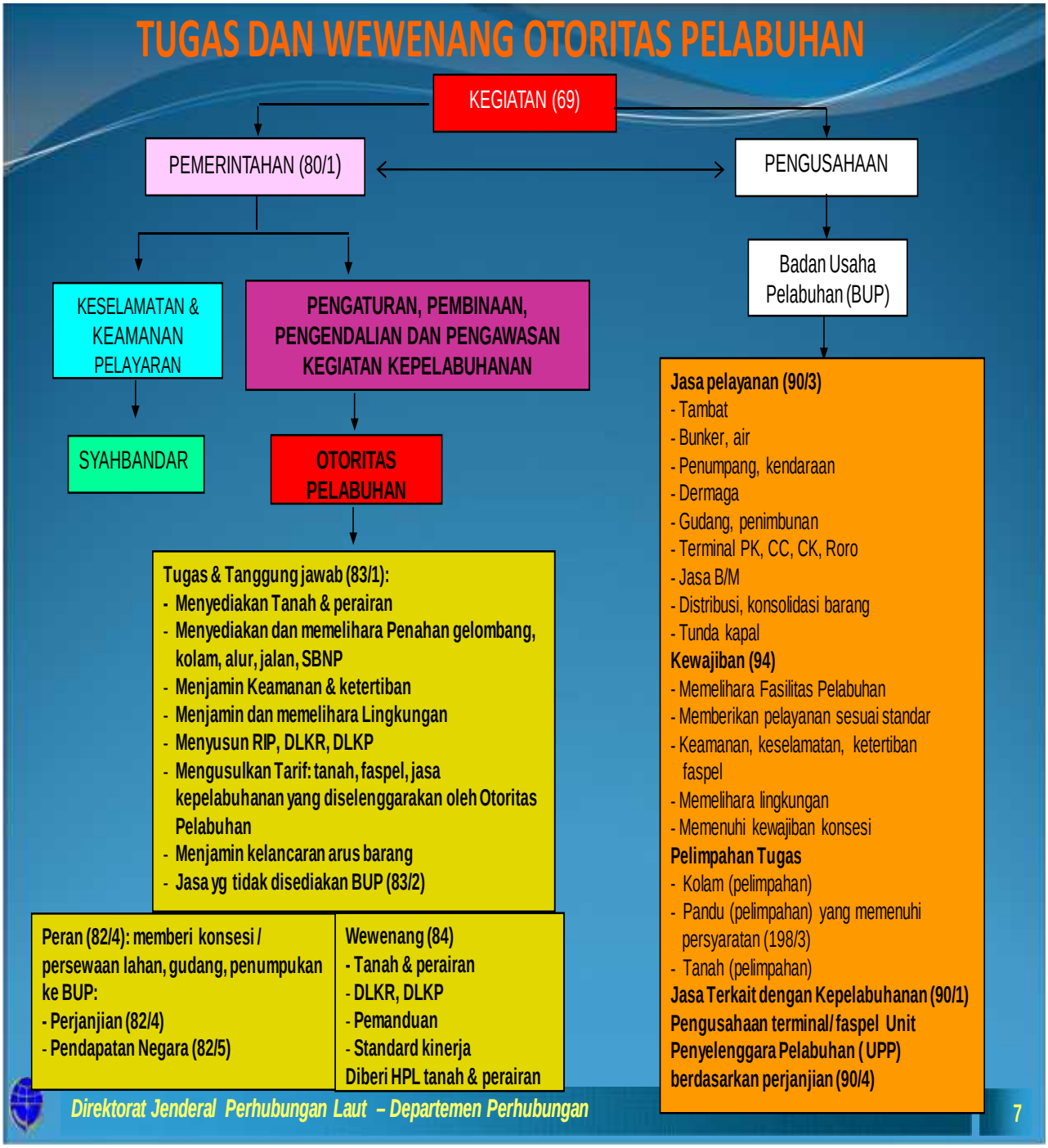
TUGAS DAN WEWENANG OTORITAS PELABUHAN
KEGIATAN (69)
PEMERINTAHAN (80/1)
PENGUSAHAAN
KESELAMATAN & KEAMANAN PELAYARAN
PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KEPELABUHANAN
Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
SYAHBANDAR
OTORITAS PELABUHAN
Tugas & Tanggung jawab (83/1):
- Menyediakan Tanah & perairan
- Menyediakan dan memelihara Penahan gelombang, kolam, alur, jalan, SBNP
- Menjamin Keamanan & ketertiban
- Menjamin dan memelihara Lingkungan
- Menyusun RIP, DLKR, DLKP
- Mengusulkan Tarif: tanah, faspel, jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan
- Menjamin kelancaran arus barang
- Jasa yg tidak disediakan BUP (83/2)
Peran (82/4): memberi konsesi / persewaan lahan, gudang, penumpukan ke BUP:
- Perjanjian (82/4)
- Pendapatan Negara (82/5)
Wewenang (84)
- Tanah & perairan
- DLKR, DLKP
- Pemanduan
- Standard kinerja
Diberi HPL tanah & perairan
Jasa pelayanan (90/3)
- Tambat
- Bunker, air
- Penumpang, kendaraan
- Dermaga
- Gudang, penimbunan
- Terminal PK, CC, CK, Roro
- Jasa B/M
- Distribusi, konsolidasi barang
- Tunda kapal
Kewajiban (94)
- Memelihara Fasilitas Pelabuhan
- Memberikan pelayanan sesuai standar
- Keamanan, keselamatan, ketertiban faspel
- Memelihara lingkungan
- Memenuhi kewajiban konsesi
Pelimpahan Tugas
- Kolam (pelimpahan)
- Pandu (pelimpahan) yang memenuhi persyaratan (198/3)
- Tanah (pelimpahan)
Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan (90/1)
Pengusahaan terminal/ faspel Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) berdasarkan perjanjian (90/4)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Departemen Perhubungan
7

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2012

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 REVIEW RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 – 2014

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 disusun atas dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2012, Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014.

Review Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 memberikan gambaran tentang Visi, misi, tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010 – 2014. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun

2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

Visi Kementerian Perhubungan adalah "Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah."

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 misi Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi perlu disesuaikan kembali misi Kementerian Perhubungan menjadi :

1.1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

1.2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

1.3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas ketidakpastian situasi keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

1.4. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

1.5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten

Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi.

1.6. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi kedepan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

Melalui misi tersebut Kementerian Perhubungan harus mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur yang saling terintegrasi ke seluruh wilayah dalam rangka mewujudkan konektivitas wilayah Indonesia.

Guna mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, ditetapkan Tujuan Kementerian Perhubungan yaitu :

"Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis".

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan peningkatan peran Daerah, BUMN, Swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi, termasuk peningkatan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi maupun peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada optimalisasi dayaguna tanpa pembebanan kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

Sasaran Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;
4. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi;

5. Peningkatan kualitas SDM transportasi dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
6. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

Kebijakan Kementerian Perhubungan yaitu:

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, kebijakan pembangunan dan penyelenggara transportasi meliputi:

1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional;
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan keutuhan NKRI;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi;
4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal;
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha;
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.

Memperhatikan kebijakan yang terus menerus mengalami perubahan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, menjadi:

1. Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional;
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender;
3. Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi sebagai upaya peningkatan efisiensi;
4. Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
5. Mendorong pembangunan transporasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan yaitu:

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan dalam mengimplementasikan visi, misi dan strategi Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Indikator yang terkait dokumen tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 adalah indikator keluaran (output), untuk kegiatan serta indikator hasil (outcome) untuk sasaran.

Penetapan indikator kinerja kegiatan dan sasaran harus didasarkan pada prakiraan yang realistis dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maupun data pendukung indikator kinerja kegiatan.

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubngan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 dengan tambahan Indikator kegiatan yang bersifat strategis sebagai berikut:

Sasaran Kementerian Perhubungan yang pertama "Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal" diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian kecelakaan transportasi nasional yang disebabkan oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;
2. Jumlah gangguan keamanan pada sektor transportasi oleh faktor yang terkait dengan kewenangan Kementerian Perhubungan;
3. Rata-rata Prosentase pencapaian On-Time Performance (OTP) sektor transportasi;
4. Jumlah sarana transportasi yang sudah tersertifikasi;

5. Jumlah prasarana transportasi yang sudah tersertifikasi.

Sasaran Kementerian Perhubungan kedua "Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah" diukur dengan indikator kinerja utama yaitu :

1. Jumlah lintas pelayanan angkutan perintis dan subsidi.

Sasaran Kementerian Perhubungan ketiga "Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi" adalah:

1. Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Total produksi angkutan penumpang;
3. Total produksi angkutan barang.

Sasaran Kementerian Perhubungan keempat "Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi" diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta.

Sasaran Kementerian Perhubungan kelima "Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi" diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Nilai Akuntabilitas Kementerian Perhubungan;

2. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
3. Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN;
4. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat;
5. Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan;
6. Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;
7. Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan.

Sasaran Kementerian Perhubungan keenam "Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta teknologi transportasi yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim" diukur dengan indikator kinerja utama;

1. Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional;
2. Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional;
3. Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi;
4. Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan.

2.1.2 REVIEW RENSTRA DITJEN HUBLA TAHUN 2010 - 2014

Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla.

RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Adapun penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla terdapat pada tabel berikut.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang hanus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Berbagai upaya sedang dan akan terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, agar fungsi pengawasan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta dapat menegakkan supremasi hukum yang konsisten dan meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peran Aparatur Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan atau kewenangan pejabat/ unit kerja aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pengembangan sistem informasi pengawasan secara transparan dan akuntabel terdiri dari ketersediaaan informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu juga dilakukan pendayagunaan sistem pengawasan baik pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik, terwujudnya akuntabilitas publik pemerintah dan terciptanya pemerintah yang baik, serta terwujudnya sinergi pengawasan di Iingkungan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

1) Visi Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, adalah:

terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Misi Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah menetapkan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi 5 (lima) misi utama pembangunan yang harus ditempuh sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
3. Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan;
4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan;

3) Tujuan Ditjen Hubla

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
2. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.
3. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan penegakan hukum;
5. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran

4) Sasaran

Sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2010 – 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan keselamatan pelayaran dan keamanan transportasi laut;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut
3. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan;

4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta administrasi negara di sektor transportasi laut;

5. Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut

---

Sasaran pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2010 – 2014 setelah direview yaitu sebagai berikut :

---

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi laut;
4. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi laut sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi laut;
5. Peningkatan kualitas SDM transportasi laut dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
6. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi laut yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

---

5) Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan diwujudkan dengan menetapkan arah kebijakan transportasi laut sebagai berikut:

1. Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi laut yang handal dalam upaya kelancaran mobilitas dan distribusi barang, jasa guna mendukung peningkatan daya saing produk nasional;
2. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keandalan maupun kapasitas sarana/prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki terkait implementasi Pengarusutamaan Gender;
3. Memberikan dan meningkatkan kesempatan/peran seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, serta BUMN, swasta maupun masyarakat untuk penyediaan infrastruktur transportasi laut termasuk dalam menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai upaya peningkatan efisiensi;
4. Meningkatkan kualitas SDM transportasi laut guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif;
5. Mendorong pembangunan transporasi laut berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi laut yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim

2.2 Perencanaan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

Proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2010 – 2014, yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Hubla melalui berbagai kegiatan secara tahunan termasuk didalamnya adalah perencanaan kinerja 2012 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahun 2012 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Ditjen Hubla untuk mencapainya dalam tahun 2012. Hubungan antara rencana

kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan LAKIP dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Dokumen yang Digunakan dalam Sistem AKIP

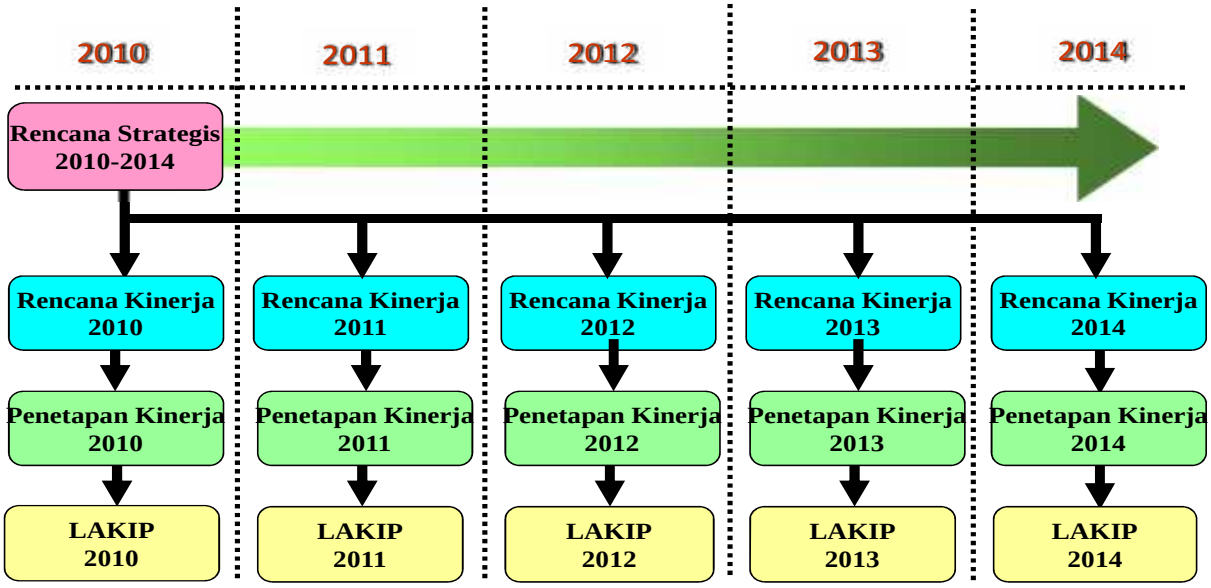

Dengan demikian, Rencana Kinerja 2012 Ditjen Hubla merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2012 sedangkan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012 merupakan bentuk komitmen penuh Ditjen Hubla untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi Ditjen Hubla.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi laut sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan visi, misi dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama. Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tk. Eselon I di lingkungan kementerian Perhubungan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Perhubngan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementarian Perhubungan tanggal 28 Desember 2012.

Sesuai PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementarian Perhubungan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu sebagai berikut:

Sasaran 1:

Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Sasaran tersebut mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

<u>Sasaran Strategis (SS) 1:</u>

Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia;
2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

Sasaran Strategis (SS) 2:

Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelautan kapal;

Sasaran 2:

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran tersebut mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) 3:

Meningkatnya AKSESIBILITAS masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

4. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut;
5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Sasaran 3:

Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut

Sasaran tersebut mempunyai sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) 4:

Meningkatnya KAPASITAS pelayanan transportasi laut nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;
7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis;
8. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional;
9. Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional;
10. Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;
11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Sasaran Strategis (SS) 5:

Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

12. Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan

Sasaran Strategis (SS) 6:

Meningkatnya PELAYANAN pelayaran transportasi laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian waiting time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;
14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan'

15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Sasaran 4:

Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut

Sasaran Strategis (SS) 7:

Melanjutkan restrukturisasi KELEMBAGAAN di sub sektor transportasi laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

16. Jumlah MoU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut;

Sasaran 5:

Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi

Sasaran Strategis (SS) 8 :

Meningkatnya kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

17. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A;
18. Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B;
19. Jumlah kebutuhan tenaga PPNS;
20. Jumlah tenaga PPNS;
21. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A;
22. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B;

23. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran;

24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;

25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam

Sasaran Strategis (SS) 9 :

Meningkatnya optimalisasi pengelolaan akuntabilitas KINERJA, ANGGARAN, DAN BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

27. Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

28. Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

29. Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Sasaran Strategis (SS) 10 :

Penataan peraturan perundang-undangan dan melanjutkan REFORMASI REGULASI di bidang transportasi laut

30. Jumlah penyelesaian regulasi

Sasaran 6:

Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

Sasaran Strategis (SS) 11 :

Menurunnya dampak sub sektor transportasi laut terhadap LINGKUNGAN melalui pengurangan emisi gas buang

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

31. Jumlah penurunan emisi gas buang (CO_2) transportasi laut

Sasaran Strategis (SS) 12 :

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di bidang transportasi laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan);
33. Jumlah-pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention);
34. Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran);
35. Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance);
36. Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PENETAPAN KINERJA (PK) DITJEN HUBLA TAHUN 2012

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Hubla Tahun 2012

Pada RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebelum direview, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 5 (lima) sasaran dan 33 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2010 - 2014) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla tahun 2010 – 2014, maka telah disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi serangkaian target yang hendak dicapai seperti pada table berikut.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut	1.1 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	39 Kejadian kecelakaan
	1.2 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	76 Kejadian kecelakaan
	1.3 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	22 Kejadian kecelakaan
	1.4 Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	5 Kejadian
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut.	2.1. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	76 Rute
	2.2. Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	1.671 Voyage
	2.3. Jumlah Kota/daerah yang terhubungi oleh transportasi laut	248 Kab / Kota
	2.4. Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	19 Lokasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
3. Meningkatnya pelayanan kepelabuhan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan	3.1 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.940.380 Orang
	3.2 Jumlah penumpang Angkutan Laut Perintis	236.285 Orang
	3.3 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.349.363 Ton
	3.4 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	3.808.313 Ton
	3.5 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	98,85 %
	3.6 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	10 %
	3.7 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	4,10 %
	3.8 Jumlah Pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	48 Pelabuhan
	3.9 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	48 Pelabuhan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	3.10 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	48 Pelabuhan
	3.11 Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan	
	a. Jumlah Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani	102 Pelabuhan
	b. Jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet	114 Pelabuhan
	c. Jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasililitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan	27 Pelabuhan
	d. Jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	95 Pelabuhan
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut.	4.1. Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	60 Orang
	4.2. Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector B	60 Orang
	4.3. Jumlah kebutuhanTenaga PPNS	50 Orang

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	4.4. Jumlah kebutuan tenaga Kesyahbandaran Kelas A	120 Orang
	4.5. Jumlah kebutuan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	150 Orang
	4.6. Jumlah penyelesaian regulasi	10 RPM 5 Rancangan Keputusan Dirjen
5. Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut	5.1. Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	1.476,29 Mega Ton
	5.2. Jumlah kebutuhan tenaga penangulangan pencemaran	60 Orang
	5.3. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	60 Orang
	5.4. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	60 Orang
	5.5. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil polution Prevention)	1.021 Sertifikat
	5.6. Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat
	5.7. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat
	5.8. Jumlah pelabuhan yang menerapkan ecoport (penanganan sampah)	6 Pelabuhan

2.2.2 Penetapan Kinerja (PK) Ditjen Hubla Tahun 2012

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis setiap tahunnya Perencanaan Stratejik dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja Tahunan (Performance Contract). Rencana Kinerja tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (key performance indicators) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2010-2014. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut . Beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Secara lebih rinci, Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012 (yang sudah ditandatangani antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada table berikut yaitu Penetapan Kinerja Ditjen Hubla yang mengacu pada Usulan Revisi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012 disusun setelah DIPA Tahun 2012 ditetapkan. Dokumen Penetapan Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan

target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapan rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012 .

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut	1.1 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	39 Kejadian kecelakaan
	1.2 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh alam	76 Kejadian kecelakaan
	1.3 Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	22 Kejadian kecelakaan
	1.4 Jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian pada transportasi laut	5 Kejadian
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut.	2.1. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	67 Rute
	2.2. Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut	1.491 Voyage
	2.3. Jumlah Kota/daerah yang terhubungi oleh transportasi laut	248 Kab / Kota
	2.4. Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani angkutan laut perintis	19 Lokasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
3. Meningkatnya pelayanan kepelabuhan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan	3.1 Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.940.380 Orang
	3.2 Jumlah penumpang Angkutan Laut Perintis	236.285 Orang
	3.3 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.349.363 Ton
	3.4 Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal asing	3.808.313 Ton
	3.5 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut dalam negeri	98,85 %
	3.6 Prosentase pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut luar negeri	10 %
	3.7 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional	4,10 %
	3.8 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	48 Pelabuhan
	3.9 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	48 Pelabuhan
	3.10 Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan	48 Pelabuhan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	3.11 Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan	
	a. Jumlah Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani	25 Pelabuhan
	b. Jumlah Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet	117 Pelabuhan
	c. Jumlah Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasililitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan	11 Pelabuhan
	d. Jumlah Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	109 Pelabuhan
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut.	4.1. Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector A	30 Orang
	4.2. Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector B	30 Orang
	4.3. Jumlah kebutuhanTenaga PPNS	50 Orang
	4.4. Jumlah kebutuan tenaga Kesyahbandaran Kelas A	60 Orang
	4.5. Jumlah kebutuan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	120 Orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	4.6. Jumlah penyelesaian regulasi	10 RPM 5 Rancangan Keputusan Dirjen
5. Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut	5.1. Jumlah Penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	1.476,29 Mega Ton
	5.2. Jumlah kebutuhan tenaga penangulangan pencemaran	60 Orang
	5.3. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	30 Orang
	5.4. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil polution Prevention)	1.021 Sertifikat
	5.5. Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat
	5.6. Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat
	5.7. Jumlah pelabuhan yang menerapkan ecoport (penanganan sampah)	

2.4 REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PENETAPAN KINERJA (PK) DITJEN HUBLA TAHUN 2012

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mereview RENSTRA, sehingga terdapat beberapa perubahan antara lain Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari 5 (lima) Sasaran menjadi 6 (enam) Sasaran dengan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dari 33 (tiga puluh tiga) menjadi 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama. Dengan adanya review tersebut,

sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Hubla Tahun 2012 yang telah ditandatangani. Dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, Ditjen Hubla melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2012. Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 akan diuraikan pada tabel berikut.

2.3.1 Review Rencana Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

Tabel berikut adalah Rencana Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012 setelah adanya Review Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel 2.3 Review Rencana Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	**(2)**	**(3)**
SASARAN (1) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, Dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal		
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan
	2) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3) Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
SASARAN (2) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah		
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	4) Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis
	5) Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan
SASARAN (3) Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut		
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional	6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang
	7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang
	8) Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	9) Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %
	10) Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.500.000 Ton
	11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12) Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	30 Menit
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
	14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
SASARAN (4) Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut		
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16) Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	 2 - - -
SASARAN (5) Peningkatan Kualitas SDM Dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi		
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17) Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang
	18) Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B	120 Orang
	19) Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	20) Jumlah tenaga PPNS	367 Orang
	21) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	60 Orang
	22) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	120 Orang
	23) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	20 Orang
	24) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	20 Orang
	25) Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	20 Orang
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00
	27) Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206
	28) Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000
	29) Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	30) Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	 1 8 2
SASARAN (6) Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim		
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31) Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32) Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan
	33) Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat
	34) Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat
	35) Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat
	36) Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat

2.3.2 Review Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tentang Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 tanggal 7 Desember 2012. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan. Dengan demikian Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla.

2.3.2 Perubahan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Penetapan Kinerja Tahunan ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Adapun penyesuaian terhadap perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012.

Tabel 2.4
Perubahan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	**(2)**	**(3)**
SASARAN (1) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan, Dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal		
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	2) Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3) Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat
SASARAN (2) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah		
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	4) Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis
	5) Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan
SASARAN (3) Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut		
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional	6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang
	8) Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton
	9) Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %
	10) Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.500.000 Ton
	11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12) Penurunan Turn-around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	30 Menit
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
	15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan
SASARAN (4) Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut		
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16) Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	 2 1 - -
SASARAN (5) Peningkatan Kualitas SDM Dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi		
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17) Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	18) Jumlah kebutuhan tenaga Marine Inspector B	120 Orang
	19) Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang
	20) Jumlah tenaga PPNS	367 Orang
	21) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	60 Orang
	22) Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	120 Orang
	23) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)
	24) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)
	25) Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00
	27) Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206
	28) Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	29) Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	30) Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	 1 2 2
SASARAN (6) Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim		
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31) Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32) Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan
	33) Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat
	34) Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat
	35) Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	36) Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat

2.5 APBN Ditjen Hubla Tahun 2012

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2012 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

Perbandingan Alokasi Pagu DIPA Awal dengan Pagu DIPA Akhir Ditjen Hubla Tahun 2012

NO	URAIAN	PAGU AWAL (Rp. 000)	PAGU AKHIR (Rp. 000)
1	Belanja Pegawai	860.101.074	767.060.401
2	Belanja Barang	1.776.488.657	1.852.715.042
	Rupiah murni (RM)	1.623.060.067	1.694.715.302
	PNBP	153.428.590	153.487.640
	Rupiah Murni Pendamping		
	PHLN		4.512.100
3	Belanja Modal	6.782.553.934	8.930.775.331
	Rupiah murni (RM)	5,729,350,748	7.862.070,052

NO	URAIAN	PAGU AWAL (Rp. 000)	PAGU AKHIR (Rp. 000)
	PNBP	93,198,086	93.139.036
	Rupiah Murni Pendamping	2.375.000	2.375.000
	PHLN	969.830.100	973.191.243
	TOTAL PAGU	9.419.143.665	11.550.550.774
	TOTAL REALISAI		9.996.546.558
	TOTAL SISA DANA		1.554.064.216

Adapun kegiatan penggunaan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) akan diuraikan pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Kegiatan APBN Perubahan (Dana Optimalisasi) Tahun 2012

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelanggaraan Kegiatan Pelabuhan dan Pengerukan		
1.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Buton (Sisi Darat)	10,100
2.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Malarko	13,500
3.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Tapang (sisi darat)	27,100
4.	Lanjutan Pembangunan Break Water Pelabuhan Manggar (Penahan Sedimen)	19,000
5.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Branta	42,000
6.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Sape (sisi darat)	19,000
7.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Labuhan Lombok	20,000

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
9.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Waingapu (Nusantara)	19,000
10.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ba'a	5,000
11.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Atapupu	9,000
12.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Baranusa	10,000
13.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Binanatu	9,000
14.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Padang Tikar	15,494
15.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sukadana	5,000
16.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Kuala Jelay	14,977
17.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sei Gintung, Seruyan	34,801
18.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Batanjung (sisi laut)	20,000
19.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Matasiri	15,000
20.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kuala Semboja	58,100
21.	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Liana Banggai	9,500
22.	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Bungku Toko	9,500
23.	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Lakara	5,000
24.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kalatoa	10,000
25.	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Larea-rea	24,000
26.	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Belopa	24,000
27.	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Pare-pare	14,500
28.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bajoe	19,812,800

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
29.	Pengembangan Faspel Laut Takalar	19,000
30.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Silopo	10,500
31.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manado	12,000
32.	Lanjutan Pembangunan Dermaga Kontainer Tobello	24,500
33.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Buli	15,000
34.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pasipalele	13,500
35.	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Sofifi (sisi darat)	6,500
36.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pigaraja	8,000
37.	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Wayabula	3,750
38.	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Weda	5,000
39.	Pengembangan Faspel Laut Merauke	15,000
40.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Fak-fak	19,000
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian		
1.	Pembangunan Rambu Suar 10 M Laut Konstruksi Beton	8,000
2.	Lanjutan pengadaan fasilitas transportasi laut berupa fasilitas Kenavigasian (SBNP) di wilayah Disnav Sibolga untuk 10 (sepuluh) pelabuhan	12,500
3.	Lanjutan pengadaan fasilitas transportasi laut berupa fasilitas Kenavigasian (SBNP) di wilayah Disnav Palembang	17,500
4.	Pengadaan Alat Komunikasi Keselamatan GMDSS SROP Cilacap	16,000
5.	Disnav Surabaya Pengadaan Alat Survey (multybeam)	10,000

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
6.	Distrik Navigasi Samarinda Pengadaan Alat Survey (Multybeam)	10,000
7.	Pengadaan Pengembangan Peralatan GMDSS SROP Kendari	9,000
8.	Lanjutan Pengembangan Kenavigasian SBNP Distrik Navigasi Sorong untuk 12 (dua belas pelabuhan)	55,000

Tabel 2.7
Target Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Ditjen Hubla
pada Kegiatan APBN-P (Saldo Anggaran Lebih) Tahun 2012

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut		
1.	Subsidi Angkutan Laut Perintis (2 trayek)	
	Trayek R-68 (750 DWT/GT.480)	1,296,822
	Trayek R-69 (750 DWT/GT.480)	1,469,320
2.	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ambon 3 (tiga) Trayek	
	Trayek R-71 (Ukuran Kapal 750 DWT/ GT.480)	3,193,333
	Trayek R-72 (Ukuran Kapal 1.000 DWT)	3,193,333
3.	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Tual 2 (dua) Trayek	
	Trayek R-73	4,550,000
	Trayek R-74	4,550,000

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
4.	Subsidi Operasional Angkutan Laut Perintis Pangkalan Saumlaki 2 (dua) Trayek	
	Trayek 75	4,500,000
	Trayek 76	4,500,000
5.	Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Ternate 1 (satu) Trayek R-77	2,900,000
6.	Pembangunan Kapal Perintis Type 2000 GT Tahap I untuk Pangkalan Ambon 1 (satu) Unit paket G	11,250,000
7	Pembangunan Kapal Perintis Type 2000 GT Tahap I untuk Pangkalan Jayapura 1 (satu) Unit paket H	11,300,000
8	Pembangunan Kapal Perintis Type 1200 GT Tahap I untuk Pangkalan Saumlaki 1 (satu) Unit paket E	7,500,000
9	Pembangunan Kapal Perintis Type 200 DWT Tahap I untuk Jayapura, paket I	2,650,000
10	Pembangunan Kapal Perintis Type 200 DWT Tahap I untuk Jayapura, paket J	2,650,000
Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelanggaraan Kegiatan Pelabuhan Dan Pengerukan		
1.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Tapang	4,878,250
2.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tiram	9,758,000
3.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sadai	19,534,200
4.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Branta	14,817,630
5.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pasean (Breakwater)	14,652,978

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
6.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Taddan	14,685,700
7.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Wangi	19,539,875
8.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Panarukan	19,542,625
9.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kalbut	14,683,750
10.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tanjung Tembaga/Probolinggo	35,000,000
11.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bima	19,567,377
12.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Badas	17,978,900
13.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Lembatta	19,541,000
14.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Moru	29,272,358
15.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Reo	24,444,020
16.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan laut Komodo	12,108,800
17.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Waikelo	4,871,000
18.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Waingapu	9,765,264
19.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Baing	7,809,000
20..	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Ba'a	19,541,000
21.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Papela	4,876,950
22.	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batutua	19,541,000
23.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Atapupu	14,784,100
24.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Wini	17,743,356
25.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kota Ende	13,186,000

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. Juta)
26.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Palue	5,867,000
27.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Waiwerang	9,767,000
28.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Lamakera	5,867,000
29.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Larantuka	19,515,150
30.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Marapokot	10,000,000
31.	Pengerukan Alur Pelayaran Sintete	14,636,000
32.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sukadana	14,731,000
33.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Anggrek	9,836,500
34.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Gorontalo	6,830,000
35.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Munte	21,765,000
36.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jeneponto (Sisi Darat)	4,877,000
37.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Garongkong	9,904,825
38.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bula	4,387,289
39.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pantoloan	9,806,821
40.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Amahai	12,800,000
41.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Yos Sudarso	20,050,860
42.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Wolu	4,876,375
43.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Saparua	16,800,000
44.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Manipa	4,888,889
45.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Toyando	21,300,000

46.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Busua	13,700,000
47.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kedi	5,500,000
48.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Lifofa/Maidi	21,900,000
49.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pelita	12,700,000
50.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Sopi	8,800,000
51.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Falabisahaya	3,000,000
52.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Rakyat (Pelra) Tobello	8,000,000
53.	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Gita	6,700,000
54.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Daruba	3,000,000
55.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Jayapura	42,500,000
56.	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kenyam (Mamugu)	10,000,000
57	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Agats	10,000,000
58.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dawai	20,000,000
59.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serui	10,000,000
60.	Pengembangan Pelabuhan Biak	18,000,000
45.	Penyelesaian Fasilitas Pelabuhan Laut Segun	18,525,500
61.	Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sorong	95,000,000
62.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arar / Sorong	5,000,000
63.	Pembangunan Dermaga Penumpang Mansinam Manokwari	22,478,000
64.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Fak-fak	29,420,500

65.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Wasior	23,191,916
66.	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kokas	15,745,224
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kenavigasian		
1.	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Komodo	
	Pemb. Ramsu 15 M Laut di P. Punya	1,017,887
	Pemb. Ramsu 15 M Laut di P. Lasa	1,017,887
	Pemb. Ramsu 15 M Laut di Karang Pelab. Komodo	1,017,887
	Pemb. Ramsu Tg. Langkoi 20 M Darat di P. Komodo	1,415,823
2.	Lanjutan Pengadaan Fasilitas Transportasi Laut Berupa Fasilitas Kenavigasian (SBNP) di Wilayah Disnav Tual	
	Pembangunan Lampu Pelabuhan 20 M Darat Lokasi Pelabuhan Adodo dan Letwurung	5,700,000
3.	Lanjutan Pembangunan dermaga Kenavigasian Sorong	9,785,500
4.	Replacement Rambu Suar 30 meter di Pelabuhan Jayapura dan Pulau Rasi	
	Replacement Rambu Suar 30 meter di Pelabuhan Jayapura	4,000,000

2.6 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2012

Selanjutnya sesuai Pagu Definitif bahwa alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011 adalah sebesar Rp 9.419.143.665,- untuk sub sektor Transportasi Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Alokasi Anggaran Pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2012

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp. 000,-)	PAGU AWAL (Rp. 000,-)
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	2.160.885.991	2.012.042.774
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	511.327.639	593.914.133
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	5.474.454.101	7.340.749.299
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	-	-
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	1.038.946.194	1.368.990.078
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	233.529.740	234.854.490
TOTAL		9.419.143.665	11.550.550.774

2.7 Kegiatan-kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2012

Adapun yang merupakan beberapa Kegiatan-kegiatan Prioritas Ditjen Hubla Tahun 2012 meliputi:

2.7.1 Kegiatan pada UKP4

Beberapa kegiatan yang dimonitor oleh UKP4 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Program N6P32A7 :

   Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan dengan target rencana aksi meliputi :

   a. Terkeruknya 6,279 juta m3 sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan dengan target B-12 berupa Pembangunan Fisik 100% (6,279 m3) dan posisi saat ini telah dilaksanakan pekerjaan pengerukan alur pelayaran sebesar 5,943,806 m^3 sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 87%. Berdasarkan laporan yang diterima terdapat 2 lokasi pekerjaan yang tidak dapat dilanjutkan pekerjaan karena terjadi pemutusan kontrak yaitu Lokasi Nipah Panjang dan Tual;

   b. Pembangunan 14 pelabuhan sesuai MP3EI terdiri dari 7 pelabuhan utama (Pelabuhan Batang, Rembang, Bima, Pantoloan, Anggrek, Gorontalo, dan Gudang Arang Ambon), 6 pelabuhan pengumpul (Pelabuhan Pasean, Jailolo, Komodo, Batanjung, Garongkong, dan Pomako) dan pelabuhan pengumpan (pelabuhan Falabisahaya) dengan target B-12 berupa Pembangunan Fisik 100% dan posisi saat ini telah dilaksanakan pembangunan fisik sebesar 100% sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 100%.

2. Program N6P38A1 :

   Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pelayaran dengan target rencana aksi meliputi :

   a. Terbangunnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran terdiri dari 8 unit pembangunan menara suar, 18 unit pembangunan rambu suar dan 40 unit pengadaan pelampung suar dengan target B-12 berupa Pembangunan Fisik 100% dan posisi saat ini telah dilaksanakan pembangunan SBNP dengan progress fisik sebesar 92,72% sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 92,72%. Adapun justifikasi ketidaktercapaian target disebabkan adanya usulan adendum pekerjaan oleh pihak Satker Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak yang tidak disetujui oleh Pihak Kontraktor, untuk itu pihak Satker Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak menyatakan bahwa pihak kontraktor dinilai wanprestasi sehingga kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas kenavigasian dihentikan dan kedepan akan dibentuk

tim asessment guna menindaklanjuti permasalahan antara Satker Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak dengan Pihak Kontraktor;

b. Terpasangnya Vessel Traffic Service (VTS) di Sorong (ALKI III), Balikpapan (ALKI II) dan Makassar (ALKI II) dengan target B-12 berupa Pembangunan Fisik 100% dan posisi saat ini telah dilaksanakan pembangunan VTS dengan progress fisik sebesar 100% sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 100%.

3. Program N7P41A1 :

Perbaikan Kinerja di Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan dan 7 pelabuhan strategis lainnya dengan target rencana aksi meliputi :

a. Penyelesaian Review Desain konstruksi untuk persiapan lelang konstruksi di Kuartal I Tahun 2013 dengan target B-12 berupa Review Desain Konstruksi untuk persiapan lelang konstruksi kuartal I tahun 2013 dan posisi saat ini capaian target masih belum dapat terpenuhi dikarenakan persetujuan (NOL) peringkat teknis oleh IDB Jeddah baru disampaikan pada tanggal 23 Desember 2012 dan pelaksanaan pembukaan proposal penawaran harga akan dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2013 serta selanjutnya Pelaksanaan Prakualifikasi (PQ) Kegiatan Kontruksi akan dilakukan secara pararel dengan kegiatan review design oleh PMSC sehingga diperkirakan Pelaksanaan konstruksi dapat dimulai paling cepat Tri Wulan III Tahun 2013;

b. Pelaksanaan kegiatan keruk di alur masuk pelabuhan dan kegiatan demolisasion (10%) dengan target B-12 berupa Mobilization, Temporary Facilities Establish & Clearance and Temporary Facilities Maintenance, removal of east and central breakwater, removal of dam barat, construction of new dam tengah 2 and dredging of basin and basin (10%) dan posisi saat ini progres fisik telah mencapai sebesar 12,36 % sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 123%;

c. Terbangunnya/tertingkatnnya/terehabilitasinya 4 pelabuhan strategis yaitu lokasi Pelabuhan Bitung, Balikpapan, Probolinggo, dan Pantoloan dengan target B-12 berupa Pembangunan Fisik 100% dan posisi saat ini telah dilaksanakan pembangunan 4 pelabuhan strategis dengan progress fisik sebesar 100% sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 100%.

4. Program N7P42A5:

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bongkar Muat dengan target rencana aksi meliputi :

a. Revisi Kepmen Menhub Nomnor 14 tahun 2002 terkait Penyelenggaraan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal sebagai tindak Lanjut UU 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dengan target B-12 berupa Penetapan revisi KepMenhub Nomor KM. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal dan posisi saat ini revisi Kepmenhub Nomor KM.14 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal telah dilakukan pembahasan akhir dan tinggal proses administrasi sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 100%;

b. Evaluasi atas implementasi SK Dirjen terkait Kinerja Pelayanan Pelabuhan dan SPM Bongkar Muat di Pelabuhan dengan target B-12 berupa hasil monitoring pelaksanaan SK Dirjen terkait Standar Kinerja Operasional setiap pelabuhan komersial dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bongkar Muat di Pelabuhan periode bulan Desember 2012 dan posisi saat ini telah dilakukan monitoring pelaksanaan SK Dirjen terkait Standar Kinerja Operasional setiap pelabuhan komersial dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bongkar Muat di Pelabuhan periode Desember 2012 sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 100%;

5. Program N10P63A4 :

Penyelenggaraan perhubungan di daerah tertinggal dengan target rencana aksi meliputi :

a. Tersedianya 67 Rute Perintis pada Desember 2012 dengan target B-12 berupa tersedianya rute perintis 100% dari 67 rute dan posisi saat ini telah dilakukan penyelenggaraan angkutan laut perintis pada seluruh wilayah pelabuhan pangkal dan singgah sebanyak 67 rute sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 100%;

b. Tersedianya 9 unit kapal perintis terdiri dari penyelesaian 4 unit kapal perintis sebesar 100% dan pembangunan kapal baru perintis sebanyak 4 unit (20%) dengan target B-12 berupa Pembangunan fisik 100% untuk Penyelesaian 4 unit kapal perintis dan Pembangunan fisik 20% untuk Pembangunan baru kapal perintis sebanyak 4 unit dan posisi saat ini kegiatan penyelesaian pembangunan 4 unit kapal perintis ukuran 500 DWT, 750 DWT, dan 2 ukuran

1200 GT dengan realisasi sebesar 99,4% sedangkan posisi saat ini untuk pembangunan baru 4 kapal perintis ukuran 1200 Paket A, B, C dan D sebesar 39,31% sehingga realisasi capaian target posisi B-12 sebesar 147,70%.

2.7.2 Kegiatan pada MP3EI

Beberapa kegiatan yang terdapat pada kegiatan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Daftar Pelabuhan Dalam Koridor Ekonomi
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
	KORIDOR SUMATERA	
1	Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjusment) pada Proyek Pengembangan Faspel Dumai Tahap III (Dumai Port Development Project Phase III- Loan JBIC No. IP-493) (Pembayaran Tahap II)	27,000,000
2	Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan (prioritas nasional)	250,000,000
3	Pembangunan Faspel Laut Pulau . Tabuan	8,000,000
4	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Malarko tahap V	50,000,000
5	Pengembangan pelabuhan Carocok Painan	15,000,000
6	Pengembangan pelabuhan Carocok Painan	20,000,000
7	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Teluk Tapang	18,790,404
8	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Teluk Tapang	20,000,000
9	Pembangunan Faspel Laut Pasakuat	7,500,000
10	Pembangunan Faspel Laut Pokai	7,500,000
11	Pembangunan Faspel Laut Tua Pejat	7,500,000

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
12	Pembangunan Faspel Laut Tiram	18,500,000
13	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Tg. Buton	23,000,000
	KORIDOR JAWA	
1	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Probolinggo	55,000,000
2	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Kendal	8,000,000
3	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pasean	40,000,000
4	Lanjutan Pembangunan struktur penahan gelombang (breakwater) Pasean	10,000,000
5	Lanjutan Pembangunan Breakwater DI Pasean	15,000,000
6	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pasean	30,000,000
7	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Taddan	41,400,000
8	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Pamanukan-Subang tahap III	4,000,000
9	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Batang Tahap V	40,000,000
10	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Rembang	10,000,000
11	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pacitan Tahap II	10,000,000
12	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Panarukan	6,000,000
13	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Panarukan	1,638,000
	KORIDOR KALIMANTAN	
1	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Tg. Redep	8,050,000
2	Lanjutan Pembangunan Faspel Tana Tidung	8,000,000
3	Lanjutan Pembangunan Faspel Tana Tidung	8,000,000

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
4	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Kuala Semboja termasuk supervisi	50,000,000
5	Penyelesaian Pembangunan Faspel Kariangau	50,200,000
6	Lanjutan pembangunan Faspel laut Palaihari	4,000,000
7	Pembangunan Faspel Laut Sebuku Tahap I	35,000,000
8	Pemb. Faspel Laut Marabatuan	35,000,000
9	Pembangunan Faspel Laut Matasiri	25,000,000
10	Lanjutan pembangunan Faspel Telok Batang tahap III	3,000,000
11	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Tg. Satai	40,000,000
12	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Tg. Satai	50,000,000
13	Pembangunan Faspel Laut Sukadana termasuk supervisi	30,000,000
14	Pembangunan Faspel Laut Sukadana termasuk supervisi	20,000,000
15	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Batanjung	80,000,000
16	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Tanah Grogot Tahap II	15,500,000
	KORIDOR SULAWESI	
1	Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Pontianak termasuk supervisi	40,000,000
2	Penyelesaian Sisi darat Faspel Laut Garongkong	6,000,000
3	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Sapuka	6,000,000
4	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Mara Bombang	32,343,246
5	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Liukang	30,000,000
6	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Kawio	15,000,000
7	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Matutuang	9,200,000

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
8	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Tahuna	9,300,000
9	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Petta	4,000,000
10	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pulau Para	15,100,000
11	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bukide	10,400,000
12	Lanjutan pembangunan Faspel Lipang	11,250,000
13	Penyelesaian pembangunan Faspel Laut Marore	1,722,802
14	Penyelesaian pembangunan faspel laut Kahakitang	16,500,000
15	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bungkutoko Tahap IV	30,000,000
16	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Miangas	1,000,000
17	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Malonguane	1,000,000
18	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Kakorotan	6,850,000
19	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Dapalan	6,850,000
20	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Mangaran	3,000,000
21	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Karatung	8,000,000
22	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Lirung	5,000,000
23	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Bitung	30,000,000
24	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manado	32,000,000
25	Pengembangan Faspel Laut Donggala	25,000,000
26	Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Anggrek	23,035,232
27	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Gorontalo	20,000,000

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
28	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bau-Bau	20,298,869
29	Rehabilitasi Dermaga Bau-Bau	10,000,000
30	Rehabilitasi Dermaga Cepat Bau-Bau	5,000,000
31	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wanci	5,000,000
32	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Lawele	7,000,000
33	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Siompu	16,100,000
34	Pembangunan Faspel Laut Talaga Raya - Buton	25,000,000
35	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wamengkoli	9,000,000
36	Pembangunan landasan penumpukan kontainer Pelabuhan Bau-bau	5,000,000
37	Pemb. Faspel Laut Batu Atas	10,000,000
38	Pembangunan Faspel Kadatua	20,000,000
	KORODOR BALI – NUSA TENGGARA	
1	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Labuhan Bajo	10,000,000
2	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Komodo	35,577,562
3	Lanjutan pembangunan pelabuhan rakyat di Naunbaunsabu	20,000,000
	KORIDOR PAPUA - MALUKU	
1	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Depapre	10,000,000
2	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jayapura	13,307,000
3	Pengembangan Kapasitas Faspel Laut Waren	10,000,000

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
4	Lanjutan pembangunan faspel laut Wersimar Teminabuan tahap III	6,000,000
5	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Segun Tahap II	10,000,000
6	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bade tahap V	10,046,000
7	Lanjutan Pengembangan Faspel Laut Buli	5,000,000
8	Pembangunan faspel laut Dorosagu	10,000,000
9	Lanjutan pembangunan faspel laut Subaim,	3,769,000
10	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Kedi	5,930,000
11	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Lifofa/Maidi	4,985,000
12	Lanjutan Pembangunan faspel laut Bataka	19,500,000
13	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jailolo	5,250,000
14	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Falabisahaya	
	- Lanjutan pekerjaan trestle (6x8)m2 - Lanjutan pekerjaan dermaga(35x8)m2	604,650 2,086,300
	- Causeway (80x8)m2	4,982,680
	- Urugan areal darat (75x50)m2 tahap II	5,000,000
15	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Sopi	5,000,000
16	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pelita Tahap III	4,250,000
17	Pembangunan Terminal Penumpang Di Pelabuhan Daruba	1,500,000
18	Pembangunan Faspel Laut Pulau Damar Tahap I	20,000,000
19	Pembangunan Faspel Laut Kaimana	25,000,000

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp. 000,-)
20	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wayauwa	1,500,000
21	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pasipalele Tahap II	3,485,000
22	Pembangunan Faspel Laut Busua	15,000,000
23	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Loleojaya tahap III	3,100,000
24	Pembangunan Armada Semut Bastiong	7,500,000
25	Lanjutan pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kokas tahap II	30,000,000
26	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Serui	50,000,000
27	Penyelesaian Pengembangan Faspel Laut Dawai	55,000,000
28	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Weda	9,250,655
29	Lanjutan pembangunan Faspel Laut Sepo Tahap II	4,985,000
30	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Paniti	5,000,000
31	Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sofifi	11,000,000
32	Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pomako	40,000,000
33	Penyelesaian Pembangunan Faspel laut Pomako	20,000,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DITJEN HUBLA TAHUN 2012

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuranan tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tk. Eselon I di lingkungan kementerian Perhubungan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Perhungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementarian Perhubungan tanggal 28 Desember 2012.

Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla. RENSTRA

Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN (I) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	22 Kejadian Kecelakaan	66 Kejadian Kecelakaan	72,73 %
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat	9.298 Sertifikat	130,11 %
SASARAN (II) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				
SASARAN STRATEGIS (3) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	80 Rute Perintis	100,00 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan	386 Pelabuhan	98,22 %
SASARAN (III) Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS (4) Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional				
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang	6.061.571 Orang	120,56 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang	634.000 Orang	100,66 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton	351.985.284 Ton	107,54 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %	98,90 %	100,05 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.500.000 Ton	59.851.000 Ton	100,59 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %	11,80 %	118,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS (5) Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang				
12	Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	30 menit	351 menit	*) Data TRT yg tersedia hanya pada 5 (lima) pelabuhan *) Data tahun 2012 Rata-rata TRT sebesar 87,94 Jam/Kapal
SASARAN STRATEGIS (6) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	15 Pelabuhan	31,25 %
SASARAN (IV) Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi				
SASARAN STRATEGIS (7) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2 - - -	2 - - -	100,00 % - - -

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN (V) Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi				
SASARAN STRATEGIS (8) Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	59 Orang	98,33 %
20	Jumlah tenaga PPNS	367 Orang	367 Orang	100,00 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
				ada karena penghematan
SASARAN STRATEGIS (9) Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00	78,00	100 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206	Rp. 620.558.927.453	187,21 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000	Rp. 9.993.257.136.888	86,52 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824	Rp. 25.241.607.641.062	94,61 %
SASARAN STRATEGIS (10) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi			
	- RPP	1	1	100 %
	- RPM	8	8	100 %
	- Keputusan Dirjen	2	2	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN (6) Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
SASARAN STRATEGIS (11) Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton	0,102 Mega Ton	21,00 %
SASARAN STRATEGIS (12) Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan	6 Pelabuhan	100 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat	972 Sertifikat	95,20 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat	1.332 Sertifikat	87,23 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat	107 Sertifikat	79,85 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat	305 Sertifikat	80,33 %

3.1.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

"Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal"

SASARAN (I) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	66 Kejadian Kecelakaan	72,73 %
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat	9.298 Sertifikat	130,11 %

I. SASARAN STRATEGIS (1)

Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2012 pada Sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal". Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia mengalami penurunan sebesar 20,17 % kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 31 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 24 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia sebanyak 7 kejadian kecelakaan. Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja tahun 2012 diperhitungkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia sebanyak 31 kejadian kecelakaan sedangkan realisasi hanya sebanyak 24 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 129,17 %. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait serta kepada para pihak yang bertanggungjawab kepada kecelakaan kapal yaitu Nahkoda Kapal, Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan Penerbit Sertifikat.

a. Penanggung Jawab Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kapal
    1. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kapal
        a. Nahkoda Kapal
        b. Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran
        c. Aparat Pengawas
        d. Penerbit Sertifikat

b. Kelembagaan

1. Peningkatan Fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
2. Revitalisasi Peran Syahbandar/ADPEL/UPP
3. Pembentukan Lembaga Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan UU 17/2008
4. Pembentukan Lembaga Syahbandar sesuai dengan UU 17/2008
5. Pembentukan Lembaga Penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) sesuai dengan UU 17/2008
6. Peningkatan koordinasi pelaksanaan sistem informasi pelayaran dan meteorologi maritim
7. Melakukan restrukturisasi dan reformasi terhadap lembaga Klasifikasi Indonesia agar dapat berdiri sendiri sebagai lembaga non profit dan lebih independen dan profesional dalam rangka mendapat pengakuan di IACS
8. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran kapalrakyat dan kapal yang berukuran dibawah 7 GT.

c. Sumberdaya Manusia

1. Peningkatan Diklat Teknis Ahli Nautika Tingkat (ANT) I-IV, Ahli Teknik Tingkat (ATT) I-IV;
2. Peningkatan Diklat Teknis Marine Inspector
3. Peningkatan Diklat Teknis Pengukuran Kapal, Pendaftaran & Kebangsaaan Kapal;
4. Peningkatan Diklat Teknis Kepanduan;
5. Peningkatan Diklat Teknis Global Marine Distress Safety System (GMDSS), SBNP, dan Radar Simulator Arpha Simulator
6. Peningkatan Diklat Teknis Kesyahbandaran
7. Peningkatan Diklat Teknis KPLP

8. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISPS-Code, Port State Control Officer
9. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Basic Safety
10. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Advance Fire Fighting
11. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISM Code
12. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Ship Security Officer
13. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli VTS, Operator Basic and Advance, VTS Supervisor, VTS on-the-Job Training, VTS Instructor
14. Peningkatan Diklat Teknis Pengelola National Data Centre (NDC) Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)
15. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat I-III

d. Operator
   1. Pelaporan pelaksanaan perawatan kapal secara berkala (Planned Maintenance System).
   2. Peningkatan pengetahuan operator melalui pelatihan pelatihan tentang keselamatan pelayaran Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

e. Masyarakat
   1. Meningkatkan Sosialisasi bidang keselamatan pelayaran dan sosialisasi tentang barang / bahan Berbahaya.
   2. Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) masyarakat, konsumen dan operator.
   3. Mengadakan program Gerakan Sadar Keselamatan Pelayaran secara Nasional setiap tahun khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang banyak melayani kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal penyeberangan.

f. Penegakan Hukum

1. Peningkatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal konvensi dan non konvensi di pelabuhan.
2. Peningkatan pemeriksaan kapal dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
3. Peningkatan pemeriksaan fasilitas pokok pelabuhan secara berkala.
4. Peningkatan pengawasan pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dan pengawasannya.
5. Peningkatan pengawasan terhadap telekomunikasi pelayaran.
6. Peningkatan pengawasan penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standard.
7. Peningkatan pengawasan penyebarluasan berita tentang meteorologi di bidang maritim.
8. Peningkatan pengawasan terhadap bangunan atau instalasi di perairan serta zona keamanan dan keselamatan berlayar.
9. Peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar, tata ruang perairan dan tata perairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.
10. Peningkatan pengawasan terhadap pemanduan di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa.
11. Peningkatan pengawasan terhadap material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, dan elektronika kapal penumpang dan barang baik untuk kapal konvensi maupun non konvensi.
12. Peningkatan pengawasan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan.
13. Peningkatan pengawasan melekat dalam pemeriksaan, pengujian dan penilikan keselamatan kapal.

14. Peningkatan pengawasan terhadap pemeliharaan kapal secara berkala dan sewaktu-waktu.
15. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis perlengkapan navigasi atau elektronika kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
16. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis peralatan meteorologi sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
17. Peningkatan pengawasan terhadap standar dan persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
18. Peningkatan pengawasan terhadap garis muat dan pemuatan kapal.
19. Peningkatan pengawasan manajemen keselamatan kapal.
20. Pembebasan tugas kepada petugas di lapangan yang melakukan kesalahan (Syahbandar dan Marine Inspector) .
21. Pemeriksaan khusus menyeluruh dengan melakukan Condition Assesment Survey (CAS) Terhadap Persyaratan Keselamatan bagi pengoperasian kapal Ferry Ro-Ro di dalam negeri yang telah berumur 25 tahun.
22. Memberikan sanksi tegas kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan, dan pencabutan ijin bagi operator yang tidak disiplin atau tidak memenuhi ke wajiban keselamatan transportasi laut.

2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

Terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain yaitu yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya muatan kapal yang jatuh dan mengakibatkan kecelakaan. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami peningkatan sebanyak 18 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 48 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66

kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla belum berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain.

Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja yaitu pada tahun 2012 diperhitungkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain sebanyak 48 kejadian kecelakaan namun tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain jauh di atas target yaitu sebanyak 66 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 72,73 %.

TABEL 3.2
Data Kecelakaan Kapal Tahun 2011 dan 2012

NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN	
		2011	2012
A	Jenis Kecelakaan		
1	Kapal Tenggelam	58 (33 %)	49
2	Kapal Terbakar	30 (17 %)	37
3	Kapal Tubrukan	14 (8 %)	20
4	Kapal Kandas	35 (19 %)	38
5	Kapal yg menyebabkan terancamnya Jiwa Manusia & Kerugian Harta Benda	41 (23 %)	24
	Jumlah	178	168
B	Korban & Kerugian		
1	Korban Jiwa (Meninggal, Hilang)	343	150
2	Kerugian Barang (Ton) (Kendaran, Hewan)		1643

NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN	
		2011	2012
C	Bendera Kapal		
1	Berbendera Indonesia		189
2	Berbendera Asing		10
	Jumlah		199
D	Ukuran Kapal		
2	Kapal Gt < 7		13
3	Kapal Gt 7 - 35		28
4	Kapal Gt 35 - 500		68
5	Kapal Gt > 500		90
	Jumlah		199
E	Jenis Kapal		
1	Kapal Motor (Km)		117
2	Motor Tanker (Mt)		3
3	Kapal Tradisional / Klm		29
4	Kapaltug Boat (Tb)		23
5	Kapal Tongkang (Barge)		27
	Jumlah		199
F	Dugaan Faktor Penyebab		
1	Manusia	31 (17 %)	24
2	Alam	99 (56 %)	78
3	Teknis	48 (27 %)	66
	JUMLAH	178	168

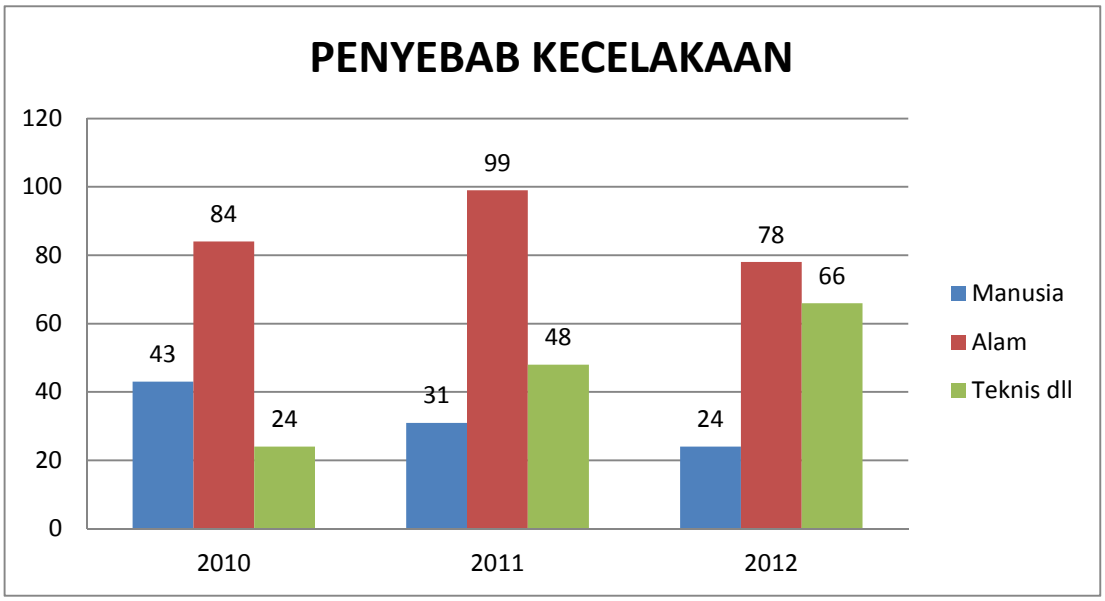

Ditjen Hubla telah berupaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Upaya-upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal
   a. Penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten
   b. Pemeriksaan saat diberikan SPB/Port Clear (Fisik, Dokumen, Jumlah dan Ijasah ABK) Termasuk muatan dan Penumpang
   c. Patroli laut ditingkatkan (Pangkalan PLP dan Syahbandar)
   d. Pemantauan kapal melalui Radio Pantai. (Ship Reporting System)
2. Tindakan Preventif Kecelakaan Kapal
   a. Pemberitahuan Mapel Kepada Stakeholders Terkait.
   b. Peningkatan Patroli Laut.
   c. Diadakan Latihan-Latihan Diatas Kapal.
   d. Penyuluhan Keselamatan Pelayaran.
3. Tindakan Represif Kecelakaan Kapal
   a. Tindakan/ Hukuman Bagi Siapapun Penyebab Kecelakaan Kapal.
   b. Penundaan Kapal Yang Overdraft/Lebih Penumpang.
   c. Tindakan Keras Bagi Aparat Yang Tidak Disiplin.
   d. Mencabut SIUP Bagi Perusahaan Yang Tidak Disiplin.

4. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal
   a. Pemeriksaan Administratif (sesuai checklist), pemeriksaan kelengkapan dan validitas sertifikat dan surat-surat kapal;
   b. Pemeriksan fisik diatas kapal (sesuai checklist), pemeriksaan kondisi NTR serta pemuatan dan stabilitas kapal
5. Prasarana
   1) Pembangunan SBNP
   2) Pembangunan Kapal Navigasi
   3) Pembangunan Telekomuniksi Keselamatan Pelayaran
   4) Pembangunan dan rehabilitasi Kapal patroli
   5) Pengadaan peralatan CCTV
   6) Pengerukan alur pelayaran
   7) Peningkatan Pembangunan Faspel dan Kespel di Daerah terisolasi Terpencil , Kawasan Tertinggal dan Pulau-Pulau Terluar
   8) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Stasiun Radio Pantai
   9) Peningkatan Fasilitas Sarana Perangkatan dan Elektronika pada wilayah VTS
   10) Peningkatan Fasilitas LRIT
   11) Peningkatan Peralatan Komunikasi Marabahaya dan Keselamatan GMDSS dengan Menggunakan Jaringan Radio Teresterial Maupun Satelit
   12) Peningkatan Jumlah Dermaga Kapal Negara Kenavigasian Untuk Peningkatan Kesiagaan dan Mendukung Keandalan SBNP
   13) Peningkatan national data center (NDC) untuk LRIT

6. Sarana
   1) Pengawasan Pemeliharaan Kapal Secara Berkala dan Sewaktu-waktu
   2) Pengawasan dan Penyediaan Perlengkapan Navigasi Eletronika Kapal yang Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Jenis, Ukuran dan Daerah Pelayaran

3) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Manajemen Keselamatan Kapal oleh Pemilik/Operator Kapal (Document of Compliance dan Safety Management Certificate)
4) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Sarana Telekomunikasi Pelayaran
5) Peningkatan aksesibilitas melalui pelayanan pelayaran angkutan laut perintis secara nasional (61 trayek) dan pembangunan kapal-kapal perintis
6) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Kapal Negara (Patroli KPLP dan Kenavigasian)
7) Penataan Alur dan Lokasi Perairan, Implementasi VTS dan Perumusan dan Penetapan Ketentuan Terkait dengan Keselamatan Pelayaran Sehubungan dengan Kegiatan Lepas Pantai
8) Pengkajian Kelayakan dan Pengadaan Peralatan Pengamanan CCTV di Pelabuhan yang Terbuka bagi Pelayaran Luar Negeri dan Pelabuhan yang ditetapkan untuk melayani angkutan lebaran dan natal.
9) Melakukan Kajian mengenai Pro Totipe Kapal-Kapal yang Mengangkut Penumpang dan Barang yang Sesuai untuk wilayah-Wilayah Tertentu

7. Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

   Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP harus diperhatikan sesuai standard yang ditentukan dalam rangka menurunkan tingkat kejadian kecelakaan.

Tabel 3.3
Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP Tahun 2010 s/d 2012

NO	URAIAN	TAHUN			PERTUMBUHAN	
		2010	2011	2012	2011	2012
1	Tingkat Kecukupan SBNP	62,64 %	63,51 %	66,13 %	0,87 %	2,62 %
2	Tingkat Keandalan SBNP	91,43	92,85 %	93,73 %	1,42 %	0,88 %

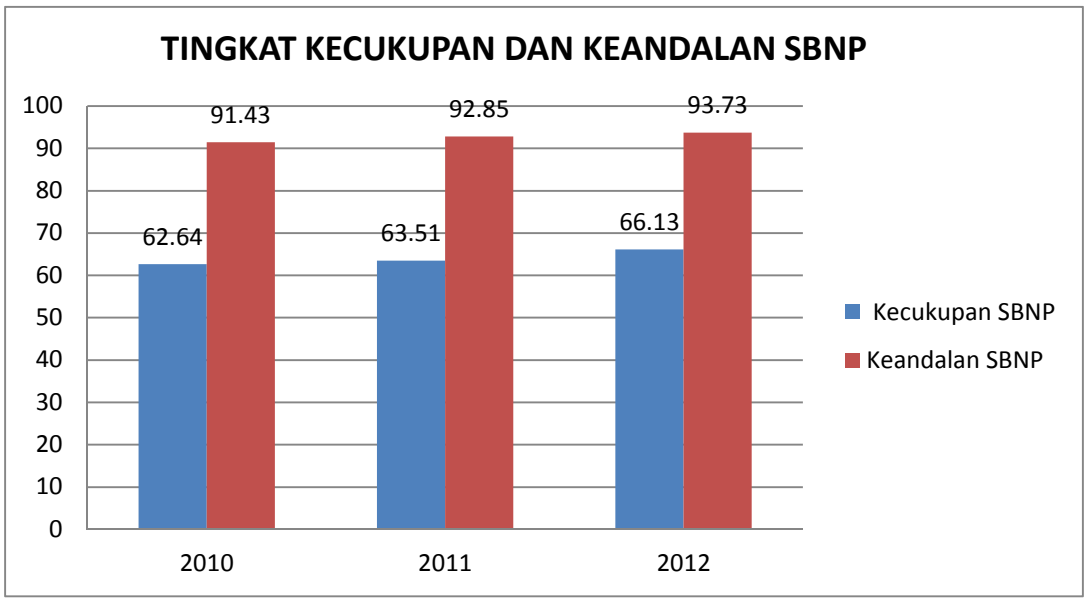

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan dan keandalan SBNP masih rendah dan berada di bawah standard yang ada, dimana untuk tingkat kecukupan diharapkan dapat berada di atas 70 % sedangkan untuk tingkat keandalan minimal 95 %. Dengan demikian pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk meningkatkan tingkat kecukupan sedangkan untuk meningkatkan tingkat keandalan dengan meningkatkan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Pada tahun 2012 Tingkat Kecukupan SBNP sebesar 66,13 % sedangkan pada tahun 2011 sebesar 63,51 % artinya terjadi peningkatan sebesar 2,62 % hal in

karena terdapat beberapa pemasangan SBNP. Pada tahun 2012 Tingkat Keandalan SBNP sebesar 93,73 % sedangkan pada tahun 2011 sebesar 92,85 % artinya terjadi peningkatan sebesar 0,88 % hal in karena terdapat beberapa pemeliharaan SBNP. Adap rincian SBNP yang dimiliki Ditjen Hubla dan Non Ditjen Hubla adalah sebagai berikut:

Jumlah SBNP yang beroperasi terdiri dari milik Ditjen Hubla sebanyak 2.124 unit dan Non Ditjen Hubla sebanyak 1.192 unit.

Tabel 3.4
Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun 2010 s/d 2012

NO	JENIS	DJPL	NON DJPL	JUMLAH (unit)
1.	Menara Suar	279	-	279
2.	Rambu Suar	1.313	714	2.027
3.	Pelampung Suar	372	504	876
4.	Rambu Tanda Siang	138	69	207
5.	Anak Pelampung	40	19	59
	T O T A L	2.142	1.306	3.448

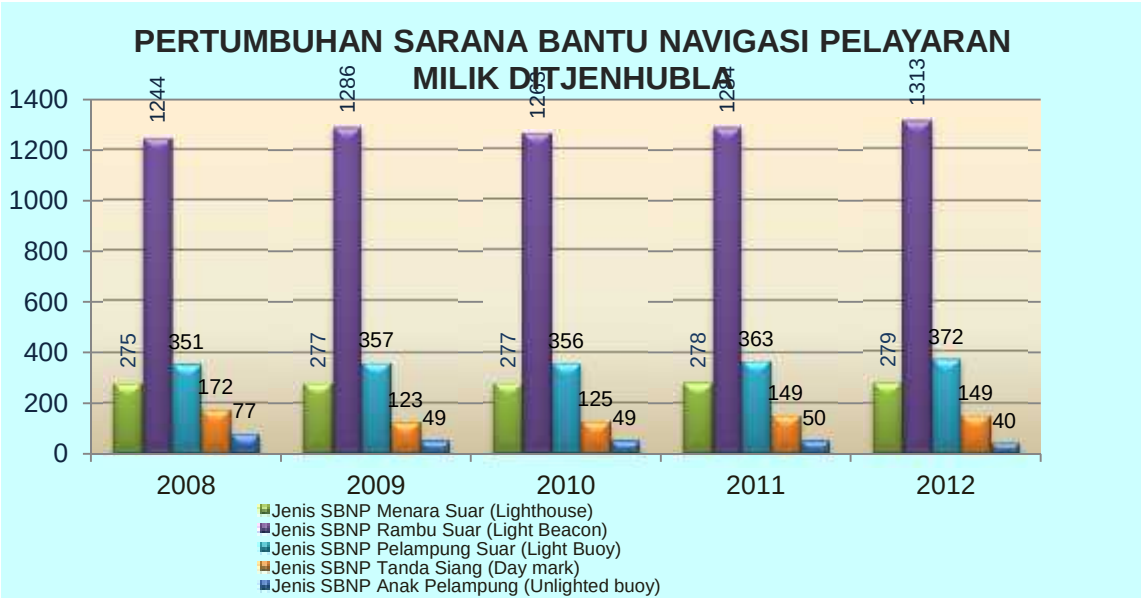

Tabel 3.5
Jumlah Kapal Negara Kenavigasian

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH (unit)
1	Kapal Buoy Tender (kapal induk perambuan)	8
2	Kapal Aids Tender (Kapal Bantu Perambuan)	42
3	Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat Perambuan)	14
	T O T A L	64

II. SASARAN STRATEGIS (2)

"Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)

1. Penerbitan Sertifikat Terkait Pencegahan Kecelakaan

Salah satu upaya pencegahan kecelakaan adalah dengan penerbitan beberapa sertifikat kapal. Perkembangan pemberian sertifikat kapal pada tahun 2012 baik jenis maupun jumlah pemberian sertifikat akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Penerbitan Sertifikat Kapal Tahun 2012

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH			KET.
		2010	2011	2012	
I.	Pengeluaran Sertifikat Kapal				
1	Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (SOLAS)	80	293	350	
	Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (NON SOLAS)	563	2.398	3.096	
2	Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (SOLAS)	76	276	336	
	Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (NON SOLAS)	306	1267	1687	
3	Keselamatan Radio Kapal Barang (SOLAS)	76	300	358	
	Keselamatan Radio Kapal Barang (NON SOLAS)	255	1389	1749	
4	Keselamatan Kapal Penumpang (SOLAS)	0	0	10	
	Keselamatan Kapal Penumpang (NON SOLAS)	10	54	58	
5	Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC)	11	299	299	
6	Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	33	155	368	
7	Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah	28	112	142	
8	Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah	21	60	93	
9	Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Koda)	11	44	59	
	Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Internasional)	0	16	53	
10	Dokumen Otorisasi	9	42	56	
11	Sertifikat Pembebasan	31	96	115	
12	Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya	95	343	464	
13	Kelayakan Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	0	2	5	
II.	Penerbitan Sertifikat Lambung Timbul Kapal				
1	Dalam Negeri	209	239		
2	Luar Negeri	36	62		
TOTAL		1.850	7.447	9.298	

Tingkat perkembangan pengeluaran setifikat Kepelautan tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 akan diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.7
Perkembangan Penerbitan Sertifikat Kepelautan Tahun 2010 – 2012

NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012
I	Sertifikat Ahli Nautika			
1	ANT - I	511	418	454
2	ANT - II	1.311	1.001	867
3	ANT - III	1.175	1.047	1.015
4	ANT - IV	1.406	1.178	1.287
5	ANT - V	2.116	2.668	3.147
6	ANT - D	12.360	14.644	12.899
	TOTAL	18.879	20.956	19.669
II	Sertifikat Ahli Teknika			
1	ATT - I	416	367	390
2	ATT - II	1.103	788	628
3	ATT - III	1.125	1.040	1.070
4	ATT - IV	1.091	1.082	1.161
5	ATT - V	1.432	1.880	2.189
6	ATT - D	6.461	7.960	6.907
	TOTAL	11.628	13.117	12.345
III	Sertifikat Keahlian Kapal Ikan			
1	ANKAPIN I	150	116	137
2	ANKAPIN II	474	756	714
3	ANKAPIN III	1.417	1.018	1.064
	TOTAL	2.041	1.890	1.915
4	ATKAPIN I	147	67	89
5	ATKAPIN II	380	491	553
6	ATKAPIN III	697	252	314

NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012
	TOTAL	1.224	810	956
IV	Pengeluaran Buku Pelaut			
1	Penggantian	1.219	1.601	1.987
2	Buku Baru	3.871	5.529	5.864
3	Perpanjangan	3.552	3.217	4.500
V	Penyijilan Awak Kapal			
	PKL Asing	8.436	8.792	10.767
	PKL Nasional	598	978	3.325
VI	Pengukuhan Keahlian Teknika			
	ATT – I	263	616	728
	ATT – II	817	1.260	1.062
	ATT – III	519	2.499	2.839
	ATT - IV	1.150	1.900	2.328
	ATT - V	1.927	3.178	4.137
	TOTAL	4.676	9.453	11.094
VII	Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika			
	ANT – I	353	773	956
	ANT – II	886	1.513	1.299
	ANT – III	1.786	2.305	2.820
	ANT - IV	965	2.220	2.763
	ANT - V	1.665	4.189	5.290
	TOTAL	5.655	11.000	13.128

1) Sertifikat Ahli Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Sertifikat Ahli Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I s/d V mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Sertifikat Keahlian Kapal Ikan

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Keahlian Kapal Ikan Tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN I s/d III mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4) Pengeluaran Buku Pelaut

Perkembangan pemberian Buku Pelaut. Jenis pengeluaran buku pelaut tahun 2012 untuk permintaan Buku Pelaut Baru, Penggantian Buku Pelaut dan perpanjangan buku pelaut ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

5) Penyijilan Awak Kapal

Tingkat perkembangan Penyijilan Awak Kapal pada tahun 2012. Jumlah Penyijilan Awak Kapal yang bekerja di kapal asing meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kapal nasional juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya .

6) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika sesuai STCW 1978 Amandemen 1995. Jumlah Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika I s/d V pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Nautika tahun 2012 sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1.2.2 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah"

SASARAN (2) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				
SASARAN STRATEGIS (3) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	80 Rute Perintis	100 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan	386 Pelabuhan	98,22 %

III. SASARAN STRATEGIS (3)

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:

4. Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut

Pencapaian indikator kinerja 4 yaitu "Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut " adalah sebesar 100 % dimana target dan realisasi jumlah rute perintis yang dilayani pada tahun 2012 sebesar 67 rute. Adapun rincian rute perintis dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Data Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal
Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2011 dan 2012

NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
1.	MEULABOH	R – 1	18	R – 1	18
2.	TELUK BAYUR	R – 2	20	R – 2	20
		R – 3	20	R – 3	20
3.	BENGKULU	R – 4	26	R – 4	26
4.	TG. PINANG	R – 5	33	R – 5	33
		R – 6	37	R – 6	37
5.	SINTETE	R – 7	28	R – 7	28
		R – 8	22	R – 8	22
6.	KOTABARU	R – 9	28	R – 9	28
7.	SUKAMARA	R – 10	33	R – 10	33
8.	SURABAYA	R – 11	26	R – 11	26
9.	TG. WANGI	R – 12	26	R – 12	26
10.	BIMA	R – 13	26	R – 13	26
		R – 14	21	R – 14	21
11.	KUPANG	R – 15	18	R – 15	24
				R – 68	11
				R – 69	10
		R – 16	22	R – 16	22
		R – 17	22	R – 17	22
		R – 18	20	R – 18	20

NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
12.	BITUNG	R – 19	20	R – 19	20
		R – 20	23	R – 20	23
13.	TAHUNA	R – 21	23	R – 21	23
		R – 22	22	R – 22	22
14.	PAGIMANA	R – 23	16	R – 23	16
15.	KOLONEDALE	R – 24	16	R – 24	16
16.	KENDARI	R – 25	22	R – 25	22
		R – 26	21	R – 26	21
17.	TILAMUTA	R – 27	17	R – 27	17
		R – 28	20	R – 28	20
28.	MAKASSAR	R – 29	23	R – 29	23
19.	MAMUJU	R – 30	19	R – 30	19
20.	AMBON	R – 32	18	R – 32	18
		R – 33	16	R – 33	18
				R – 70	9
				R – 71	9
				R – 72	9
		R – 34	14	R – 34	14
		R – 35	20	R – 35	20
		R – 36	23	R – 36	23
23.	TUAL	R – 36	17	R – 36	17
		R – 37	15	R – 37	15
				R – 73	14
				R – 74	17
24.	SAUMLAKI	R – 38	17	R – 38	17
		R – 39	17	R – 39	17
				R – 38	27
				R – 75	11
				R – 76	9
25.	TERNATE	R – 40	22	R – 40	22
		R – 41	18	R – 41	18
		R – 42	17	R – 42	17
				R – 77	11
26.	BABANG	R – 43	18	R – 43	18
27.	SANANA	R – 45	19	R – 45	19
		R – 46	24	R – 46	24
28.	JAYAPURA	R – 47	30	R – 47	30

NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
		R – 48	34	R – 48	34
		R – 49	28	R – 49	28
		R – 50	28	R – 50	28
29.	BIAK	R – 51	24	R – 51	24
		R – 52	30	R – 52	30
		R – 53	25	R – 53	25
30.	MERAUKE	R – 54	21	R – 54	21
		R – 55	19	R – 55	24
				R – 78	13
		R – 56	22	R – 56	22
		R – 57	22	R – 57	22
		R – 58	15	R – 58	15
		R – 59	21	R – 59	21
31.	MANOKWARI	R – 60	23	R – 60	23
		R – 61	34	R – 61	34
		R – 62	26	R – 62	26
		R – 63	27	R – 63	27
32.	SORONG	R – 64	23	R – 64	23
		R – 65	23	R – 65	23
		R – 66	19	R – 66	19
		R – 67	26	R – 67	26
				R – 78	19
				R – 79	11
				R – 80	10

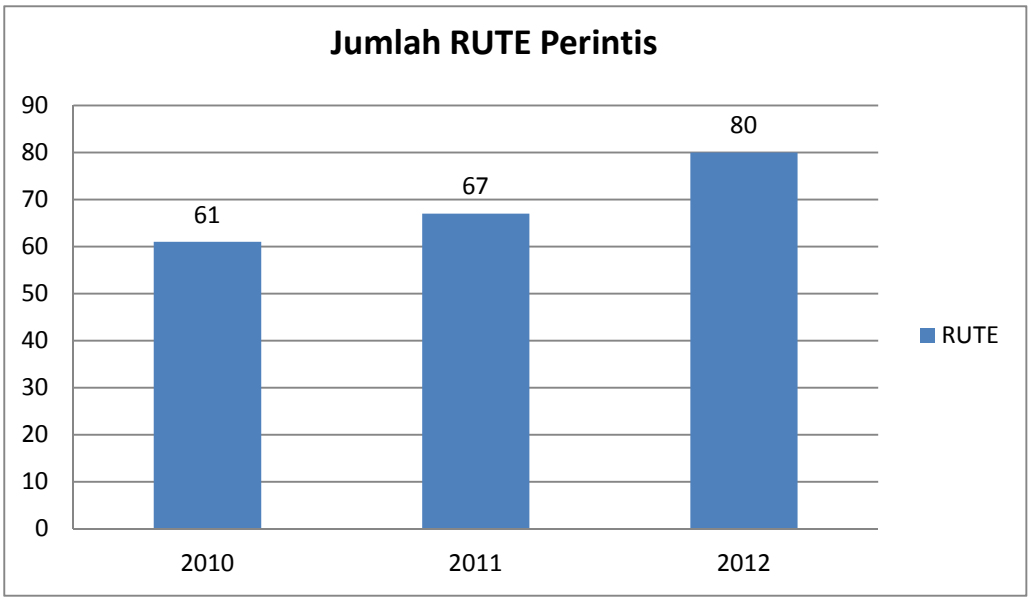

Dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil, belum berkembang dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka telah ditetapkan pada TA. 2012 Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis terapat 67 Rute yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.102/2/3/DJPL-11 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Aggaran 2012 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 21 November 2011.

Namun dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia Tahun 2012 maka diperlukan penambahan pelayanan jasa pelayaran perintis untuk daerah tertinggal dan atau wilayah terpencil serta perbatasan, maka terdapat penambahan rute peintis sebanyak 13 rute perintis atau menjadi 80 rut perintis yang ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.102/1/4/DJPL-12 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.102/2/3/DJPL-11 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Aggaran 2012 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 27 Juni 2012.

Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani oleh kapal perintis diharapkan meningkat pada masa

yang akan datang, sehingga dapat membuka aksesibilitas daerah terisolir dan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah perbatasan. Sedangkan daerah terluar dan perbatasan yang merupakan beranda depan wilayah indonesia terhadap negara yang berbatasan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan keutuhan bangsa, ketahanan nasional serta meningkatkan potensi ekonomi pada wilayah tersebut.

5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut hanya sebesar 98, 22 % karena terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tidak terlaksana, dimana dari target sebanyak 393 pelabuhan realisasi hanya sebesar 386 kegiatan.

3.2.1.3 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran III

"Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut"

SASARAN (III) Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut				
SASARAN STRATEGIS (4) Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional				
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang	6.061.571 Orang	120,56 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang	634.000 Orang	100,66 %

8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton	351.985.224 Ton	107,54 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %	98,90 %	100,05 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.500.000 Ton	59.851.000 Ton	100,59 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %	11,80 %	118,00 %
SASARAN STRATEGIS (5) Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang				
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	30 Menit	*)	*) Data TRT tahun 2011 tidak tersedia; *) Data tahun 2012 Rata-rata TRT sebesar 87,94 Jam/Kapal
SASARAN STRATEGIS (6) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %

14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	15 Pelabuhan	31,25 %

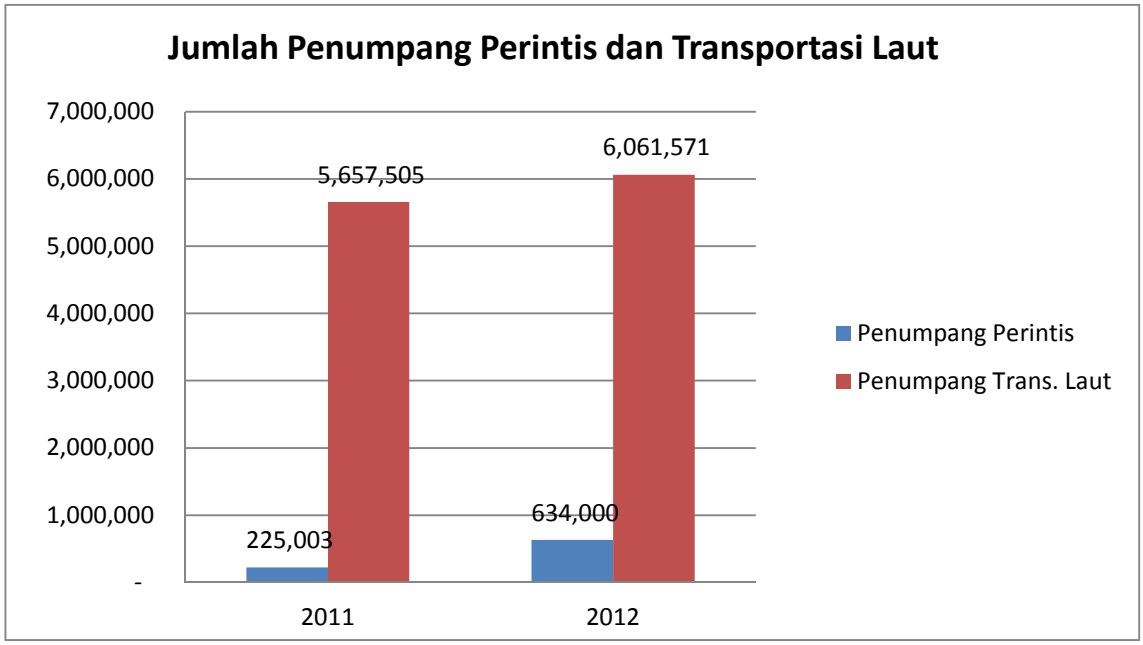

IV. SASARAN STRATEGIS (4)

"Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 120,56 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 5.027.658 orang terdapat realisasi sebanyak 6.061.571 orang yang artinya terdapat peningkatan sebesar 1.033.913 orang.

Tabel 3.6
Perkembangan Angkutan Penumpang Transportasi Laut Tahun 2008 – 2012

NO	TAHUN	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)
1	2008	7.197.890
2	2009	7.664.753
3	2010	5.096.851
4	2011	5.657.505
5	2012	6.061.571

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah penumpang dalam negeri peningkatan sebesar 19,62 % atau sebanyak 994.066 orang.

7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,66 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 629.847 orang terdapat realisasi sebanyak 634.000 orang yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 4.153 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 225.033 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 634.000 orang artinya terdapat peningkatan sebesar 181,74 % atau sebanyak 408.967 orang.

8) Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional

Tabel 3.7
Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Nasional & Asing)
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Nasional	Share (%)	Asing	Share (%)	Jumlah Muatan (Ton)
2008	192.763.874	79,40	50.126.180	20,6	242.890.054
Perkembangan	44.023.245	29,60	-29.088.178	-36,72	14.935.067
2009	258.359.686	90,2	28.007.688	9,8	286.367.374
Perkembangan	65.595.812	34,03	-22.118.492	-44,13	43.477.320
2010	303.119.578	98,10	5.870.818	1,9	308.990.396
Perkembangan	44.759.892	17,32	-22.136.870	-79,04	22.623.022
2011	316.489.377	98,82	3.779.169	1,18	320.268.546
Perkembangan	13.369.799	4,41	-2.091.649	-35,63	11.278.150
2012	351.985.284	98,90	3.914.901	1,10	355.900.125
Perkembangan	35.495.907	0,80	135.732	-0,08	35.631.579

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,66 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 629.847 orang terdapat realisasi sebanyak 634.000 orang yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 4.153 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 225.033 orang dan pada tahun 2012 sebanyak

634.000 orang artinya terdapat peningkatan sebesar 181,74 % atau sebanyak 408.967 orang.

9) Prosentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,05 % artinya dari target pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut sebesar 98,85 % terdapat realisasi sebanyak 634.000 orang yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 98,82 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,82 % dan luar negeri sebesar 1,18 % dan pada tahun 2012 yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,90 % atau sebanyak 408.967 orang dan luar negeri sebesar 1,10 %.

Adapun Total muatan angkutan laut dalam negeri sebesar 355.900.125 ton dimana yang diangkut kapal nasional sebesar 351.985.284 atau 98,90 % sedangkan yang diangkut kapal asing sebesar 3.914.901 atau 1,10 % dari total muatan.

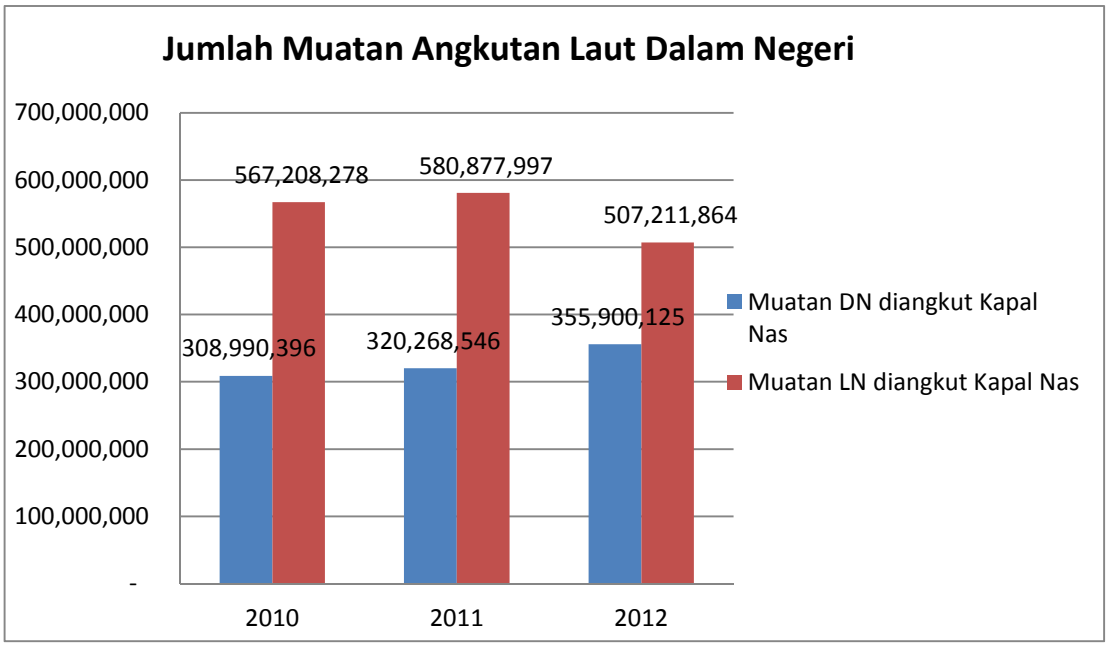

10) Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Tabel 3.8
Perkembangan Muatan Angkutan Laut Luar Negeri
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Nasional	Share (%)	Asing	Share (%)	Jumlah Muatan (Ton)
2008	38.196.693	7,12	498.273.709	92,88	536.470.402
Perkembangan	6.814.823	21,72	-2.240.516	-0,45	4.574.307
2009	49.293.953	8,95	501.661.150	91,05	550.955.103
Perkembangan	11.097.260	29,05	3.387.441	0,68	14.484.701
2010	51.162.187	9,02	516.046.091	90,98	567.208.278
Perkembangan	1.868.234	3,79	14.384.941	2,87	16.253.175
2011	55.183.410	9,50	525.694.587	90,50	580.877.997
Perkembangan	4.021.232	7,86	9.648.496	1,87	13.669.719
2012	59.851.000	11,80	447.360.864	88,20	507.211.864
Perkembangan	4.667.590	3,94	-78.333.723	-2,30	17.632.003

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,59 % artinya dari target jumlah muatan angkutan luar negeri yang terangkut sebanyak 59.500.000 ton terdapat realisasi sebanyak 59.851.000 yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 351.000 ton.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah muatan angkutan luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebanyak 55.183.410 ton dan pada tahun 2012

sebanyak 59.851.000 ton artinya terdapat peningkatan sebesar 3,94 % atau sebanyak 4.667.590 ton.

11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 118,00 % artinya dari target pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut sebesar 10,00 % terdapat realisasi sebesar 11,80 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 9,50 % dan luar negeri sebesar 90,50 % dan pada tahun 2012 yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 11,80 % atau sebanyak 59.851.000 ton dan luar negeri sebesar 88,20 % atau sebanyak 447.360.864 ton sehingga total muatan angkutan laut luar negeri pada tahun 2012 sebesar 507.211.864 ton.

V. SASARAN STRATEGIS (5)

Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang

Sasaran strategis ini mempunyai Indiaktor Kinerja Utama sebagai berikut:

12) Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan;

Pencapaian Penurunan Turn-Around Time (TRT) tahun 2012 belum dapat dievaluasi karena data TRT tahun 2011 tidak tersedia dan data TRT yang ada hanya data tahun 2012 pada beberapa pelabuhan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian TRT Tahun 2012

NO	NAMA PELABUHAN	TRT JAM / KAPAL
1	Belawan	105,40
2	Dumai	109,83
3	BICT	111,89
4	Lhokseumawe	69,95
5	Sibolga	63,65
6	Tanjung Pinang	66,90
	TOTAL RATA-RATA TRT 2012	87,94

VI. SASARAN STRATEGIS (6)

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indiaktor Kinerja Utama sebagai berikut:

13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Tabel berikut adalah daftar pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Sesuai Dengan SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/38/18/DJPL-11

Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 75 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah dtetapkan hanya terdapat sebanyak 36 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8
Data Kinerja Operasional Pelabuhan Tahun 2012

NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah I Belawan Sumatera Utara				
1	Belawan	√	√	√
2	Lhokseumawe	√	√	
3	Dumai	√	√	√
4	Pekanbaru	√	√	
JUMLAH		4	4	2
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah II Tanjung Priok Jakarta				
1	Tanjung Priok	√	√	√
2	Bengkulu	√	√	√
3	Palembang	√	√	
4	Pangkal Balam	√	√	√
5	Tanjung Pandan	√	√	
6	Panjang	√	√	
7	Banten	√		√
8	Pontianak	√	√	
9	Teluk Bayur	√	√	
10	Jambi	√		
JUMLAH		10	8	4
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah III Tanjung Perak Surabaya				
1	Tanjung Perak	√	√	√
2	Tanjung Emas	√	√	√
3	Tanjung Intan	√		
4	Banjarmasin	√	√	
5	Gresik		√	

NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
6	Tangjung Wangi	√	√	√
7	Benoa	√	√	
8	Kupang		√	√
JUMLAH		6	7	4
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah IV Makassar				
1	Makassar	√	√	√
2	Pare-Pare	√		
3	Balikpapan		√	
4	Tarakan		√	
5	Nunukan	√		
6	Bitung	√	√	
7	Manado	√	√	
8	Gorontalo	√	√	
9	Pantoloan	√	√	
10	Toli-Toli	√	√	
11	Kendari	√	√	
12	Ambon	√	√	
13	Ternate	√	√	√
14	Jayapura	√	√	
15	Biak	√	√	
16	Merauke	√	√	
17	Sorong		√	
18	Manokwari	√	√	√
19	Fak-Fak	√	√	√
JUMLAH		16	17	5

14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 75 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah dtetapkan hanya terdapat sebanyak 36 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 31,25 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah dtetapkan hanya terdapat sebanyak 15 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2012 data yang dimiliki hanya pada 48 pelabuhan strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kinerja Pelayanan Kapal Tahun 2011 – 2012

NO	Pelabuhan	Standar Kinerja			2011			2012		
		WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)	WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)	WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)
1.	Belawan	1	2	70	1,35	1,38	66,97	1,17	1,27	72,61
2.	Dumai	2	6	80	2,41	6,80	64,43	1,27	4,95	72,23
3.	Sibolga	1	1	70	00,00	00,0	8,00	0,00	0,00	9,70
4.	Lhok Seumawe	1	1	70	0,39	0	55,89	0,25	0,85	74,01
5.	Pekanbaru	2	12	70	1,00	0,93	8,00	0,22	8,17	49,40
6.	Tanjung Pinang	1	1	70	0,60	9,00	26,54	-	1,30	21,34
7.	Tg. Priok	1	2	80	0,82	1,48	81,34	0,75	1,00	87,18
8.	Panjang	1	1	80	0,45	1,22	62,26	0,44	0,59	62,25
9.	Palembang	1	6	80	0,09	0,60	51,56	0,13	6,25	51,40
10.	Teluk Bayur	1	1	70	0,07	7,20	54,57	0,23	0,63	54,62
11.	Pontianak	1	3	80	0,20	1,01	58,81	0,08	3,38	47,18
12.	Banten	1	1	80	1,00	2,50	76,41	1,00	1,10	83,72
13.	Tg. Perak	2	4	80	2,00	1,01	80,00	0,25	0,90	79,49
14.	Tg. Emas	1	1	80	1,00	4,00	65,00	0,28	0,59	68,37
15.	Banjarmasin	2	4	80	1,00	1,00	79,01	0,78	2,97	70,95
16.	Benoa	1	1	70	0,45	3,00	70,00	0,14	0,35	53,58
17.	Tenau/Kupang	2	1	80	1,30	1,00	65,00	-	0,23	47,71
18.	Tanjung Intan	2	2	80	0,45	1,00	55,00	0,00	3,02	60,67
19.	Makassar	1	1	80	0,57	2,00	80,70	0,54	1,58	80,72
20.	Balikpapan	1	2	80	0,50	1,67	76,47	1,43	1,63	76,72
21.	Samarinda	1	5	37	2,00	0,76	62,65	2,34	4,63	74,85
22.	Bitung	1	2	70	0,43	4,50	64,01	0,50	1,38	64,84
23.	Ambon	1	2	70	0,10	1,00	89,12	1,15	1,63	66,72
24.	Jayapura	1	12	70	1,00	0,50	66,67	0,50	0,68	63,72
25.	Sunda Kelapa	1	2	-	-	-	-	-	-	52,92
26.	Bengkulu	1	2	-	-	-	-	0,23	0,35	73,53
27.	Pangkal Balam	1	2	-	-	-	-	1,00	1,00	75,12
28.	Tg. Pandan	1	2	-	-	-	-	0,17	0,61	20,18
29.	Cirebon	1	2	-	-	-	-	-	1,59	45,12
30.	Jambi	1	2	-	-	-	-	0,43	28,35	38,67
31.	Gresik	1	2	-	-	-	-	1,50	1,13	59,75
32.	Tg. Wangi	1	2	-	-	-	-	0,77	0,75	89,98
33.	Kota Baru	1	2	-	-	-	-	-	-	-
34.	Sampit	1	2	-	-	-	-	-	-	-
35.	Gorontalo	1	2	70	0,54	1,58	70,72	0,54	1,58	70,72
36.	Pantoloan	1	2	70	0,18	1,86	69,49	0,16	1,58	69,49
37.	Manado	1	2	70	0,77	1,85	69,47	0,77	1,58	69,49
38.	Tolitoli	1	2	70	1,22	1,90	62,77	0,72	1,63	64,00
39.	Biak	1	2	70	0,96	1,81	61,77	0,47	1,54	63,00
40.	Nunukan	1	2	70	1,25	2,90	60,69	0,73	2,63	61,92
41.	Sorong	1	2	70	9,00	1,08	53,13	9,08	1,08	54,53
42.	Parepare	1	2	70	1,43	2,90	59,49	0,98	2,63	60,72
43.	Kendari	1	2	70	0,92	1,92	65,85	0,66	1,65	67,08
44.	Tarakan	1	2	70	1,75	2,00	48,38	1,58	2,00	38,82
45.	Merauke	1	2	70	0,79	1,78	51,18	0,87	1,82	51,18
46.	Manokwari	1	2	70	1,25	1,84	91,38	0,90	1,75	91,38
47.	Fakfak	1	2	70	1,09	1,71	75,48	0,90	1,92	73,72
48.	Ternate	1	2	70	1,01	1,05	74,02	0,95	0,68	80,47

Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV

3.2.1.4 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4

"Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi"

S A S A R A N (I V) Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi				
SASARAN STRATEGIS (7) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2 - - -	2 - - -	100,00 % - - -

VII. SASARAN STRATEGIS (7)

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut

Pada tahun 2012 terdapat kerjasama yang sudah pada tahap pelelangan yaitu Tanah Ampo dan Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS)

3.2.1.5 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5

"Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi"

S A S A R A N (5) Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi				
SASARAN STRATEGIS (8) Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100 %
18	Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	59 Orang	98,33 %
20	Jumlah tenaga PPNS	367 Orang	367 Orang	100 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	60 Orang	60 Orang	100 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	120 Orang	120 Orang	100 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

SASARAN STRATEGIS (9) Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00	78,00	100 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206	Rp. 620.558.927.453	187,21 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000	Rp. 9.993.257.136.888	86,52 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824	Rp. 25.241.607.641.062	94,61 %
SASARAN STRATEGIS (10) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	 1 8 2	 1 8 2	 100 % 100 % 100 %

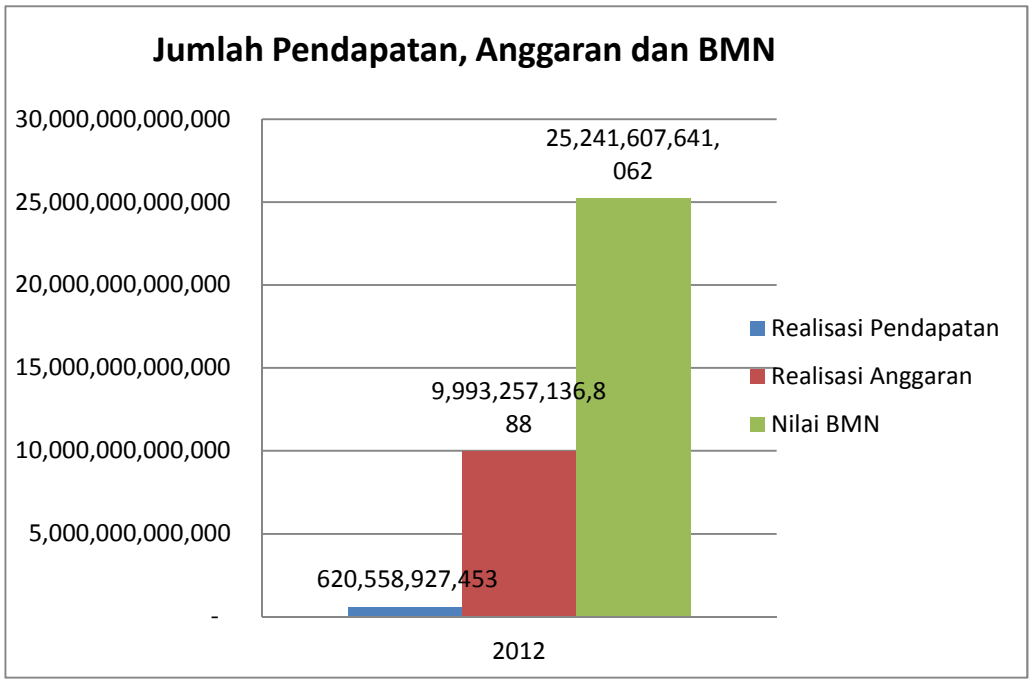

SASARAN STRATEGIS (8)

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

17. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A;

    Pada tahun 2012 diklat tenaga Marine Inspector A dilaksanakan 2 (dua) angkatan sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Marine Inspector A sebanyak 60 orang dan tercapai sebesar 100 % atau sebanyak 60 orang.

18. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B;

    Pada tahun 2012 diklat tenaga Marine Inspector B dilaksanakan 4 (empat) angkatan sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Marine Inspector B sebanyak 120 orang sehingga tingkat kecukupan Marine Inspector B sebesar 100 %.

19. Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS;

    Pada tahun 2012 penyelenggaraan diklat tenaga PPNS direncanakan 2 (dua) angkatan sebanyak 60 orang tetapi realisasi sebanyak 59 orang atau 98,33 % ,

20. Jumlah Tenaga PPNS;

Jumlah tenaga PPNS yang ada sampai tahun 2012 sebanyak 367 orang sesuai dengan jumlah tenaga PPNS yang dibutuhkan yaitu sebanyak 367 orang sehingga pencapaian tenaga PPNS sebesar 100 %.

21. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A;

Pada tahun 2012 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang sehingga tingkat kecukupan Kesyahbandaran A sudah mencapai 100 %.

22. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B;

Pada tahun 2011 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang sehingga tingkat kecukupan Kesyahbandaran B sudah mencapai 100 %.

23. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran;

Pada tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan diklat tenaga penanggulangan pencemaran karena alokasi anggaran penyelenggaraan diklat tersebut yamg semula terdapat pada DIPA Awal untuk 20 orang namun dengan adanya penghematan alokasi anggaran tersebut hilang. Adapun posisi tenaga penanggulangan pencemaran saat ini hanya sebanyak 438 orang.

24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;

Pada tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan diklat tenaga penanggulangan kebakaran karena alokasi anggaran penyelenggaraan diklat tersebut yamg semula terdapat pada DIPA Awal untuk 20 orang namun dengan adanya penghematan alokasi anggaran tersebut hilang. Adapun posisi tenaga penanggulangan kebakaran yang ada pada saat ini sebanyak 20 orang sedangkan kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 1.232 orang.

25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam;

Pada tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan diklat tenaga penyelam karena alokasi anggaran penyelenggaraan diklat tersebut yamg semula terdapat pada DIPA Awal untuk 20 orang namun dengan adanya penghematan alokasi anggaran tersebut hilang. Adapun posisi tenaga penyelam yang ada pada saat ini sebanyak 32 orang sedangkan kebutuhan tenaga penyelam sebanyak 1.232 orang.

26. Nilai LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Adapun hasil Evaluasi Penilaian LAKIP Ditjen Hubla Tahun 2012 yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sebesar 78,00 sedangkan pada tahun 2011 sebesar 76,94 sehingga terdapat kenaikan sebesar 1,06.

IX. SASARAN STRATEGIS (9)

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

27. Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Prosentase pencapaian pendapatan sebesar 187,21 % artinya dari target jumlah pendapatan sebesar Rp. 331.483.001.026 dapat tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. 620.558.927.453. Hal ini karena adanya peningkatan volume kunjungan kapal dan pembayaran piutang PT. Pelni, Pt. Pelindo dan PT. Pertamina.

28. Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Prosentase pencapaian realisasi belanja anggaran sebesar 86,52 % artinya dari target jumlah realisasi belanja anggaran sebesar Rp. 11.550.550.774.000 terdapat realisasi sebesar Rp. 9.993.257.136.888. Hal ini karena terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan kegiatan yang tidak diselesaikan karena adanya blokir anggaran.

29. Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Prosentase pencapaian nilai BMN sebesar 94,61 % artinya dari target jumlah nilai BMN sebesar Rp. 26.680.195.570.824 terdapat realisasi sebesar Rp.25.241.607.641.062. Hal ini karena terdapatnya selisih antara nilai pagu dan nilai kontrak yaitu nilai kontrak dibawah nilai pagu yang tersedia.

X. SASARAN STRATEGIS (10)

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

30. Jumlah penyelesaian regulasi

a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Pada tahun 2012 direncanakan akan menyelesaikan 5 (lima) RPP, namun karena adanya penghematan anggaran sehingga yang dapat diselesaikan hanya 1 (satu) RPP yaitu RPP Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

b. Rancangan Peraturan Menteri (RPM)

Pada tahun 2012 direncanakan akan menyelesaikan 10 (lima) RPM, namun karena adanya penghematan anggaran sehingga yang dapat diselesaikan hanya 8 (delapan) RPM yaitu RPM Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Adapun RPM yang dapat diselesaikan yaitu:

1) RPM tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Konsesi serta Kerjasama.
2) RPM tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.
3) RPM tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
4) RPM Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

5) RPM tentang Keagenan Awak Kapal.
6) RPM tengtang Kerangka Kapal, Salvage, Pekerjaan Bawah Air dan Penyelam.
7) RPM tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal dan Pengawasan Pembangunan Kapal.
8) RPM tentang Garis Muat dan Pemuatan Kapal.

c. Keputusan Dirjen

Pada tahun 2012 direncanakan akan menyelesaikan 2 (dua) Keputusan Dirjen Hubla dan dapat diselesaikan keseluruhan sehingga pencapaiannya sebesar 100 %.

Adapun Keputusan Dirjen yang dapat diselesaikan yaitu:

1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL-12 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pemberlakukan Standard dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor OT.003/1/4/DJPL-12 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pengukuhan Organisasi Kesyahbandaran Utama, Organisasi Otoritas Pelabuhan Utama dan Organisasi Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan.

3.2.1.6 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 6

Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

SASARAN (6) Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut serta Teknologi Transportasi Laut yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
SASARAN STRATEGIS (11) Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton	0,102 Mega Ton	20,59 %
SASARAN STRATEGIS (12) Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan	6 Pelabuhan	100 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat	972 Sertifikat	95,20 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat	1.332 Sertifikat	87,23 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat	107 Sertifikat	79,85 %

36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat	305 Sertifikat	124,49 %

XI. SASARAN STRATEGIS (11)

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

31. Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut;

Pada tahun 2012 Ditjen Hubla hanya mampu menurunkan emisi gas buang (CO2) dari kapal-kapal yang beroperasional sebesar 0,102 mega ton dari target penurunan sebesar 0,4853 mega ton sehingga penapaiannya hanya sebesar 20,59 %. Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain pengehematan penggunaan BBM dan penerbitan sertifikasi kapal melalui dikeluarkannya sertifikat International Air Pollution Prevencen (IAPP). Hal ini diatur dalam Konvensi MARPOL 73/78 Anex ke VI yang terkait dengan bahan bakar yang digunakan. Sertifikat IAPP merupakan sertifikat yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari operasional kapal.

Jumlah kepemikikan sertifikat IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2012 sebanyak 329 sertifikat dengan target sebanyak 10.208 kapal yang harus disertifikasi.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III-IV MARPOL dengan Perpres No. 29 Tahun 2012 Jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib). Pada saat ini telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Peraturan ini bertujuan agar kapal-kapal yang beroperasional di dalam negeri akan diwajibkan untuk memiliki sertifikat IAPP sehingga tidak bersifat voluntary tetapi akan mandatory.

Adapun perhitungan penurunan emisi sbb:

TABEL

Perhitungan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut

Tahun	Total GT Tiap Tahun	Total Emisi Karbon (Mega Ton)	Target Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun	Target Penurunan Emisi (Mega Ton)
2009	8,456,364.00	24.39	-	-
2010	10,347,436.00	27.80	-	•
2011	10,994,942.00	29.70	-	-
2012	11,654,639	32.36	1.5%	0.4853
2013	12,353,917	35.01	1.5%	0.5252
2014	13,095,152	37.67	1.5%	0.5650
2015	13,880,861	40.32	1.5%	0.6048
2016	14,713,713	42.98	1.5%	0.6446
2017	15,596,535	45.63	1.5%	0.6845
2018	16,532,327	48.29	1.5%	0.7243
2019	17,524,267	50.94	1.5%	0.7641
2020	18,575,723	53.60	1.5%	0.8039

Keterangan :

1) Total Gt Tiap Tahun Diperkirakan Naik 6 % Dari Tahun Sebelumnya;

2) Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun Diperkirakan 1,5 %;

3) Untuk Mendapatkan Total Emisi Karbon Tahun 2012 - 2020 =

   Total Emisi Karbon Tahun Sebelumnya + Rata-Rata Kenaikan Emisi Karbon Tahun 2009-2010-2011 (Sebesar : 2,655 Megaton)

4) Jumlah Sertifikat Iapp (Penceg Ah An Pencemaran Udara Dari Operasional Kapal)

   Yang Dikeluarkan Tahun 2012 Sebanyak = 320 Sertifikat

5) Asumsi Total Gt Kapal Yang Sudah Dikeluarkan Sertifikat IAPP :

   50 % → 10.000 Gt = 160 X 10.000 Gt = 1.600.000 Gt

   50 % → 5.000 Gt = 160 X S.000 Gt = 800.000 Gt }

   =2.400.000 Gt

6) Untuk Perhitungan Persentase Riil (Kenyataan) Penurunan Emisi Karbon Adalah :

Total Gt Tahun 2012 = 11.654.639
Total Gt Yang Sudah Disertifikasi Iapp = 2.400.000 }
= 21 %

Permasalahan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

1) Selama tahun 2012 pembahasan RPM Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal mengalami penundaan di Bagian Hukum Ditjen Hubla karena banyaknya agenda di Bagian Hukum, seperti pembahasan RPM dari Direktorat lain dan persiapan Indonesia menghadiri sidang Assembly di IMO.
2) Selama tahun 2012 pembahasan RPM Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal mengalami beberapa kali revisi terkait beberapa konvensi yang harus di update serta terkendala oleh banyaknya agenda pada Bagian Hukum Ditjen Hubla.
3) Pemahaman sistem manajemen keselamatan kapal di perusahaan dan kapal masih belum optimal karena kurangnya pemahaman ISM CODE oleh DPA Perusahaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

a. Telah ditetapkan PP nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim tanggal 1 Februari 2010;
b. Telah dilaksanakan pembahasan Draft RPM Pencegahan Pencemaran dengan Bagian Hukun Ditjen Hubla untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum Kemenhub;
c. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal telah ditetapkan Nomor KM 45 tahun 2012.
d. Ratifikasi MARPOL telah dilaksanakan Annex III s.d VI melalui Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2012.
e. Telah dilaksanakan Temu Teknis Kelaiklautan Kapal.
f. Telah dilaksanakan uji petik kelaiklautan kapal.

g. Telah dilaksanakan bimbingan teknis pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen pengoperasian kapal serta solsialisai ratifikasi Marpol di 3 kota yaitu Surabaya, Balikpapan dan Batam;

h. Pelaksanaan Workshop Manajemen Keselamatan Kapal.

i. Pengajuan usulan ratifikasi konvensi internasional tentang jaminan ganti rugi pencemaran akibat minyak bunker dan system anti teritip.

j. Pelaksanaan audit keselamatan kapal di beberapa lokasi pelabuhan Indonesia.

XII. SASARAN STRATEGIS (12)

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan);

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) yang pelaksanaanya dipantau oleh UKP4 (PROGRAM BN4P9). Dalam rangka implementasi program tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Hubla NO UM.003/21/6/DJPL-12 tentang Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

PROGRAM BN4P9 yaitu Pengelolaan Sampah Terpadu Pelabuhan Laut dengan target capaian tersusunnya dokumen evaluasi & laporan penerapan (Gerakan Nasional Bersih Negeriku) GNBN di lingkungan pelabuhan, khususnya di 6 pelabuhan strategis" yaitu Pelabuhan Tj. Priok, Tj. Perak, Belawan, Makassar, Panjang dan Jayapura.

33. Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention);

Tabel 3.10

Rekapitulasi Pengeluaran Sertifikat Tahun 2011 dan Tahun 2012

No	Jenis Sertifikat	Tahun 2011 (Sertifikat)	Tahun 2012 (Sertifikat)
1	IOPP	981	972
2	SNPP	1.389	1.332
3	CNC	395	284
4	NLS	104	107
5	CAS	12	42
6	IAPP	201	329
7	ISPP	223	305
8	SMC	413	632
9	DOC	114	204
	TOTAL	3.832	4.207

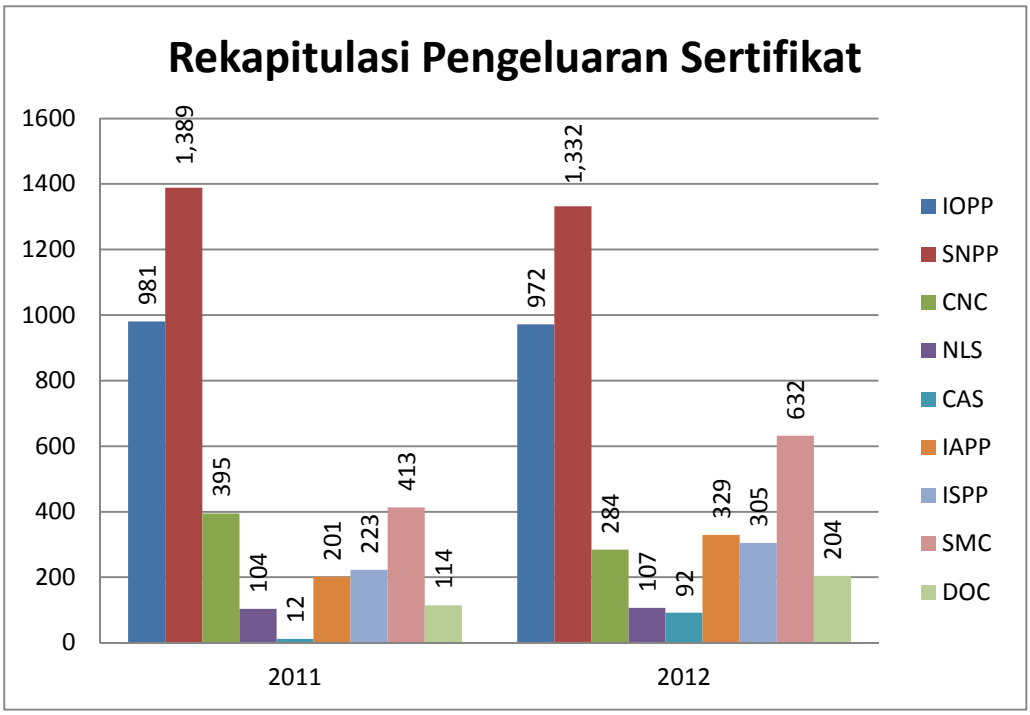

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat IOPP yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,17 % atau 9 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar 95,20 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 1.021 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan hanya sebesar 972 sertifikat.

Sertifikasi IOPP diwajibkan untuk Kapal tangki minyak dengan 150 GT lebih dan kapal bukan tangki minyak dengan GT lebih dari 400

Saat ini Indonesia sudah meratifikasi MARPOL Annex I dengan Kepres 46 tahun 1986

34. Jumlah Pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran);

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat SNPP yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,04 % atau 57 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar

87,23 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 1.527 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan hanya sebesar 1.332 sertifikat.

Sertifikat SNPP diwajibkan untuk kapal yang berlayar dalam negeri untuk kapal tangki minyak dibawah 150 GT dan untuk kapal bukan tangki minyak dengan ukuran dibawah 400 GT.

Saat ini Indonesia sudah meratifikasi MARPOL Annex I dengan Kepres 46 tahun 1986.

35. Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance)

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat NLS yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,03 % atau 3 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar 79,85 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 134 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan hanya sebesar 107 sertifikat.

Sertifikat NLS diwajibkan untuk kapal tangki kimia dengan semua ukuran. Saat ini Indonesia sudah meratifikasi MARPOL Annex I dengan Kepres 46 tahun 1986

36. Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat ISPP yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 36,77 % atau 82 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar 124,49 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 245 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan sebesar 305 sertifikat.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III –VI MARPOL dengan Perpres 46 tahun 2012 jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DITJEN HUBLA TAHUN 2012

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuranan tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada tahun 2012 Kementerian Perhubungan telah melakukan Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tk. Eselon I di lingkungan kementerian Perhubungan yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Perhungan Nomor PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2012 Peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementarian Perhubungan tanggal 28 Desember 2012.

Ditjen Hubla juga telah mereview RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan. Beberapa perubahan yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Hubla. RENSTRA

Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 direview setelah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Ditjen Hubla ditandatangani, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2012

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN (I) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	22 Kejadian Kecelakaan	66 Kejadian Kecelakaan	72,73 %
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat	9.298 Sertifikat	130,11 %
SASARAN (II) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				
SASARAN STRATEGIS (3) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	80 Rute Perintis	100,00 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan	386 Pelabuhan	98,22 %
SASARAN (III) Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut				

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS (4) Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional				
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang	6.061.571 Orang	120,56 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang	634.000 Orang	100,66 %
8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton	351.985.284 Ton	107,54 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %	98,90 %	100,05 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.500.000 Ton	59.851.000 Ton	100,59 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %	11,80 %	118,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS (5) Meningkatnya manfaat sub sektor transportasi laut terhadap EKONOMI melalui pengurangan biaya transportasi penumpang dan barang				
12	Penurunan turn-around time di pelabuhan yang diusahakan	30 menit	351 menit	*) Data TRT yg tersedia hanya pada 5 (lima) pelabuhan *) Data tahun 2012 Rata-rata TRT sebesar 87,94 Jam/Kapal
SASARAN STRATEGIS (6) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	15 Pelabuhan	31,25 %
SASARAN (IV) Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi				
SASARAN STRATEGIS (7) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2 - - -	2 - - -	100,00 % - - -

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN (V) Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi				
SASARAN STRATEGIS (8) Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
18	Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	59 Orang	98,33 %
20	Jumlah tenaga PPNS	367 Orang	367 Orang	100,00 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls A	60 Orang	60 Orang	100 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran Kls B	120 Orang	120 Orang	100 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
				ada karena penghematan
SASARAN STRATEGIS (9) Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00	78,00	100 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206	Rp. 620.558.927.453	187,21 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000	Rp. 9.993.257.136.888	86,52 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824	Rp. 25.241.607.641.062	94,61 %
SASARAN STRATEGIS (10) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi			
	- RPP	1	1	100 %
	- RPM	8	8	100 %
	- Keputusan Dirjen	2	2	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
SASARAN (6) Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
SASARAN STRATEGIS (11) Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton	0,102 Mega Ton	21,00 %
SASARAN STRATEGIS (12) Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan	6 Pelabuhan	100 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat	972 Sertifikat	95,20 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat	1.332 Sertifikat	87,23 %

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat	107 Sertifikat	79,85 %
36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat	305 Sertifikat	80,33 %

3.1.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Target Indikator Kinerja Utama Ditjen Hubla

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Ditjen Hubla tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.2.1 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1

"Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal"

SASARAN (I) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut				
1	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
2	Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	66 Kejadian Kecelakaan	72,73 %
SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
3	Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat	9.298 Sertifikat	130,11 %

I. SASARAN STRATEGIS (1)

Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia

Tabel diatas menunjukkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2012 pada Sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal". Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia mengalami penurunan sebesar 20,17 % kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 31 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 24 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia sebanyak 7 kejadian kecelakaan. Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja tahun 2012 diperhitungkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia sebanyak 31 kejadian kecelakaan sedangkan realisasi hanya sebanyak 24 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 129,17 %. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan pembinaan kepada para aparat Ditjen Hubla yang terkait serta kepada para pihak yang bertanggungjawab kepada kecelakaan kapal yaitu Nahkoda Kapal, Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran, Aparat Pengawas dan Penerbit Sertifikat.

a. Penanggung Jawab Dan Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kapal
    1. Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kecelakaan Kapal
        a. Nahkoda Kapal
        b. Pemilik Kapal/ Perusahaan Pelayaran
        c. Aparat Pengawas
        d. Penerbit Sertifikat

b. Kelembagaan

1. Peningkatan Fungsi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
2. Revitalisasi Peran Syahbandar/ADPEL/UPP
3. Pembentukan Lembaga Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan UU 17/2008
4. Pembentukan Lembaga Syahbandar sesuai dengan UU 17/2008
5. Pembentukan Lembaga Penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) sesuai dengan UU 17/2008
6. Peningkatan koordinasi pelaksanaan sistem informasi pelayaran dan meteorologi maritim
7. Melakukan restrukturisasi dan reformasi terhadap lembaga Klasifikasi Indonesia agar dapat berdiri sendiri sebagai lembaga non profit dan lebih independen dan profesional dalam rangka mendapat pengakuan di IACS
8. Peningkatan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran kapalrakyat dan kapal yang berukuran dibawah 7 GT.

c. Sumberdaya Manusia

1. Peningkatan Diklat Teknis Ahli Nautika Tingkat (ANT) I-IV, Ahli Teknik Tingkat (ATT) I-IV;
2. Peningkatan Diklat Teknis Marine Inspector
3. Peningkatan Diklat Teknis Pengukuran Kapal, Pendaftaran & Kebangsaaan Kapal;
4. Peningkatan Diklat Teknis Kepanduan;
5. Peningkatan Diklat Teknis Global Marine Distress Safety System (GMDSS), SBNP, dan Radar Simulator Arpha Simulator
6. Peningkatan Diklat Teknis Kesyahbandaran
7. Peningkatan Diklat Teknis KPLP

8. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISPS-Code, Port State Control Officer
9. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Basic Safety
10. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Advance Fire Fighting
11. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli ISM Code
12. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Ship Security Officer
13. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli VTS, Operator Basic and Advance, VTS Supervisor, VTS on-the-Job Training, VTS Instructor
14. Peningkatan Diklat Teknis Pengelola National Data Centre (NDC) Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)
15. Peningkatan Diklat Teknis Keselamatan Pelayaran Ahli Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat I-III

d. Operator
   1. Pelaporan pelaksanaan perawatan kapal secara berkala (Planned Maintenance System).
   2. Peningkatan pengetahuan operator melalui pelatihan pelatihan tentang keselamatan pelayaran Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

e. Masyarakat
   1. Meningkatkan Sosialisasi bidang keselamatan pelayaran dan sosialisasi tentang barang / bahan Berbahaya.
   2. Membuka kotak pengaduan (web site dan SMS) masyarakat, konsumen dan operator.
   3. Mengadakan program Gerakan Sadar Keselamatan Pelayaran secara Nasional setiap tahun khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang banyak melayani kapal-kapal penumpang dan kapal-kapal penyeberangan.

f. Penegakan Hukum

1. Peningkatan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal konvensi dan non konvensi di pelabuhan.
2. Peningkatan pemeriksaan kapal dalam penerbitan surat persetujuan berlayar.
3. Peningkatan pemeriksaan fasilitas pokok pelabuhan secara berkala.
4. Peningkatan pengawasan pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran sungai dan danau dan pengawasannya.
5. Peningkatan pengawasan terhadap telekomunikasi pelayaran.
6. Peningkatan pengawasan penyiaran berita marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda waktu standard.
7. Peningkatan pengawasan penyebarluasan berita tentang meteorologi di bidang maritim.
8. Peningkatan pengawasan terhadap bangunan atau instalasi di perairan serta zona keamanan dan keselamatan berlayar.
9. Peningkatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar, tata ruang perairan dan tata perairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.
10. Peningkatan pengawasan terhadap pemanduan di perairan wajib pandu dan pandu luar biasa.
11. Peningkatan pengawasan terhadap material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan, dan elektronika kapal penumpang dan barang baik untuk kapal konvensi maupun non konvensi.
12. Peningkatan pengawasan terhadap kelaikan kapal penangkap ikan.
13. Peningkatan pengawasan melekat dalam pemeriksaan, pengujian dan penilikan keselamatan kapal.

14. Peningkatan pengawasan terhadap pemeliharaan kapal secara berkala dan sewaktu-waktu.
15. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis perlengkapan navigasi atau elektronika kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
16. Peningkatan pengawasan terhadap standard dan persyaratan teknis peralatan meteorologi sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
17. Peningkatan pengawasan terhadap standar dan persyaratan kualifikasi dan kompetensi awak kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya.
18. Peningkatan pengawasan terhadap garis muat dan pemuatan kapal.
19. Peningkatan pengawasan manajemen keselamatan kapal.
20. Pembebasan tugas kepada petugas di lapangan yang melakukan kesalahan (Syahbandar dan Marine Inspector) .
21. Pemeriksaan khusus menyeluruh dengan melakukan Condition Assesment Survey (CAS) Terhadap Persyaratan Keselamatan bagi pengoperasian kapal Ferry Ro-Ro di dalam negeri yang telah berumur 25 tahun.
22. Memberikan sanksi tegas kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan, dan pencabutan ijin bagi operator yang tidak disiplin atau tidak memenuhi ke wajiban keselamatan transportasi laut.

2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain;

Terdapat beberapa penyebab kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain yaitu yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya muatan kapal yang jatuh dan mengakibatkan kecelakaan. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami peningkatan sebanyak 18 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 48 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66

kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla belum berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain.

Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja yaitu pada tahun 2012 diperhitungkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain sebanyak 48 kejadian kecelakaan namun tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain jauh di atas target yaitu sebanyak 66 kejadian kecelakaan sehingga prosentase pencapaian sebesar 72,73 %.

TABEL 3.2
Data Kecelakaan Kapal Tahun 2011 dan 2012

NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN	
		2011	2012
A	Jenis Kecelakaan		
1	Kapal Tenggelam	58 (33 %)	49
2	Kapal Terbakar	30 (17 %)	37
3	Kapal Tubrukan	14 (8 %)	20
4	Kapal Kandas	35 (19 %)	38
5	Kapal yg menyebabkan terancamnya Jiwa Manusia & Kerugian Harta Benda	41 (23 %)	24
	Jumlah	178	168
B	Korban & Kerugian		
1	Korban Jiwa (Meninggal, Hilang)	343	150
2	Kerugian Barang (Ton) (Kendaran, Hewan)		1643

NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	TAHUN	
		2011	2012
C	Bendera Kapal		
1	Berbendera Indonesia		189
2	Berbendera Asing		10
	Jumlah		199
D	Ukuran Kapal		
2	Kapal Gt < 7		13
3	Kapal Gt 7 - 35		28
4	Kapal Gt 35 - 500		68
5	Kapal Gt > 500		90
	Jumlah		199
E	Jenis Kapal		
1	Kapal Motor (Km)		117
2	Motor Tanker (Mt)		3
3	Kapal Tradisional / Klm		29
4	Kapaltug Boat (Tb)		23
5	Kapal Tongkang (Barge)		27
	Jumlah		199
F	Dugaan Faktor Penyebab		
1	Manusia	31 (17 %)	24
2	Alam	99 (56 %)	78
3	Teknis	48 (27 %)	66
	JUMLAH	178	168

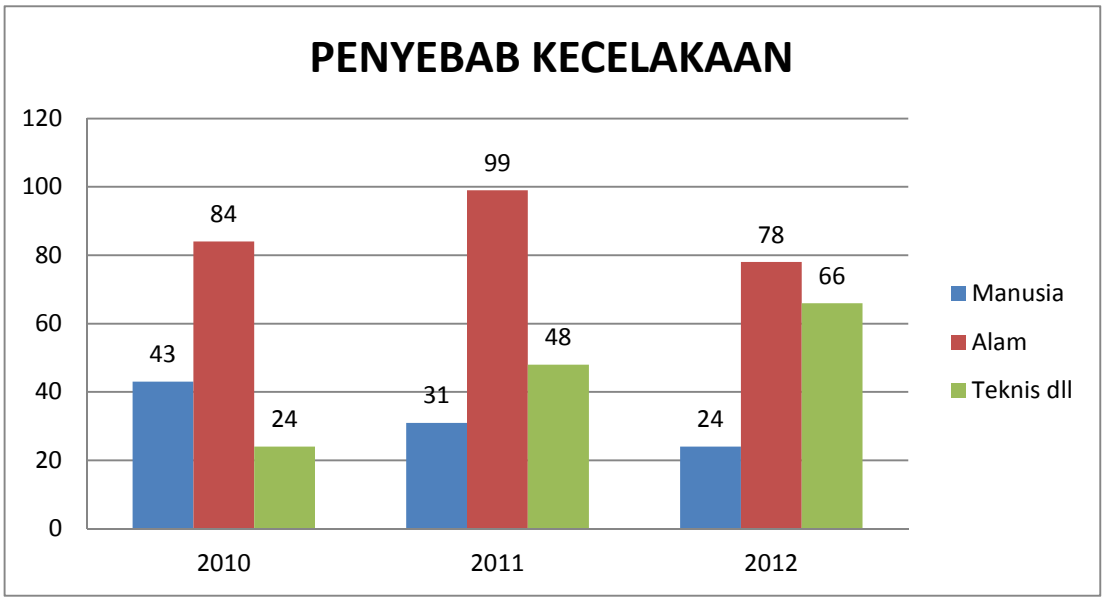

Ditjen Hubla telah berupaya untuk menurunkan kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain dengan berbagai kebijakan antara lain:

1. Upaya-upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal
   a. Penerapan peraturan perundang-undangan secara konsisten
   b. Pemeriksaan saat diberikan SPB/Port Clear (Fisik, Dokumen, Jumlah dan Ijasah ABK) Termasuk muatan dan Penumpang
   c. Patroli laut ditingkatkan (Pangkalan PLP dan Syahbandar)
   d. Pemantauan kapal melalui Radio Pantai. (Ship Reporting System)
2. Tindakan Preventif Kecelakaan Kapal
   a. Pemberitahuan Mapel Kepada Stakeholders Terkait.
   b. Peningkatan Patroli Laut.
   c. Diadakan Latihan-Latihan Diatas Kapal.
   d. Penyuluhan Keselamatan Pelayaran.
3. Tindakan Represif Kecelakaan Kapal
   a. Tindakan/ Hukuman Bagi Siapapun Penyebab Kecelakaan Kapal.
   b. Penundaan Kapal Yang Overdraft/Lebih Penumpang.
   c. Tindakan Keras Bagi Aparat Yang Tidak Disiplin.
   d. Mencabut SIUP Bagi Perusahaan Yang Tidak Disiplin.

4. Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal
   a. Pemeriksaan Administratif (sesuai checklist), pemeriksaan kelengkapan dan validitas sertifikat dan surat-surat kapal;
   b. Pemeriksan fisik diatas kapal (sesuai checklist), pemeriksaan kondisi NTR serta pemuatan dan stabilitas kapal
5. Prasarana
   1) Pembangunan SBNP
   2) Pembangunan Kapal Navigasi
   3) Pembangunan Telekomuniksi Keselamatan Pelayaran
   4) Pembangunan dan rehabilitasi Kapal patroli
   5) Pengadaan peralatan CCTV
   6) Pengerukan alur pelayaran
   7) Peningkatan Pembangunan Faspel dan Kespel di Daerah terisolasi Terpencil , Kawasan Tertinggal dan Pulau-Pulau Terluar
   8) Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Stasiun Radio Pantai
   9) Peningkatan Fasilitas Sarana Perangkatan dan Elektronika pada wilayah VTS
   10) Peningkatan Fasilitas LRIT
   11) Peningkatan Peralatan Komunikasi Marabahaya dan Keselamatan GMDSS dengan Menggunakan Jaringan Radio Teresterial Maupun Satelit
   12) Peningkatan Jumlah Dermaga Kapal Negara Kenavigasian Untuk Peningkatan Kesiagaan dan Mendukung Keandalan SBNP
   13) Peningkatan national data center (NDC) untuk LRIT

6. Sarana
   1) Pengawasan Pemeliharaan Kapal Secara Berkala dan Sewaktu-waktu
   2) Pengawasan dan Penyediaan Perlengkapan Navigasi Eletronika Kapal yang Memenuhi Persyaratan Sesuai dengan Jenis, Ukuran dan Daerah Pelayaran

3) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Manajemen Keselamatan Kapal oleh Pemilik/Operator Kapal (Document of Compliance dan Safety Management Certificate)
4) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Sarana Telekomunikasi Pelayaran
5) Peningkatan aksesibilitas melalui pelayanan pelayaran angkutan laut perintis secara nasional (61 trayek) dan pembangunan kapal-kapal perintis
6) Peningkatan Kuantitas Kehandalan dan Pengembangan Teknologi Kapal Negara (Patroli KPLP dan Kenavigasian)
7) Penataan Alur dan Lokasi Perairan, Implementasi VTS dan Perumusan dan Penetapan Ketentuan Terkait dengan Keselamatan Pelayaran Sehubungan dengan Kegiatan Lepas Pantai
8) Pengkajian Kelayakan dan Pengadaan Peralatan Pengamanan CCTV di Pelabuhan yang Terbuka bagi Pelayaran Luar Negeri dan Pelabuhan yang ditetapkan untuk melayani angkutan lebaran dan natal.
9) Melakukan Kajian mengenai Pro Totipe Kapal-Kapal yang Mengangkut Penumpang dan Barang yang Sesuai untuk wilayah-Wilayah Tertentu

7. Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

   Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP harus diperhatikan sesuai standard yang ditentukan dalam rangka menurunkan tingkat kejadian kecelakaan.

Tabel 3.3
Tingkat Kecukupan dan Keandalan SBNP Tahun 2010 s/d 2012

NO	URAIAN	TAHUN			PERTUMBUHAN	
		2010	2011	2012	2011	2012
1	Tingkat Kecukupan SBNP	62,64 %	63,51 %	66,13 %	0,87 %	2,62 %
2	Tingkat Keandalan SBNP	91,43	92,85 %	93,73 %	1,42 %	0,88 %

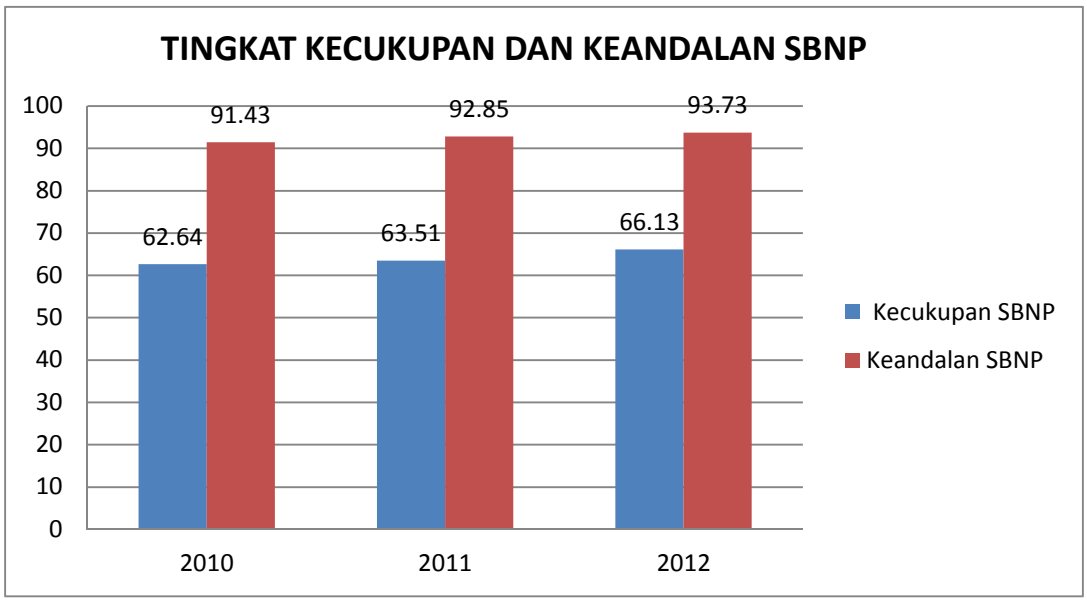

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kecukupan dan keandalan SBNP masih rendah dan berada di bawah standard yang ada, dimana untuk tingkat kecukupan diharapkan dapat berada di atas 70 % sedangkan untuk tingkat keandalan minimal 95 %. Dengan demikian pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk meningkatkan tingkat kecukupan sedangkan untuk meningkatkan tingkat keandalan dengan meningkatkan pemeliharaan SBNP serta pengawasan terhadap terjadinya kehilangan SBNP yang terpasang.

Pada tahun 2012 Tingkat Kecukupan SBNP sebesar 66,13 % sedangkan pada tahun 2011 sebesar 63,51 % artinya terjadi peningkatan sebesar 2,62 % hal in

karena terdapat beberapa pemasangan SBNP. Pada tahun 2012 Tingkat Keandalan SBNP sebesar 93,73 % sedangkan pada tahun 2011 sebesar 92,85 % artinya terjadi peningkatan sebesar 0,88 % hal in karena terdapat beberapa pemeliharaan SBNP. Adap rincian SBNP yang dimiliki Ditjen Hubla dan Non Ditjen Hubla adalah sebagai berikut:

Jumlah SBNP yang beroperasi terdiri dari milik Ditjen Hubla sebanyak 2.124 unit dan Non Ditjen Hubla sebanyak 1.192 unit.

Tabel 3.4
Jumlah SBNP yang Terpasang Tahun 2010 s/d 2012

NO	JENIS	DJPL	NON DJPL	JUMLAH (unit)
1.	Menara Suar	279	-	279
2.	Rambu Suar	1.313	714	2.027
3.	Pelampung Suar	372	504	876
4.	Rambu Tanda Siang	138	69	207
5.	Anak Pelampung	40	19	59
	T O T A L	2.142	1.306	3.448

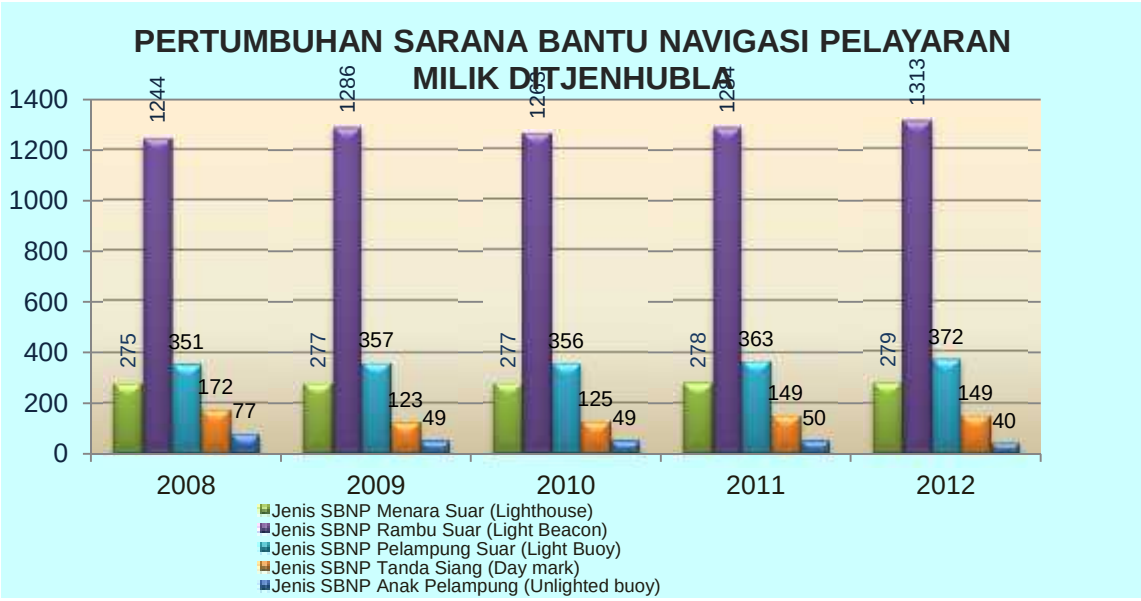

Tabel 3.5
Jumlah Kapal Negara Kenavigasian

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH (unit)
1	Kapal Buoy Tender (kapal induk perambuan)	8
2	Kapal Aids Tender (Kapal Bantu Perambuan)	42
3	Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat Perambuan)	14
	T O T A L	64

II. SASARAN STRATEGIS (2)

"Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)

1. Penerbitan Sertifikat Terkait Pencegahan Kecelakaan

Salah satu upaya pencegahan kecelakaan adalah dengan penerbitan beberapa sertifikat kapal. Perkembangan pemberian sertifikat kapal pada tahun 2012 baik jenis maupun jumlah pemberian sertifikat akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Penerbitan Sertifikat Kapal Tahun 2012

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH			KET.
		2010	2011	2012	
I.	Pengeluaran Sertifikat Kapal				
1	Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (SOLAS)	80	293	350	
	Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (NON SOLAS)	563	2.398	3.096	
2	Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (SOLAS)	76	276	336	
	Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (NON SOLAS)	306	1267	1687	
3	Keselamatan Radio Kapal Barang (SOLAS)	76	300	358	
	Keselamatan Radio Kapal Barang (NON SOLAS)	255	1389	1749	
4	Keselamatan Kapal Penumpang (SOLAS)	0	0	10	
	Keselamatan Kapal Penumpang (NON SOLAS)	10	54	58	
5	Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi (HSC)	11	299	299	
6	Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan	33	155	368	
7	Kelayakan Pengangkutan Bahan Kimia Berbahaya Secara Curah	28	112	142	
8	Kelayakan Pengangkutan Gas Cair Secara Curah	21	60	93	
9	Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Koda)	11	44	59	
	Persyaratan Pengangkutan Muatan Padat Secara Curah (Internasional)	0	16	53	
10	Dokumen Otorisasi	9	42	56	
11	Sertifikat Pembebasan	31	96	115	
12	Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya	95	343	464	
13	Kelayakan Untuk Kapal Yang Mengangkut Bahan Bakar Nuklir Beradiasi	0	2	5	
II.	Penerbitan Sertifikat Lambung Timbul Kapal				
1	Dalam Negeri	209	239		
2	Luar Negeri	36	62		
TOTAL		1.850	7.447	9.298	

Tingkat perkembangan pengeluaran setifikat Kepelautan tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995 akan diuraikan pada tabel berikut

Tabel 3.7
Perkembangan Penerbitan Sertifikat Kepelautan Tahun 2010 – 2012

NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012
I	Sertifikat Ahli Nautika			
1	ANT - I	511	418	454
2	ANT - II	1.311	1.001	867
3	ANT - III	1.175	1.047	1.015
4	ANT - IV	1.406	1.178	1.287
5	ANT - V	2.116	2.668	3.147
6	ANT - D	12.360	14.644	12.899
	TOTAL	18.879	20.956	19.669
II	Sertifikat Ahli Teknika			
1	ATT - I	416	367	390
2	ATT - II	1.103	788	628
3	ATT - III	1.125	1.040	1.070
4	ATT - IV	1.091	1.082	1.161
5	ATT - V	1.432	1.880	2.189
6	ATT - D	6.461	7.960	6.907
	TOTAL	11.628	13.117	12.345
III	Sertifikat Keahlian Kapal Ikan			
1	ANKAPIN I	150	116	137
2	ANKAPIN II	474	756	714
3	ANKAPIN III	1.417	1.018	1.064
	TOTAL	2.041	1.890	1.915
4	ATKAPIN I	147	67	89
5	ATKAPIN II	380	491	553
6	ATKAPIN III	697	252	314

NO	JENIS SERTIFIKAT	2010	2011	2012
	TOTAL	1.224	810	956
IV	Pengeluaran Buku Pelaut			
1	Penggantian	1.219	1.601	1.987
2	Buku Baru	3.871	5.529	5.864
3	Perpanjangan	3.552	3.217	4.500
V	Penyijilan Awak Kapal			
	PKL Asing	8.436	8.792	10.767
	PKL Nasional	598	978	3.325
VI	Pengukuhan Keahlian Teknika			
	ATT – I	263	616	728
	ATT – II	817	1.260	1.062
	ATT – III	519	2.499	2.839
	ATT - IV	1.150	1.900	2.328
	ATT - V	1.927	3.178	4.137
	TOTAL	4.676	9.453	11.094
VII	Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika			
	ANT – I	353	773	956
	ANT – II	886	1.513	1.299
	ANT – III	1.786	2.305	2.820
	ANT - IV	965	2.220	2.763
	ANT - V	1.665	4.189	5.290
	TOTAL	5.655	11.000	13.128

1) Sertifikat Ahli Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Sertifikat Ahli Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I s/d V mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Sertifikat Keahlian Kapal Ikan

Tingkat perkembangan pengeluaran Sertifikat Keahlian Kapal Ikan Tahun 2012 sesuai dengan penerapan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat ANKAPIN/ATKAPIN I s/d III mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4) Pengeluaran Buku Pelaut

Perkembangan pemberian Buku Pelaut. Jenis pengeluaran buku pelaut tahun 2012 untuk permintaan Buku Pelaut Baru, Penggantian Buku Pelaut dan perpanjangan buku pelaut ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

5) Penyijilan Awak Kapal

Tingkat perkembangan Penyijilan Awak Kapal pada tahun 2012. Jumlah Penyijilan Awak Kapal yang bekerja di kapal asing meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk kapal nasional juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya .

6) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Teknika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika sesuai STCW 1978 Amandemen 1995. Jumlah Pengukuhan Sertifikat Ahli Teknika I s/d V pada tahun 2012 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Pengukuhan Sertifikat Keahlian Nautika

Tingkat perkembangan pengeluaran Pengukuhan Sertifikat Ahli Nautika tahun 2012 sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 1995. Untuk tahun 2012 pengeluaran Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I s/d V mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1.2.2 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 2

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah"

SASARAN (2) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				
SASARAN STRATEGIS (3) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut				
4	Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	80 Rute Perintis	100 %
5	Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan	386 Pelabuhan	98,22 %

III. SASARAN STRATEGIS (3)

"Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut:

4. Jumlah Rute Perintis Yang Dilayani Transportasi Laut

Pencapaian indikator kinerja 4 yaitu "Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut " adalah sebesar 100 % dimana target dan realisasi jumlah rute perintis yang dilayani pada tahun 2012 sebesar 67 rute. Adapun rincian rute perintis dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Data Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal
Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2011 dan 2012

NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
1.	MEULABOH	R – 1	18	R – 1	18
2.	TELUK BAYUR	R – 2	20	R – 2	20
		R – 3	20	R – 3	20
3.	BENGKULU	R – 4	26	R – 4	26
4.	TG. PINANG	R – 5	33	R – 5	33
		R – 6	37	R – 6	37
5.	SINTETE	R – 7	28	R – 7	28
		R – 8	22	R – 8	22
6.	KOTABARU	R – 9	28	R – 9	28
7.	SUKAMARA	R – 10	33	R – 10	33
8.	SURABAYA	R – 11	26	R – 11	26
9.	TG. WANGI	R – 12	26	R – 12	26
10.	BIMA	R – 13	26	R – 13	26
		R – 14	21	R – 14	21
11.	KUPANG	R – 15	18	R – 15	24
				R – 68	11
				R – 69	10
		R – 16	22	R – 16	22
		R – 17	22	R – 17	22
		R – 18	20	R – 18	20

NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
12.	BITUNG	R – 19	20	R – 19	20
		R – 20	23	R – 20	23
13.	TAHUNA	R – 21	23	R – 21	23
		R – 22	22	R – 22	22
14.	PAGIMANA	R – 23	16	R – 23	16
15.	KOLONEDALE	R – 24	16	R – 24	16
16.	KENDARI	R – 25	22	R – 25	22
		R – 26	21	R – 26	21
17.	TILAMUTA	R – 27	17	R – 27	17
		R – 28	20	R – 28	20
28.	MAKASSAR	R – 29	23	R – 29	23
19.	MAMUJU	R – 30	19	R – 30	19
20.	AMBON	R – 32	18	R – 32	18
		R – 33	16	R – 33	18
				R – 70	9
				R – 71	9
				R – 72	9
		R – 34	14	R – 34	14
		R – 35	20	R – 35	20
		R – 36	23	R – 36	23
23.	TUAL	R – 36	17	R – 36	17
		R – 37	15	R – 37	15
				R – 73	14
				R – 74	17
24.	SAUMLAKI	R – 38	17	R – 38	17
		R – 39	17	R – 39	17
				R – 38	27
				R – 75	11
				R – 76	9
25.	TERNATE	R – 40	22	R – 40	22
		R – 41	18	R – 41	18
		R – 42	17	R – 42	17
				R – 77	11
26.	BABANG	R – 43	18	R – 43	18
27.	SANANA	R – 45	19	R – 45	19
		R – 46	24	R – 46	24
28.	JAYAPURA	R – 47	30	R – 47	30

NO.	PANGKALAN	TAHUN 2011		TAHUN 2012	
		KODE TRAYEK	VOYAGE	KODE TRAYEK	VOYAGE
		R – 48	34	R – 48	34
		R – 49	28	R – 49	28
		R – 50	28	R – 50	28
29.	BIAK	R – 51	24	R – 51	24
		R – 52	30	R – 52	30
		R – 53	25	R – 53	25
30.	MERAUKE	R – 54	21	R – 54	21
		R – 55	19	R – 55	24
				R – 78	13
		R – 56	22	R – 56	22
		R – 57	22	R – 57	22
		R – 58	15	R – 58	15
		R – 59	21	R – 59	21
31.	MANOKWARI	R – 60	23	R – 60	23
		R – 61	34	R – 61	34
		R – 62	26	R – 62	26
		R – 63	27	R – 63	27
32.	SORONG	R – 64	23	R – 64	23
		R – 65	23	R – 65	23
		R – 66	19	R – 66	19
		R – 67	26	R – 67	26
				R – 78	19
				R – 79	11
				R – 80	10

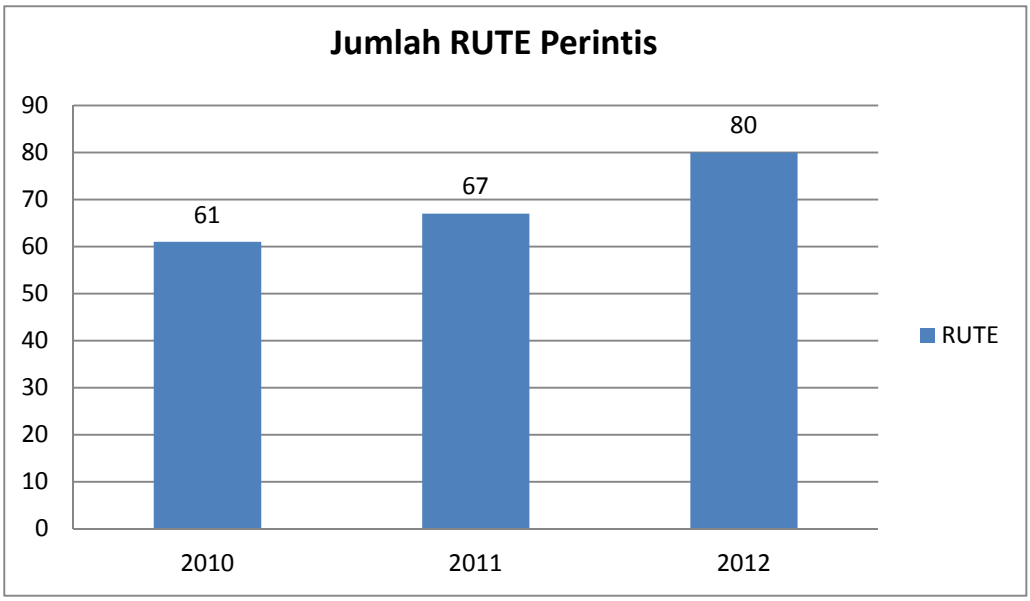

Dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil, belum berkembang dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka telah ditetapkan pada TA. 2012 Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis terapat 67 Rute yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.102/2/3/DJPL-11 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Aggaran 2012 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 21 November 2011.

Namun dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia Tahun 2012 maka diperlukan penambahan pelayanan jasa pelayaran perintis untuk daerah tertinggal dan atau wilayah terpencil serta perbatasan, maka terdapat penambahan rute peintis sebanyak 13 rute perintis atau menjadi 80 rut perintis yang ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.102/1/4/DJPL-12 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.102/2/3/DJPL-11 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Aggaran 2012 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 27 Juni 2012.

Jumlah wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang yang dilayani oleh kapal perintis diharapkan meningkat pada masa

yang akan datang, sehingga dapat membuka aksesibilitas daerah terisolir dan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah perbatasan. Sedangkan daerah terluar dan perbatasan yang merupakan beranda depan wilayah indonesia terhadap negara yang berbatasan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan keutuhan bangsa, ketahanan nasional serta meningkatkan potensi ekonomi pada wilayah tersebut.

5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut hanya sebesar 98, 22 % karena terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang tidak terlaksana, dimana dari target sebanyak 393 pelabuhan realisasi hanya sebesar 386 kegiatan.

3.2.1.3 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran III

"Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut"

SASARAN (III) Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Untuk Mengurangi Backlog Dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut				
SASARAN STRATEGIS (4) Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional				
6	Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang	6.061.571 Orang	120,56 %
7	Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang	634.000 Orang	100,66 %

8	Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton	351.985.224 Ton	107,54 %
9	Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %	98,90 %	100,05 %
10	Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.500.000 Ton	59.851.000 Ton	100,59 %
11	Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %	11,80 %	118,00 %
SASARAN STRATEGIS (5) Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang				
12	Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan	30 Menit	*)	*) Data TRT tahun 2011 tidak tersedia; *) Data tahun 2012 Rata-rata TRT sebesar 87,94 Jam/Kapal
SASARAN STRATEGIS (6) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
13	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %

14	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
15	Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	15 Pelabuhan	31,25 %

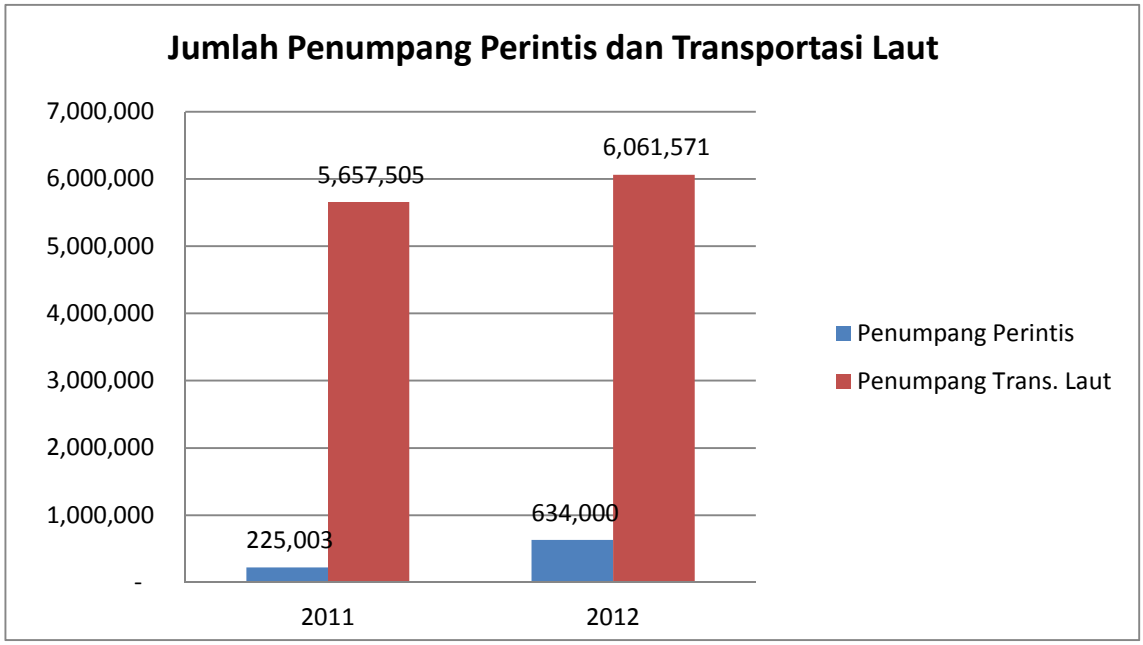

IV. SASARAN STRATEGIS (4)

"Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional"

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

6) Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 120,56 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 5.027.658 orang terdapat realisasi sebanyak 6.061.571 orang yang artinya terdapat peningkatan sebesar 1.033.913 orang.

Tabel 3.6
Perkembangan Angkutan Penumpang Transportasi Laut Tahun 2008 – 2012

NO	TAHUN	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)
1	2008	7.197.890
2	2009	7.664.753
3	2010	5.096.851
4	2011	5.657.505
5	2012	6.061.571

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah penumpang dalam negeri peningkatan sebesar 19,62 % atau sebanyak 994.066 orang.

7) Jumlah penumpang angkutan laut perintis;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,66 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 629.847 orang terdapat realisasi sebanyak 634.000 orang yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 4.153 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 225.033 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 634.000 orang artinya terdapat peningkatan sebesar 181,74 % atau sebanyak 408.967 orang.

8) Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang Diangkut Oleh Kapal Nasional

Tabel 3.7
Perkembangan Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Nasional & Asing)
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Nasional	Share (%)	Asing	Share (%)	Jumlah Muatan (Ton)
2008	192.763.874	79,40	50.126.180	20,6	242.890.054
Perkembangan	44.023.245	29,60	-29.088.178	-36,72	14.935.067
2009	258.359.686	90,2	28.007.688	9,8	286.367.374
Perkembangan	65.595.812	34,03	-22.118.492	-44,13	43.477.320
2010	303.119.578	98,10	5.870.818	1,9	308.990.396
Perkembangan	44.759.892	17,32	-22.136.870	-79,04	22.623.022
2011	316.489.377	98,82	3.779.169	1,18	320.268.546
Perkembangan	13.369.799	4,41	-2.091.649	-35,63	11.278.150
2012	351.985.284	98,90	3.914.901	1,10	355.900.125
Perkembangan	35.495.907	0,80	135.732	-0,08	35.631.579

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,66 % artinya dari target jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut sebanyak 629.847 orang terdapat realisasi sebanyak 634.000 orang yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 4.153 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah penumpang angkutan laut perintis yang terangkut sebanyak 225.033 orang dan pada tahun 2012 sebanyak

634.000 orang artinya terdapat peningkatan sebesar 181,74 % atau sebanyak 408.967 orang.

9) Prosentase Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,05 % artinya dari target pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut sebesar 98,85 % terdapat realisasi sebanyak 634.000 orang yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 98,82 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,82 % dan luar negeri sebesar 1,18 % dan pada tahun 2012 yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 98,90 % atau sebanyak 408.967 orang dan luar negeri sebesar 1,10 %.

Adapun Total muatan angkutan laut dalam negeri sebesar 355.900.125 ton dimana yang diangkut kapal nasional sebesar 351.985.284 atau 98,90 % sedangkan yang diangkut kapal asing sebesar 3.914.901 atau 1,10 % dari total muatan.

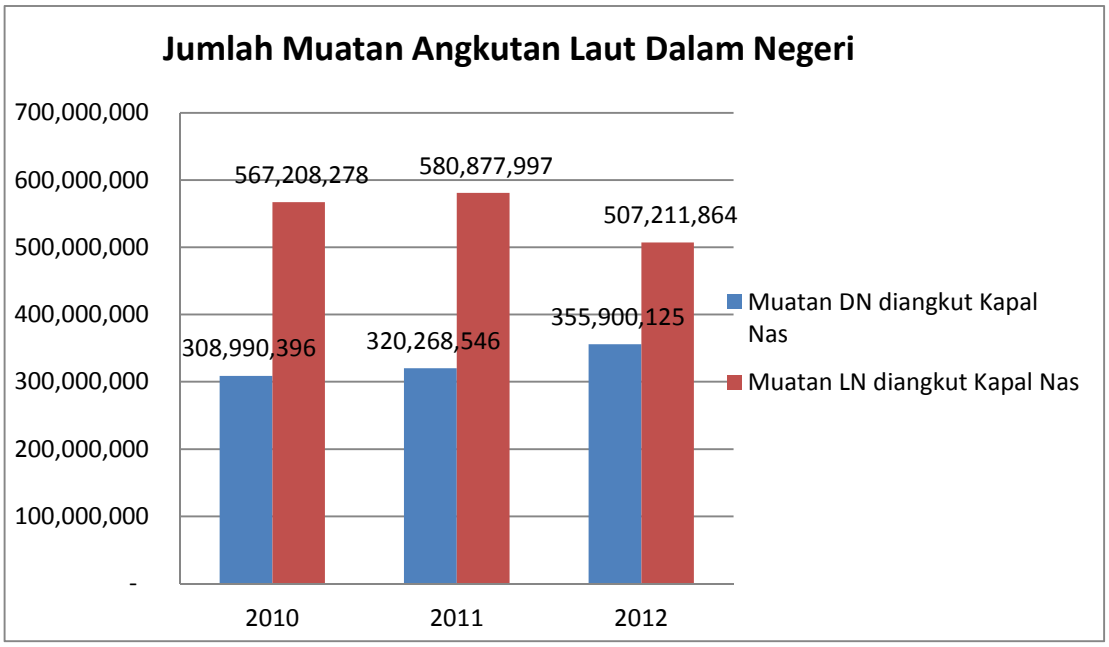

10) Jumlah Muatan Angkutan Laut Luar Negeri Yang Diangkut Oleh Kapal Nasional;

Tabel 3.8
Perkembangan Muatan Angkutan Laut Luar Negeri
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Nasional	Share (%)	Asing	Share (%)	Jumlah Muatan (Ton)
2008	38.196.693	7,12	498.273.709	92,88	536.470.402
Perkembangan	6.814.823	21,72	-2.240.516	-0,45	4.574.307
2009	49.293.953	8,95	501.661.150	91,05	550.955.103
Perkembangan	11.097.260	29,05	3.387.441	0,68	14.484.701
2010	51.162.187	9,02	516.046.091	90,98	567.208.278
Perkembangan	1.868.234	3,79	14.384.941	2,87	16.253.175
2011	55.183.410	9,50	525.694.587	90,50	580.877.997
Perkembangan	4.021.232	7,86	9.648.496	1,87	13.669.719
2012	59.851.000	11,80	447.360.864	88,20	507.211.864
Perkembangan	4.667.590	3,94	-78.333.723	-2,30	17.632.003

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 100,59 % artinya dari target jumlah muatan angkutan luar negeri yang terangkut sebanyak 59.500.000 ton terdapat realisasi sebanyak 59.851.000 yang artinya terdapat pencapaian di atas target sebesar 351.000 ton.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 jumlah muatan angkutan luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebanyak 55.183.410 ton dan pada tahun 2012

sebanyak 59.851.000 ton artinya terdapat peningkatan sebesar 3,94 % atau sebanyak 4.667.590 ton.

11) Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut sebesar 118,00 % artinya dari target pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut sebesar 10,00 % terdapat realisasi sebesar 11,80 %.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 9,50 % dan luar negeri sebesar 90,50 % dan pada tahun 2012 yang diangkut oleh kapal nasional sebesar 11,80 % atau sebanyak 59.851.000 ton dan luar negeri sebesar 88,20 % atau sebanyak 447.360.864 ton sehingga total muatan angkutan laut luar negeri pada tahun 2012 sebesar 507.211.864 ton.

V. SASARAN STRATEGIS (5)

Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap EKONOMI Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang Dan Barang

Sasaran strategis ini mempunyai Indiaktor Kinerja Utama sebagai berikut:

12) Penurunan Turn-Around Time (TRT) di pelabuhan yang diusahakan;

Pencapaian Penurunan Turn-Around Time (TRT) tahun 2012 belum dapat dievaluasi karena data TRT tahun 2011 tidak tersedia dan data TRT yang ada hanya data tahun 2012 pada beberapa pelabuhan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian TRT Tahun 2012

NO	NAMA PELABUHAN	TRT JAM / KAPAL
1	Belawan	105,40
2	Dumai	109,83
3	BICT	111,89
4	Lhokseumawe	69,95
5	Sibolga	63,65
6	Tanjung Pinang	66,90
	TOTAL RATA-RATA TRT 2012	87,94

VI. SASARAN STRATEGIS (6)

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indiaktor Kinerja Utama sebagai berikut:

13) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Tabel berikut adalah daftar pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Sesuai Dengan SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/38/18/DJPL-11

Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 75 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah dtetapkan hanya terdapat sebanyak 36 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8
Data Kinerja Operasional Pelabuhan Tahun 2012

NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah I Belawan Sumatera Utara				
1	Belawan	√	√	√
2	Lhokseumawe	√	√	
3	Dumai	√	√	√
4	Pekanbaru	√	√	
JUMLAH		4	4	2
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah II Tanjung Priok Jakarta				
1	Tanjung Priok	√	√	√
2	Bengkulu	√	√	√
3	Palembang	√	√	
4	Pangkal Balam	√	√	√
5	Tanjung Pandan	√	√	
6	Panjang	√	√	
7	Banten	√		√
8	Pontianak	√	√	
9	Teluk Bayur	√	√	
10	Jambi	√		
JUMLAH		10	8	4
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah III Tanjung Perak Surabaya				
1	Tanjung Perak	√	√	√
2	Tanjung Emas	√	√	√
3	Tanjung Intan	√		
4	Banjarmasin	√	√	
5	Gresik		√	

NO	NAMA PELABUHAN	WT	AT	ET:BT
6	Tangjung Wangi	√	√	√
7	Benoa	√	√	
8	Kupang		√	√
JUMLAH		6	7	4
Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah IV Makassar				
1	Makassar	√	√	√
2	Pare-Pare	√		
3	Balikpapan		√	
4	Tarakan		√	
5	Nunukan	√		
6	Bitung	√	√	
7	Manado	√	√	
8	Gorontalo	√	√	
9	Pantoloan	√	√	
10	Toli-Toli	√	√	
11	Kendari	√	√	
12	Ambon	√	√	
13	Ternate	√	√	√
14	Jayapura	√	√	
15	Biak	√	√	
16	Merauke	√	√	
17	Sorong		√	
18	Manokwari	√	√	√
19	Fak-Fak	√	√	√
JUMLAH		16	17	5

14) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan;

Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 75 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah dtetapkan hanya terdapat sebanyak 36 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

15) Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan

Pada tahun 2012 jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK. Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang telah ditetapkan adalah sebesar 31,25 % yang artinya dari 48 pelabuhan yang telah dtetapkan hanya terdapat sebanyak 15 pelabuhan yang telah mampu mencapai standard yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2012 data yang dimiliki hanya pada 48 pelabuhan strategis yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kinerja Pelayanan Kapal Tahun 2011 – 2012

NO	Pelabuhan	Standar Kinerja			2011			2012		
		WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)	WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)	WT Jam	AT Jam	ET:BT (%)
1.	Belawan	1	2	70	1,35	1,38	66,97	1,17	1,27	72,61
2.	Dumai	2	6	80	2,41	6,80	64,43	1,27	4,95	72,23
3.	Sibolga	1	1	70	00,00	00,0	8,00	0,00	0,00	9,70
4.	Lhok Seumawe	1	1	70	0,39	0	55,89	0,25	0,85	74,01
5.	Pekanbaru	2	12	70	1,00	0,93	8,00	0,22	8,17	49,40
6.	Tanjung Pinang	1	1	70	0,60	9,00	26,54	-	1,30	21,34
7.	Tg. Priok	1	2	80	0,82	1,48	81,34	0,75	1,00	87,18
8.	Panjang	1	1	80	0,45	1,22	62,26	0,44	0,59	62,25
9.	Palembang	1	6	80	0,09	0,60	51,56	0,13	6,25	51,40
10.	Teluk Bayur	1	1	70	0,07	7,20	54,57	0,23	0,63	54,62
11.	Pontianak	1	3	80	0,20	1,01	58,81	0,08	3,38	47,18
12.	Banten	1	1	80	1,00	2,50	76,41	1,00	1,10	83,72
13.	Tg. Perak	2	4	80	2,00	1,01	80,00	0,25	0,90	79,49
14.	Tg. Emas	1	1	80	1,00	4,00	65,00	0,28	0,59	68,37
15.	Banjarmasin	2	4	80	1,00	1,00	79,01	0,78	2,97	70,95
16.	Benoa	1	1	70	0,45	3,00	70,00	0,14	0,35	53,58
17.	Tenau/Kupang	2	1	80	1,30	1,00	65,00	-	0,23	47,71
18.	Tanjung Intan	2	2	80	0,45	1,00	55,00	0,00	3,02	60,67
19.	Makassar	1	1	80	0,57	2,00	80,70	0,54	1,58	80,72
20.	Balikpapan	1	2	80	0,50	1,67	76,47	1,43	1,63	76,72
21.	Samarinda	1	5	37	2,00	0,76	62,65	2,34	4,63	74,85
22.	Bitung	1	2	70	0,43	4,50	64,01	0,50	1,38	64,84
23.	Ambon	1	2	70	0,10	1,00	89,12	1,15	1,63	66,72
24.	Jayapura	1	12	70	1,00	0,50	66,67	0,50	0,68	63,72
25.	Sunda Kelapa	1	2	-	-	-	-	-	-	52,92
26.	Bengkulu	1	2	-	-	-	-	0,23	0,35	73,53
27.	Pangkal Balam	1	2	-	-	-	-	1,00	1,00	75,12
28.	Tg. Pandan	1	2	-	-	-	-	0,17	0,61	20,18
29.	Cirebon	1	2	-	-	-	-	-	1,59	45,12
30.	Jambi	1	2	-	-	-	-	0,43	28,35	38,67
31.	Gresik	1	2	-	-	-	-	1,50	1,13	59,75
32.	Tg. Wangi	1	2	-	-	-	-	0,77	0,75	89,98
33.	Kota Baru	1	2	-	-	-	-	-	-	-
34.	Sampit	1	2	-	-	-	-	-	-	-
35.	Gorontalo	1	2	70	0,54	1,58	70,72	0,54	1,58	70,72
36.	Pantoloan	1	2	70	0,18	1,86	69,49	0,16	1,58	69,49
37.	Manado	1	2	70	0,77	1,85	69,47	0,77	1,58	69,49
38.	Tolitoli	1	2	70	1,22	1,90	62,77	0,72	1,63	64,00
39.	Biak	1	2	70	0,96	1,81	61,77	0,47	1,54	63,00
40.	Nunukan	1	2	70	1,25	2,90	60,69	0,73	2,63	61,92
41.	Sorong	1	2	70	9,00	1,08	53,13	9,08	1,08	54,53
42.	Parepare	1	2	70	1,43	2,90	59,49	0,98	2,63	60,72
43.	Kendari	1	2	70	0,92	1,92	65,85	0,66	1,65	67,08
44.	Tarakan	1	2	70	1,75	2,00	48,38	1,58	2,00	38,82
45.	Merauke	1	2	70	0,79	1,78	51,18	0,87	1,82	51,18
46.	Manokwari	1	2	70	1,25	1,84	91,38	0,90	1,75	91,38
47.	Fakfak	1	2	70	1,09	1,71	75,48	0,90	1,92	73,72
48.	Ternate	1	2	70	1,01	1,05	74,02	0,95	0,68	80,47

Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV

3.2.1.4 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 4

"Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi"

S A S A R A N (I V) Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi				
SASARAN STRATEGIS (7) Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut				
16	Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	2 - - -	2 - - -	100,00 % - - -

VII. SASARAN STRATEGIS (7)

Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut

Pada tahun 2012 terdapat kerjasama yang sudah pada tahap pelelangan yaitu Tanah Ampo dan Alur pelayaran Barat Surabaya (APBS)

3.2.1.5 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 5

"Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi"

S A S A R A N (5) Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan Dan Reformasi Regulasi				
SASARAN STRATEGIS (8) Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut				
17	Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100 %
18	Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100 %
19	Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	59 Orang	98,33 %
20	Jumlah tenaga PPNS	367 Orang	367 Orang	100 %
21	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	60 Orang	60 Orang	100 %
22	Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	120 Orang	120 Orang	100 %
23	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
24	Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
25	Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

SASARAN STRATEGIS (9) Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut				
26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00	78,00	100 %
27	Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206	Rp. 620.558.927.453	187,21 %
28	Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000	Rp. 9.993.257.136.888	86,52 %
29	Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824	Rp. 25.241.607.641.062	94,61 %
SASARAN STRATEGIS (10) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut				
30	Jumlah penyelesaian regulasi - RPP - RPM - Keputusan Dirjen	 1 8 2	 1 8 2	 100 % 100 % 100 %

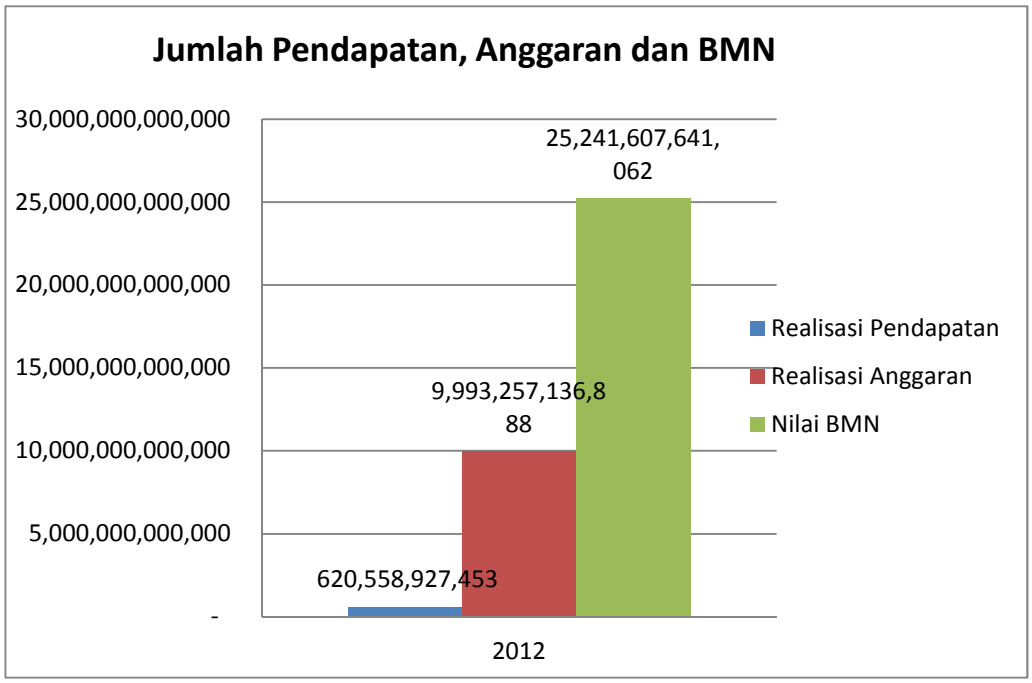

SASARAN STRATEGIS (8)

Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

17. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector A;

    Pada tahun 2012 diklat tenaga Marine Inspector A dilaksanakan 2 (dua) angkatan sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Marine Inspector A sebanyak 60 orang dan tercapai sebesar 100 % atau sebanyak 60 orang.

18. Jumlah Kebutuhan Tenaga Marine Inspector B;

    Pada tahun 2012 diklat tenaga Marine Inspector B dilaksanakan 4 (empat) angkatan sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Marine Inspector B sebanyak 120 orang sehingga tingkat kecukupan Marine Inspector B sebesar 100 %.

19. Jumlah Kebutuhan Tenaga PPNS;

    Pada tahun 2012 penyelenggaraan diklat tenaga PPNS direncanakan 2 (dua) angkatan sebanyak 60 orang tetapi realisasi sebanyak 59 orang atau 98,33 % ,

20. Jumlah Tenaga PPNS;

Jumlah tenaga PPNS yang ada sampai tahun 2012 sebanyak 367 orang sesuai dengan jumlah tenaga PPNS yang dibutuhkan yaitu sebanyak 367 orang sehingga pencapaian tenaga PPNS sebesar 100 %.

21. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas A;

Pada tahun 2012 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran A sebanyak 60 orang sehingga tingkat kecukupan Kesyahbandaran A sudah mencapai 100 %.

22. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesyahbandaran Kelas B;

Pada tahun 2011 jumlah SDM yang mengikuti diklat tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang, dimana kebutuhan tenaga Kesyahbandaran B sebanyak 120 orang sehingga tingkat kecukupan Kesyahbandaran B sudah mencapai 100 %.

23. Jumlah Kebutuhan Tenaga Penanggulangan Pencemaran;

Pada tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan diklat tenaga penanggulangan pencemaran karena alokasi anggaran penyelenggaraan diklat tersebut yamg semula terdapat pada DIPA Awal untuk 20 orang namun dengan adanya penghematan alokasi anggaran tersebut hilang. Adapun posisi tenaga penanggulangan pencemaran saat ini hanya sebanyak 438 orang.

24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran;

Pada tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan diklat tenaga penanggulangan kebakaran karena alokasi anggaran penyelenggaraan diklat tersebut yamg semula terdapat pada DIPA Awal untuk 20 orang namun dengan adanya penghematan alokasi anggaran tersebut hilang. Adapun posisi tenaga penanggulangan kebakaran yang ada pada saat ini sebanyak 20 orang sedangkan kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran sebanyak 1.232 orang.

25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam;

Pada tahun 2012 tidak terdapat penyelenggaraan diklat tenaga penyelam karena alokasi anggaran penyelenggaraan diklat tersebut yamg semula terdapat pada DIPA Awal untuk 20 orang namun dengan adanya penghematan alokasi anggaran tersebut hilang. Adapun posisi tenaga penyelam yang ada pada saat ini sebanyak 32 orang sedangkan kebutuhan tenaga penyelam sebanyak 1.232 orang.

26. Nilai LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Adapun hasil Evaluasi Penilaian LAKIP Ditjen Hubla Tahun 2012 yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sebesar 78,00 sedangkan pada tahun 2011 sebesar 76,94 sehingga terdapat kenaikan sebesar 1,06.

IX. SASARAN STRATEGIS (9)

Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

27. Jumlah Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Prosentase pencapaian pendapatan sebesar 187,21 % artinya dari target jumlah pendapatan sebesar Rp. 331.483.001.026 dapat tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. 620.558.927.453. Hal ini karena adanya peningkatan volume kunjungan kapal dan pembayaran piutang PT. Pelni, Pt. Pelindo dan PT. Pertamina.

28. Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Prosentase pencapaian realisasi belanja anggaran sebesar 86,52 % artinya dari target jumlah realisasi belanja anggaran sebesar Rp. 11.550.550.774.000 terdapat realisasi sebesar Rp. 9.993.257.136.888. Hal ini karena terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan kegiatan yang tidak diselesaikan karena adanya blokir anggaran.

29. Nilai BMN pada Neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Prosentase pencapaian nilai BMN sebesar 94,61 % artinya dari target jumlah nilai BMN sebesar Rp. 26.680.195.570.824 terdapat realisasi sebesar Rp.25.241.607.641.062. Hal ini karena terdapatnya selisih antara nilai pagu dan nilai kontrak yaitu nilai kontrak dibawah nilai pagu yang tersedia.

X. SASARAN STRATEGIS (10)

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut

Sasaran Strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

30. Jumlah penyelesaian regulasi

a. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

Pada tahun 2012 direncanakan akan menyelesaikan 5 (lima) RPP, namun karena adanya penghematan anggaran sehingga yang dapat diselesaikan hanya 1 (satu) RPP yaitu RPP Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

b. Rancangan Peraturan Menteri (RPM)

Pada tahun 2012 direncanakan akan menyelesaikan 10 (lima) RPM, namun karena adanya penghematan anggaran sehingga yang dapat diselesaikan hanya 8 (delapan) RPM yaitu RPM Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).

Adapun RPM yang dapat diselesaikan yaitu:

1) RPM tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Konsesi serta Kerjasama.
2) RPM tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.
3) RPM tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
4) RPM Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan

5) RPM tentang Keagenan Awak Kapal.
6) RPM tengtang Kerangka Kapal, Salvage, Pekerjaan Bawah Air dan Penyelam.
7) RPM tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal dan Pengawasan Pembangunan Kapal.
8) RPM tentang Garis Muat dan Pemuatan Kapal.

c. Keputusan Dirjen

Pada tahun 2012 direncanakan akan menyelesaikan 2 (dua) Keputusan Dirjen Hubla dan dapat diselesaikan keseluruhan sehingga pencapaiannya sebesar 100 %.

Adapun Keputusan Dirjen yang dapat diselesaikan yaitu:

1) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL-12 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pemberlakukan Standard dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia;
2) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor OT.003/1/4/DJPL-12 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Pengukuhan Organisasi Kesyahbandaran Utama, Organisasi Otoritas Pelabuhan Utama dan Organisasi Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan.

3.2.1.6 Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran 6

Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Transportasi Laut Serta Teknologi Transportasi Laut Yang Efisien, Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim

SASARAN (6) Peningkatan Kualitas Penelitian Dan Pengembangan di Bidang Transportasi Laut serta Teknologi Transportasi Laut yang Efisien dan Ramah Lingkungan Sebagai Antisipasi Terhadap Perubahan Iklim				
SASARAN STRATEGIS (11) Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang				
31	Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton	0,102 Mega Ton	20,59 %
SASARAN STRATEGIS (12) Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut				
32	Jumlah pelabuhan yang menerapkan eco-port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan	6 Pelabuhan	100 %
33	Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat	972 Sertifikat	95,20 %
34	Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat	1.332 Sertifikat	87,23 %
35	Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat	107 Sertifikat	79,85 %

36	Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat	305 Sertifikat	124,49 %

XI. SASARAN STRATEGIS (11)

Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

31. Jumlah Penurunan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut;

Pada tahun 2012 Ditjen Hubla hanya mampu menurunkan emisi gas buang (CO2) dari kapal-kapal yang beroperasional sebesar 0,102 mega ton dari target penurunan sebesar 0,4853 mega ton sehingga penapaiannya hanya sebesar 20,59 %. Penurunan ini diperoleh dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain pengehematan penggunaan BBM dan penerbitan sertifikasi kapal melalui dikeluarkannya sertifikat International Air Pollution Prevencen (IAPP). Hal ini diatur dalam Konvensi MARPOL 73/78 Anex ke VI yang terkait dengan bahan bakar yang digunakan. Sertifikat IAPP merupakan sertifikat yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari operasional kapal.

Jumlah kepemikikan sertifikat IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2012 sebanyak 329 sertifikat dengan target sebanyak 10.208 kapal yang harus disertifikasi.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III-IV MARPOL dengan Perpres No. 29 Tahun 2012 Jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib). Pada saat ini telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Peraturan ini bertujuan agar kapal-kapal yang beroperasional di dalam negeri akan diwajibkan untuk memiliki sertifikat IAPP sehingga tidak bersifat voluntary tetapi akan mandatory.

Adapun perhitungan penurunan emisi sbb:

TABEL

Perhitungan Emisi Gas Buang (CO2) Transportasi Laut

Tahun	Total GT Tiap Tahun	Total Emisi Karbon (Mega Ton)	Target Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun	Target Penurunan Emisi (Mega Ton)
2009	8,456,364.00	24.39	-	-
2010	10,347,436.00	27.80	-	•
2011	10,994,942.00	29.70	-	-
2012	11,654,639	32.36	1.5%	0.4853
2013	12,353,917	35.01	1.5%	0.5252
2014	13,095,152	37.67	1.5%	0.5650
2015	13,880,861	40.32	1.5%	0.6048
2016	14,713,713	42.98	1.5%	0.6446
2017	15,596,535	45.63	1.5%	0.6845
2018	16,532,327	48.29	1.5%	0.7243
2019	17,524,267	50.94	1.5%	0.7641
2020	18,575,723	53.60	1.5%	0.8039

Keterangan :

1) Total Gt Tiap Tahun Diperkirakan Naik 6 % Dari Tahun Sebelumnya;

2) Pengurangan Emisi Karbon Tiap Tahun Diperkirakan 1,5 %;

3) Untuk Mendapatkan Total Emisi Karbon Tahun 2012 - 2020 =

   Total Emisi Karbon Tahun Sebelumnya + Rata-Rata Kenaikan Emisi Karbon Tahun 2009-2010-2011 (Sebesar : 2,655 Megaton)

4) Jumlah Sertifikat Iapp (Penceg Ah An Pencemaran Udara Dari Operasional Kapal)

   Yang Dikeluarkan Tahun 2012 Sebanyak = 320 Sertifikat

5) Asumsi Total Gt Kapal Yang Sudah Dikeluarkan Sertifikat IAPP :

   50 % → 10.000 Gt = 160 X 10.000 Gt = 1.600.000 Gt

   50 % → 5.000 Gt = 160 X S.000 Gt = 800.000 Gt }

   =2.400.000 Gt

6) Untuk Perhitungan Persentase Riil (Kenyataan) Penurunan Emisi Karbon Adalah :

Total Gt Tahun 2012 = 11.654.639
Total Gt Yang Sudah Disertifikasi Iapp = 2.400.000 }
= 21 %

Permasalahan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

1) Selama tahun 2012 pembahasan RPM Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal mengalami penundaan di Bagian Hukum Ditjen Hubla karena banyaknya agenda di Bagian Hukum, seperti pembahasan RPM dari Direktorat lain dan persiapan Indonesia menghadiri sidang Assembly di IMO.
2) Selama tahun 2012 pembahasan RPM Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal mengalami beberapa kali revisi terkait beberapa konvensi yang harus di update serta terkendala oleh banyaknya agenda pada Bagian Hukum Ditjen Hubla.
3) Pemahaman sistem manajemen keselamatan kapal di perusahaan dan kapal masih belum optimal karena kurangnya pemahaman ISM CODE oleh DPA Perusahaan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait Pencegahan Pencemaran yaitu:

a. Telah ditetapkan PP nomor 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim tanggal 1 Februari 2010;
b. Telah dilaksanakan pembahasan Draft RPM Pencegahan Pencemaran dengan Bagian Hukun Ditjen Hubla untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum Kemenhub;
c. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal telah ditetapkan Nomor KM 45 tahun 2012.
d. Ratifikasi MARPOL telah dilaksanakan Annex III s.d VI melalui Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2012.
e. Telah dilaksanakan Temu Teknis Kelaiklautan Kapal.
f. Telah dilaksanakan uji petik kelaiklautan kapal.

g. Telah dilaksanakan bimbingan teknis pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen pengoperasian kapal serta solsialisai ratifikasi Marpol di 3 kota yaitu Surabaya, Balikpapan dan Batam;

h. Pelaksanaan Workshop Manajemen Keselamatan Kapal.

i. Pengajuan usulan ratifikasi konvensi internasional tentang jaminan ganti rugi pencemaran akibat minyak bunker dan system anti teritip.

j. Pelaksanaan audit keselamatan kapal di beberapa lokasi pelabuhan Indonesia.

XII. SASARAN STRATEGIS (12)

Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut

Sasaran strategis ini mempunyai Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (Penanganan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Pelabuhan);

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan Program Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) yang pelaksanaanya dipantau oleh UKP4 (PROGRAM BN4P9). Dalam rangka implementasi program tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Hubla NO UM.003/21/6/DJPL-12 tentang Gerakan Indonesia Bersih, Asri, Indah (Berseri) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

PROGRAM BN4P9 yaitu Pengelolaan Sampah Terpadu Pelabuhan Laut dengan target capaian tersusunnya dokumen evaluasi & laporan penerapan (Gerakan Nasional Bersih Negeriku) GNBN di lingkungan pelabuhan, khususnya di 6 pelabuhan strategis" yaitu Pelabuhan Tj. Priok, Tj. Perak, Belawan, Makassar, Panjang dan Jayapura.

33. Jumlah Pemilikan Sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention);

Tabel 3.10

Rekapitulasi Pengeluaran Sertifikat Tahun 2011 dan Tahun 2012

No	Jenis Sertifikat	Tahun 2011 (Sertifikat)	Tahun 2012 (Sertifikat)
1	IOPP	981	972
2	SNPP	1.389	1.332
3	CNC	395	284
4	NLS	104	107
5	CAS	12	42
6	IAPP	201	329
7	ISPP	223	305
8	SMC	413	632
9	DOC	114	204
	TOTAL	3.832	4.207

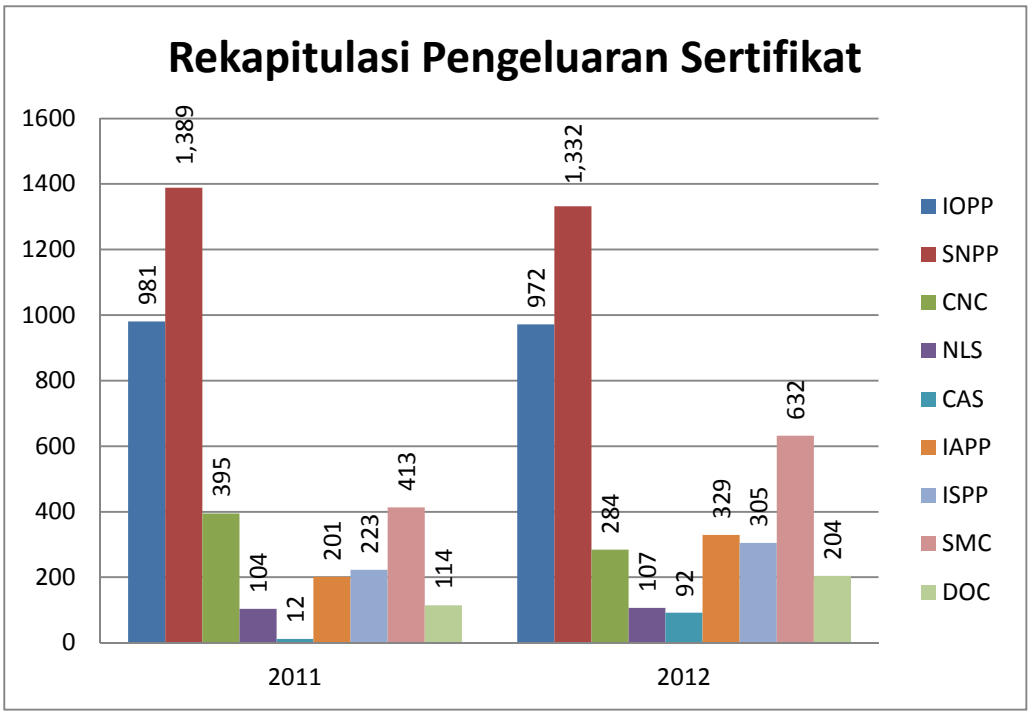

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat IOPP yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,17 % atau 9 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar 95,20 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 1.021 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan hanya sebesar 972 sertifikat.

Sertifikasi IOPP diwajibkan untuk Kapal tangki minyak dengan 150 GT lebih dan kapal bukan tangki minyak dengan GT lebih dari 400

Saat ini Indonesia sudah meratifikasi MARPOL Annex I dengan Kepres 46 tahun 1986

34. Jumlah Pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran);

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat SNPP yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,04 % atau 57 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar

87,23 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 1.527 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan hanya sebesar 1.332 sertifikat.

Sertifikat SNPP diwajibkan untuk kapal yang berlayar dalam negeri untuk kapal tangki minyak dibawah 150 GT dan untuk kapal bukan tangki minyak dengan ukuran dibawah 400 GT.

Saat ini Indonesia sudah meratifikasi MARPOL Annex I dengan Kepres 46 tahun 1986.

35. Jumlah Pemilikan Sertifikat Bahan Cair Beracun (Noxius Liquid Substance)

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat NLS yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 0,03 % atau 3 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar 79,85 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 134 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan hanya sebesar 107 sertifikat.

Sertifikat NLS diwajibkan untuk kapal tangki kimia dengan semua ukuran. Saat ini Indonesia sudah meratifikasi MARPOL Annex I dengan Kepres 46 tahun 1986

36. Jumlah Pemilikan Sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)

Pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah sertifikat ISPP yang dikeluarkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 36,77 % atau 82 sertifikat apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012 maka prosentase pencapaian sebesar 124,49 % artinya dari target yang ditetapkan sebesar 245 sertifikat maka realisasi sertifikat yang diterbitkan sebesar 305 sertifikat.

Saat ini Indonesia baru meratifikasi Annex III –VI MARPOL dengan Perpres 46 tahun 2012 jadi sertifikasi pada awalnya masih bersifat voluntary (belum mandatory/wajib)

BAB IV
P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mencapai beberapa keberhasilan pada tahun 2012, antara lain turunnya jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia dan meningkatnya jumlah dan share muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketidakberhasilan.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2012 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Kementerian Perhubungan secara umum dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya. Selain itu, dukungan kemampuan SDM yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2012 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

a. Jumlah Kejadian Kecelakaan

Faktor penyebab kejadian kecelakaan yang paling dominan adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alam dan teknis. Adapun jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 11 kejadian kecelakaan dimana pada tahun

2011 terdapat 31 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 24 kejadian kecelakaan. Sedangkan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain mengalami peningkatan. Adapun beberapa penyebab kecelakaan oleh teknis dan lain-lain adalah kejadian yang disebabkan oleh mesin kapal, kapal tubrukan dan oleh adanya muatan kapal yang jatuh yang mengakibatkan kecelakaan.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 18 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 48 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66 kejadian kecelakaan. Dengan demikian Ditjen Hubla belum berhasil menurunkan tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain. Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja tahun 2012 pencapaiannya sebesar 72,73 % dimana tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain sebanyak 48 kejadian kecelakaan namun realisasi di atas target yang diperhitungkan yaitu sebanyak 66 kejadian kecelakaan, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih mempunyai kinerja yang kurang baik.

Ditjen Hubla telah mengambil kebijakan dengan meningkatkan pengawasan dan menyampaikan kepada para penanggungjawab keselamatan pelayaran di pelabuhan untuk segera mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia. Sedangkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dengan menata penempatan atau pengoperasian kapal sesuai dengan kondisi perairan serta mengevaluasi banyaknya kapak-kapal yang sudah berumur tua serta meningkatkan dan menata jadwal pemeliharaan atau docking kapal.

b. Pelayanan Kinerja Operasional di Pelabuhan

Terdapat beberapa pelabuhan komersial yang telah mencapai Waiting Time (WT), Approach Time (AT) dan Waktu Efektif diatas standard kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut Ditjen Hubla sebagai regulator akan berkoordinasi dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan komersial (operator) untuk meningkatkan kinerjanya dimana salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana operasional di pelabuhan.

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengambil beberapa kebijakan dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pelindo untuk pelabuhan-pelabuhan yang komersial. Ditjen Hubla juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Hubla No. UM.002/38/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Selanjutnya akan dilaksanakan monitoring terhadap pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan pada SK Dirjen dimaksud.

c. Penurunan Emisi Gas Buang (CO2)

Ditjen Hubla belum mampu menurunkan Emisi Gas Buang (CO2) sesuai taget yang telah ditetapkan. Hal ini karena jumlah kapal yang sudah memiliki sertifikat IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2012 masih terbatas yaitu sebesar 3,22 %. Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kapal yang memiliki sertifikat IAPP adalah telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Peraturan ini bertujuan agar kapal-kapal yang beroperasional di dalam negeri akan diwajibkan (mandatory) untuk memiliki sertifikat IAPP sehingga tidak bersifat voluntary (tidak wajib)

d. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih memiliki keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim baik kwalitas maupun kwantitas. Adapun beberapa tenaga yang masih sangat diperlukan antara lain tenaga Marine Inspector, penyelam, tenaga penanggulangan pencemaran dan tenaga penangulangan kebakaran. Utuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut telah dialokasikan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat namun dengan adanya penghematan maka alokasi anggaran menjadi tidak ada.

4.2 Langkah ke depan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari jajaran seluruh unit kerja yang ada. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan atau untuk mewujudkan Zero Accident, Ditjen Hubla telah menyusun Road Map to Zero Accident. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
   a. Regulasi
   b. Kelembagaan
   c. Prasarana
   d. Sarana
   e. Sumberdaya Manusia
   f. Operator
   g. Masyarakat
   h. Penegakan Hukum

2. Untuk meningkatkan pelayanan kinerja operasional di pelabuhan maka telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Dirjen No : UM.002/38/18/DJPL-11 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Standar kinerja pelayanan digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan.

3. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terutama untuk tenaga penanggulangan pencemaran, kebakaran dan penyelam maka perlu diprioritaskan pelaksanaan diklat pada tahun selanjutnya. Dan diharapkan dapat dilakukan koordinasi yang intensif dengan BPSDM Kementerian Perhubungan agar dapat terpenuhi kebutuhan SDM baik kwalitas maupun kwantitas.

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala akan menjadi prioritas pada tahun yang akan datang.

5. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan diklat dan pembinaan kepada aparat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait keselamatan pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim serta kompetensi lain yang dapat mendukung pencapaian tarket kinerja yang telah ditetapkan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2012

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun : 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S A S A R A N (I) Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut Sesuai Standar Pelayanan Minimal				
SASARAN STRATEGIS (1)				
1. Meningkatnya Keselamatan Pelayaran Transportasi Laut	1. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia	31 Kejadian Kecelakaan	24 Kejadian Kecelakaan	129,17 %
	2. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain	48 Kejadian Kecelakaan	66 Kejadian Kecelakaan	72,73 %
SASARAN STRATEGIS (2)				
2. Meningkatnya Pemenuhan Standar Teknis Dan Standar Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	3. Jumlah kapal yang memiliki sertifikat kelaiklautan kapal (cat : Pusat)	7.146 Sertifikat	9.298 Sertifikat	130,11
S A S A R A N (II) Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Guna Mendorong Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah				
SASARAN STRATEGIS (3)				
3. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana	4. Jumlah rute perintis yang dilayani transportasi laut	80 Rute Perintis	80 Rute Perintis	100.00 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Transportasi Laut	5. Jumlah pelabuhan yang dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil, terluar, daerah perbatasan, daerah belum berkembang dan daerah telah berkembang	393 Pelabuhan	386 Pelabuhan	98,22 %
S A S A R A N (I I I) Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut untuk Mengurangi Backlog dan Bottleneck Kapasitas Infrastruktur Transportasi Laut				
SASARAN STRATEGIS (4)				
4. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Ttransportasi Laut Nasional	6. Jumlah penumpang transportasi laut yang terangkut	5.027.658 Orang	6.061.571 Orang	120,56 %
	7. Jumlah penumpang angkutan laut perintis	629.847 Orang	634.000 Orang	100,66 %
	8. Jumlah muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	327.300.000 Ton	351.985.284 Ton	107,54 %
	9. Prosentase pangsa muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nasional	98,85 %	98,90 %	100,05 %
	10. Jumlah muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	59.599.000 Ton	59.851.000	100,59 %
	11. Prosentase pangsa muatan angkutan laut luar negeri yang diangkut oleh kapal nasional	10,00 %	11,80 %	118,00 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN STRATEGIS (5)				
5. Meningkatnya Manfaat Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Ekonomi Melalui Pengurangan Biaya Transportasi Penumpang dan Barang	12. Penurunan Turn-Around Time (TR) di pelabuhan yang diusahakan	30 Menit	*)	*)Data TRT tahun 2011 tidak tersedia; *)Data tahun 2012 Rata-rata TRT sebesar 87,94 Jam/Kapal
SASARAN STRATEGIS (6)				
6. Meningkatnya Pelayanan Pelayaran Transportasi Laut	13. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waiting tTme (WT) sesuai SK Dirjen yang belaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
	14. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian approach time (AT) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	36 Pelabuhan	75,00 %
	15. Jumlah pelabuhan mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective Time/ET) sesuai SK Dirjen yang berlaku terkait Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan	48 Pelabuhan	15 Pelabuhan	31,25 %
S A S A R A N (IV) Meningkatkan Peran Pemda, BUMN, Swasta, Dan Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi Laut Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN STRATEGIS (7)				
7. Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan di Sub Sektor Transportasi Laut	16. Jumlah MOU, perizinan, konstruksi, dan operasional kerjasama pemerintah dengan Pemda dan Swasta di bidang transportasi laut - Pelelangan - Perizinan - Konstruksi - Operasional	 2 - - -	 2 - - -	 100 % - - -
S A S A R A N (V) Peningkatan Kualitas SDM dan Melanjutkan Restrukturisasi Kelembagaan dan Reformasi Regulasi				
SASARAN STRATEGIS (8)				
8. Meningkatnya Kualitas SDM di Sektor Transportasi Laut	17. Jumlah kebutuhan tenaga marine inspector A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
	18. Jumlah kebutuhantenaga marine inspector B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
	19. Jumlah kebutuhan tenaga PPNS	60 Orang	59 Orang	98,33 %
	20. Jumlah tenaga PPNS	367 Orang	367 Orang	100,00 %
	21. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas A	60 Orang	60 Orang	100,00 %
	22. Jumlah kebutuhan tenaga kesyahbandaran kelas B	120 Orang	120 Orang	100,00 %
	23. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
	24. Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan
	25. Jumlah kebutuhan tenaga penyelam	*)	*)	*) Alokasi Anggaran tidak ada karena penghematan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN STRATEGIS (9)				
9. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, Dan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	26. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	78,00	78,00	100,00 %
	27. Jumlah realisasi pendapatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 331.485.001.206	Rp. 620.558.927.453	187,21 %
	28. Jumlah realisasi belanja anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 11.550.550.774.000	Rp. 9.993.257.136.888	86,52 %
	29. Nilai BMN pada neraca Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Rp. 26.680.195.570.824	Rp. 25.241.607.641.062	94,61 %
SASARAN STRATEGIS (10)				
10. Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Melanjutkan Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Laut	30. Jumlah penyelesaian regulasi			
	- RPP	1	1	100,00 %
	- RPM	8	8	100,00 %
	- Keputusan Dirjen	2	2	100,00 %
S A S A R A N (V I) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut serta teknologi transportasi laut yang efisien, ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan Iklim				
SASARAN STRATEGIS (11)				
11. Menurunnya Dampak Sub Sektor Transportasi Laut Terhadap Lingkungan Melalui Pengurangan Emisi Gas Buang	31. Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) transportasi laut	0,4853 Mega Ton	0,102 Mega Ton	20,59 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SASARAN STRATEGIS (12)				
12. Meningkatnya Pelayanan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Maritim di Bidang Transportasi Laut	32. Jumlah pelabuhan yang menerapkan Eco-Port (penanganan sampah dan kebersihan lingkungan pelabuhan)	6 Pelabuhan	6 Pelabuhan	100 %
	33. Jumlah pemilikan sertifikat IOPP (International Oil Polution Prevention)	1.021 Sertifikat	972 Sertifikat	95,20 %
	34. Jumlah pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran)	1.527 Sertifikat	1.332 Sertifikat	87,23 %
	35. Jumlah pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxius Liquid Substance)	134 Sertifikat	107 Sertifikat	79,85 %
	36. Jumlah pemilikan sertifikat ISPP (International Sewage Pollution Prevention)	245 Sertifikat	305 Sertifikat	80,33 %

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Jumlah Anggaran Tahun 2012 (Pagu Awal) : Rp. 9.419.143.665.000
Jumlah Anggaran Tahun 2012 (Pagu Akhir) : Rp. 11.550.550.774.000
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2012 : Rp. 9.996.546.558.000

IKHTISAR EKSEKUTIF

Review Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mereview Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen Hubla Tahun 2010 – 2014 sesuai Review RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dalam Kp. 1134 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014. Adapun perubahan pokok yang terdapat pada Review RENSTRA Ditjen Hubla adalah sesuai dengan perubahan yang terdapat pada RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014 yaitu Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun Review Rencana Strategis senantiasa berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2013 dan 2014. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah memperhitungkan tingkat kebutuhan, kecukupan, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul serta tetap mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014.

1) Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah : ”Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional yang Efektif, Efisien dan Berdaya Saing serta Memberikan Nilai Tambah sebagai Infrastruktur dan Tulang Punggung Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

2) Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ditetapkan menjadi 5 (lima) misi utama pembangunan yang harus ditempuh sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna;
b. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
c. Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan;
d. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara;
e. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan;

3) Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka dirumuskan tujuan Ditjen Hubla sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelayanan sub sektor perhubungan laut yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau berdaya saing serta memberikan nilai tambah.
b. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan sub sektor perhubungan laut sampai ke daerah terpencil dan terisolasi dan daerah perbatasan negara.
c. Meningkatkan pelayanan jasa sarana dan prasarana sub sektor perhubungan laut yang mampu memenuhi kebutuhan minimum dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
d. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dan SDM perhubungan laut yang professional, mandiri, bertanggungjawab dan bebas KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme) serta menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan penegakan hukum;

e. Memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran

4) Review Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sasaran Ditjen Hubla dirumuskan sebagai berikut :

a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut sesuai Standar Pelayanan Minimal;
b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;
c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi laut untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi laut;
d. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi laut sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi laut;
e. Peningkatan kualitas SDM transportasi laut dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi;
f. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi laut yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

5) Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012 baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain adalah :

a. Jumlah Kejadian Kecelakaan

Faktor penyebab kejadian kecelakaan yang paling dominan adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alam dan teknis. Adapun jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 11 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 31 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 24 kejadian kecelakaan.

Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 18 kejadian kecelakaan dimana pada tahun 2011 terdapat 48 kejadian kecelakaan dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66 kejadian kecelakaan.

Apabila dievaluasi pencapaian target kinerja tahun 2012 pencapaiannya sebesar 72,73 % dimana tingkat kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain sebanyak 48 kejadian kecelakaan namun realisasi di atas target yang diperhitungkan yaitu sebanyak 66 kejadian kecelakaan, sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih mempunyai kinerja yang kurang baik karena belum berhasil menurunkan tingkat kecelakaan.

Ditjen Hubla telah mengambil kebijakan dengan meningkatkan pengawasan dan menyampaikan kepada para penanggungjawab keselamatan pelayaran di pelabuhan untuk segera mengirimkan Maklumat Pelayaran tentang Kondisi Cuaca di Perairan Indonesia. Sedangkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh teknis dengan menata penempatan atau pengoperasian kapal sesuai dengan kondisi perairan serta mengevaluasi banyaknya kapak-kapal yang sudah berumur tua serta meningkatkan dan menata jadwal pemeliharaan atau docking kapal.

b. Pelayanan Kinerja Operasional di Pelabuhan

Terdapat beberapa pelabuhan komersial yang telah mencapai Waiting Time (WT), Approach Time (AT) dan Waktu Efektif diatas standard kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut Ditjen Hubla sebagai regulator akan berkoordinasi dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan komersial (operator) untuk meningkatkan kinerjanya dimana salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana operasional di pelabuhan.

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengambil beberapa kebijakan dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pelindo sebagai pengelola pelabuhan komersial (operator) untuk meningkatkan kinerjanya dimana salah satunya adalah penambahan sarana dan prasarana operasional di pelabuhan.

Ditjen Hubla juga akan melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Dirjen Hubla No. UM.002/38/18/DJPL-11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

c. Penurunan Emisi Gas Buang (CO2)

Ditjen Hubla belum mampu menurunkan Emisi Gas Buang (CO2) sesuai taget yang telah ditetapkan. Hal ini karena jumlah kapal yang sudah memiliki sertifikat IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate) Untuk Tahun 2012 masih terbatas yaitu sebesar 3,22 %. Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah kapal yang memiliki sertifikat IAPP adalah telah diajukan Rancangan Keputusan Menteri tentang Persyaratan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan. Peraturan ini bertujuan agar kapal-kapal yang beroperasional di dalam negeri akan diwajibkan (mandatory) untuk memiliki sertifikat IAPP sehingga tidak bersifat voluntary (tidak wajib)

d. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih memiliki keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim baik kwalitas maupun kwantitas. Adapun beberapa tenaga yang masih sangat diperlukan antara lain tenaga Marine Inspector, penyelam, tenaga penanggulangan pencemaran dan tenaga penangulangan kebakaran. Utuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut telah dialokasikan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Diklat namun dengan adanya penghematan maka alokasi anggaran menjadi tidak ada.

6) Langkah ke depan

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak terlepas dari jajaran seluruh unit kerja yang ada. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

a. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan atau untuk mewujudkan Zero Accident, Ditjen Hubla telah menyusun Road Map to Zero Accident. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:
   - Regulasi
   - Kelembagaan
   - Prasarana
   - Sarana
   - Sumberdaya Manusia
   - Operator
   - Masyarakat
   - Penegakan Hukum

b. Untuk meningkatkan pelayanan kinerja operasional di pelabuhan maka telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Dirjen No : UM.002/38/18/DJPL-11 Tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Standar kinerja pelayanan digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan pengoperasian di pelabuhan, kelancaran dan ketertiban pelayanan serta sebagai dasar pertimbangan untuk perhitungan tarif jasa pelabuhan.

c. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terutama untuk tenaga penanggulangan pencemaran, kebakaran dan penyelam maka perlu diprioritaskan pelaksanaan diklat pada tahun selanjutnya. Dan diharapkan dapat dilakukan koordinasi yang intensif dengan BPSDM Kementerian Perhubungan agar dapat terpenuhi kebutuhan SDM baik kwalitas maupun kwantitas.

d. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang terkendala akan menjadi prioritas pada tahun yang akan datang.

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan diklat dan pembinaan kepada aparat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait keselamatan pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim serta kompetensi lain yang dapat mendukung pencapaian tarket kinerja yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN HUBLA TAHUN 2012

BAB IV
PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF